

# KONFLIK, KEKERASAN DAN PERDAMAIAN

Sebagai bangsa yang majemuk berdasarkan adat istiadat, bahasa, suku bangsa, budaya, agama dan kepercayaan, dll, Indonesia senantiasa dirongrong oleh gangguan dan ancaman yang tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga berasal dari luar negeri. Ancaman yang merongrong persatuan, kesatuan, dan Bhineka Tunggal Ika tersebut berupa intoleransi, radikalisme, konflik, kekerasan, dekadensi moral, serta disintegrasi bangsa. Karena itu bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan nilai-nilai konsensus yang bersifat integratif agar dapat menyatupadukan berbagai-bagai keberagaman tersebut, tetapi juga membutuhkan metode pengajaran yang sistematis kepada seluruh warga negara akan pentingnya nilai-nilai toleransi, keadilan, assertiveness, budi pekerti luhur, moral, budaya, dan agama untuk merawat kebhinekaan, meredam konflik dan kekerasan serta menciptakan perdamaian.

Buku ini secara ringkas menyajikan pemikiran terkait konflik, kekerasan, dan perdamaian dari Ibn Khaldun, Karl Marx, Ralf Dahrendorf, Georg Simmel, Lewis Coser; Johan Galtung, Ted Robert Gurr, Simon Fisher, dll. Materi buku ini diharapkan tidak hanya berguna bagi para mahasiswa, tetapi juga bagi para praktisi kemanusiaan, aktivis LSM, dan masyarakat umum, utamanya para penggiat dan mediator perdamaian guna menciptakan dunia yang semakin aman, damai, dan sejahtera.



Literacy Institute

© Jl. Wanggu, Kendari 93231

✉ [literacyinstitute@yahoo.com](mailto:literacyinstitute@yahoo.com)

🌐 [www.literacyinstitute.org](http://www.literacyinstitute.org)

☎ 0852-9979-3323

ISBN: 978-602-61980-7-5



9 786026 198075

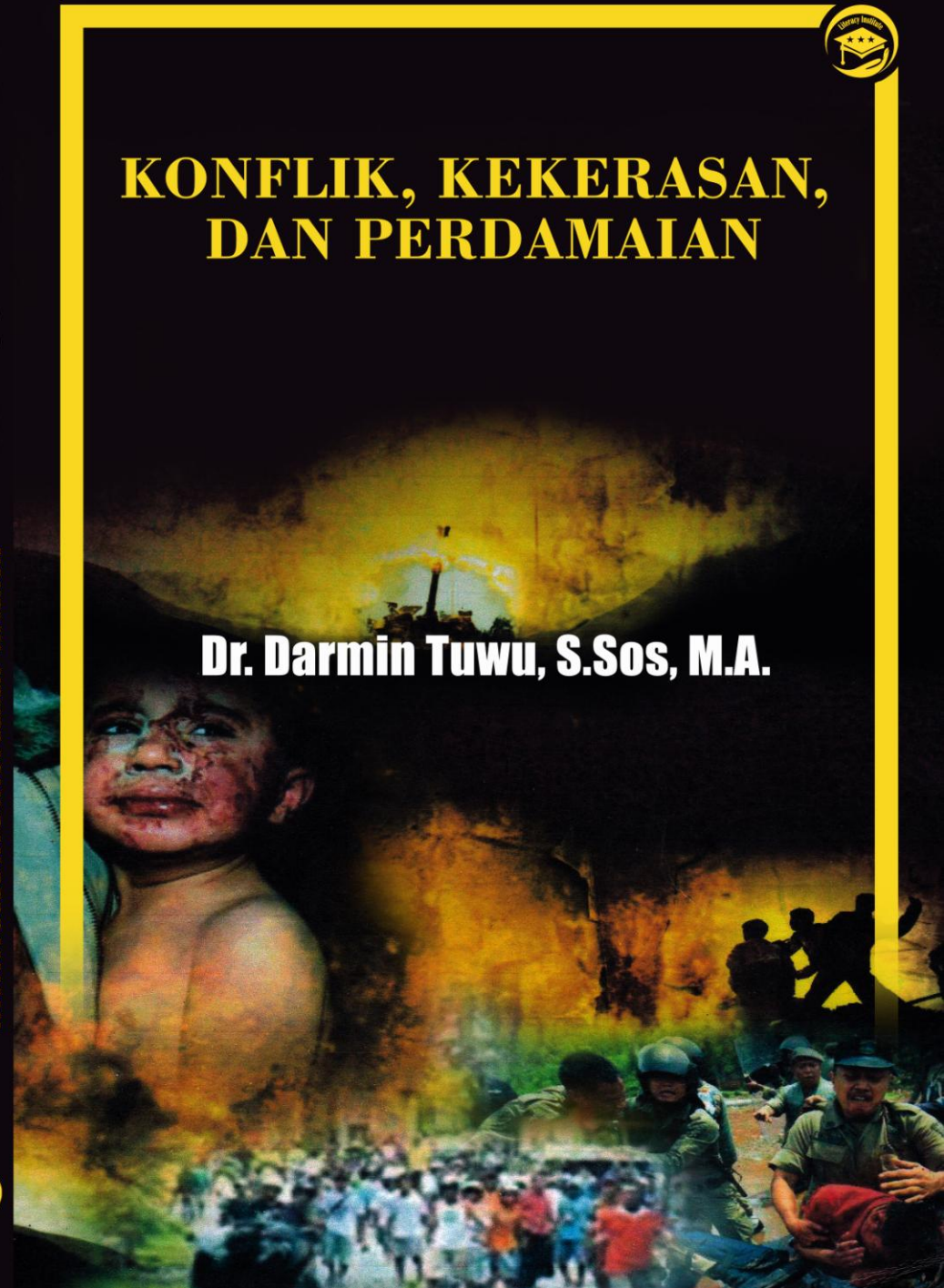


KONFLIK, KEKERASAN DAN PERDAMAIAN

Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A.

# KONFLIK, KEKERASAN, DAN PERDAMAIAN

Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A.



# KONFLIK, KEKERASAN, DAN PERDAMAIAN

**Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A.**

# **KONFLIK, KEKERASAN, DAN PERDAMAIAN**



Literacy Institute, 2018

# KONFLIK, KEKERASAN, DAN PERDAMAIAN

## **Penulis**

Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A.

ISBN: 978-602-61980-7-5

ix+ 176 hlm.; 14,8 x 21 cm

## **Desain Sampul**

Rio Kurniawan

## **Tata Letak**

Agung Dermawansa

## **Penerbit**

### **Literacy Institute**

Bumi Wanggu Permai II Blok D/12  
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323

Email: literacyinstitute@yahoo.com

Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: Januari, 2018

---

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

---

# Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Nya, karena atas pertolongan, kekuasaan dan kebesaran-Nya jualah sehingga buku “Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian” ini dapat selesai pada waktunya. Tanpa pertolongan dan Rahmat-Nya tidaklah mungkin buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Sebagai bangsa yang majemuk (*plural society*) di tengah perkembangan pesat teknologi informasi, Indonesia akan senantiasa dirongrong oleh gangguan dan ancaman, baik ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang merongrong persatuan, kesatuan, dan Bhineka Tunggal Ika Indonesia adalah berupa intoleransi, radikalisme, konflik, kekerasan, degradasi moral, serta disintegrasi bangsa. Karena itu bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan nilai-nilai konsesus yang bersifat integratif yang dapat menyatu padukan berbagai-bagai keragaman tersebut, tetapi juga membutuhkan metode pengajaran yang terarah dan sistematis kepada seluruh warga negaranya utamanya generasi muda akan pentingnya nilai-nilai toleransi, *assertiveness*, budi pekerti luhur, moral, budaya, dan agama untuk merawat kebhinekaan, menekan konflik dan kekerasan serta menciptakan perdamaian.

Buku ini tentunya belum menjawab keseluruhan pembahasan dalam kaitan dengan luas lingkup dan pendalaman tentang Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, kehadiran buku ini diharapkan dapat mengisi kekosongan sekali-

gus melengkapi literatur yang ada terkait konflik dan kekerasan, serta upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat.

Materi ini merupakan sebagian dari materi yang diajarkan pada Jurusan Sosiologi dan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, di tingkat S1 (Sarjana), yang diambil dari buku-buku konflik, kekerasan dan perdamaian yang diperoleh dari guru-guru penulis di Universitas Gadjah Mada, dilengkapi dengan kumpulan materi kuliah, hasil-hasil penelitian terkait konflik, kekerasan dan perdamaian, serta kumpulan tulisan penulis yang telah dipublikasi di media massa. Meskipun dalam buku ini telah dimasukkan beberapa literatur terakhir, akan tetapi tentu saja tetap ada beberapa literatur yang belum sempat penulis tuangkan dalam edisi ini, semoga dalam edisi berikutnya materi-materi tersebut dapat penulis tuangkan guna melengkapi kekurangan yang ada.

Buku ini penulis dedikasikan untuk Ibu saya almarhumah Wa Ana, Ayah saya Lantarawe, saudara-saudaraku, istri dan anak-anakku, guru-guruku di Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia, yang mana pendapatnya saya kutip, teman-teman dosen di Jurusan Sosiologi FISIP UHO, dan semua pihak yang telah berjasa yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu di sini.

Buku ini diharapkan tidak hanya berguna bagi mahasiswa tetapi juga bermanfaat bagi para praktisi, aktivis kemanusiaan, LSM dan masyarakat umum. Kepada mahasiswa diharapkan dapat memotivasi serta meningkatkan gairah belajar mahasiswa guna memperdalam dan mengembangkan wawasan keilmuan mereka. Sebagai mahasiswa senantiasa dituntut dan ditantang untuk mengetahui dan menguasai berbagai konsep dan teori serta keterampilan (*skill*) agar dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyongsong era yang

semakin kompetitif. Buku ini juga menyediakan pengetahuan untuk menjadi mediator perdamaian.

Tiada gading yang tak retak. Menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan isi buku ini, karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas sumbang saran yang konstruktif dari para pembaca guna melengkapi dan mengembangkan buku ini di edisi mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan nilai tambah (*value added*), pemahaman, dan meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa, praktisi, aktivis LSM, dan masyarakat umum, utamanya pengetahuan tentang perdamaian guna menciptakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera.

*Wassalam.*

Kendari, Desember 2017

Penulis

# Daftar Isi

## **Bab 1. Pendahuluan ~ 1**

- A. Pengantar ~ 1
- B. Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia ~ 5
- C. Konsepsi tentang Konflik ~ 13
- D. Peristiwa Konflik Dalam Masyarakat ~ 17
- E. Konflik Tanpa Kekerasan dan Konflik dengan Kekerasan ~ 18

## **Bab 2. Teori-Teori Konflik ~ 21**

- A. Pengantar ~ 21
- B. Teori Konflik Kelas ~ 24
- C. Teori Konflik Fungsional ~ 31
- D. Teori Konflik Politik ~ 34

## **Bab 3. Formasi Konflik Johan Galtung ~ 45**

- A. Pengantar ~45
- B. Konflik sebagai Pencipta dan Konflik sebagai Penghancur ~ 46
- C. Dialektika Manifes-Laten dan Segitiga Konflik Galtung ~ 49
- D. Konflik Aktor dan Konflik Struktur ~ 52

## **Bab 4. Teori Konflik Ibn Khaldun ~ 57**

- A. Pengantar ~ 57
- B. Teori Konflik Ibn Khaldun ~ 59



**Bab 5. Perspektif Konflik Kontemporer ~ 67**

- A. Pengantar ~ 67
- B. Perspektif Konflik dalam Masyarakat ~ 68
- C. Prasangka Dalam Konflik Antar Etnik ~ 73

**Bab 6. Teori-Teori kekerasan ~ 83**

- A. Pengantar ~ 83
- B. Definisi Kekerasan ~ 84
- C. Sifat Kekerasan ~ 87
- D. Jenis-Jenis Kekerasan ~ 88
- E. Agama dan Kekerasan ~ 96

**Bab 7. Analisis, Pemetaan, Resolusi Konflik dan Perdamaian ~ 101**

- A. Pengantar ~ 101
- B. Analisis dan Pemetaan Konflik ~ 102
- C. Teori Resolusi Konflik ~ 110
- D. Resolusi Konflik dan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal ~ 117
- E. Dari konflik Menuju Perdamaian Abadi ~123

**Bab 8. Penutup ~ 139**

**Daftar Pustaka ~ 143**

**Lampiran ~ 148**

**Tentang Penulis ~ 175**

## *Persembahkan:*

Untuk semua yang selalu setia mendukung tiada henti, orang tua, anak-istri, Guru-guruku yang ada di Unhas, UGM, dan UI, teman-teman Dosen di FISIP-UHO, para mahasiswaku, teman-teman di mana pun berada, atas inisiatifnya menciptakan dunia yang aman-damai tanpa konflik dan kekerasan.

**What you do is of little significance.  
But it is very important that you do it.**

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. Pengantar

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna di muka bumi dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Mengapa dikatakan demikian? Salah satu jawabannya adalah karena manusia sejak dilahirkan di dunia telah dibekali dengan dua potensi besar sebagai kekuatan alamiah (*natural powers*). Di satu sisi kekuatan alamiah ini berupa perasaan emosi, amarah, nafsu, dendam, dan agresi (kekuatan negatif), namun di sisi lain manusia juga dibekali dengan akal pikiran (kekuatan positif). Dua jenis kekuatan alamiah inilah yang senantiasa mewarnai perjalanan hidup setiap manusia dari waktu ke waktu, baik statusnya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Naluri manusia sebagai makhluk sosial menjadikan dirinya selalu membutuhkan keberadaan orang lain, manusia selalu butuh interaksi dengan sesama, dan memerlukan bantuan manusia lain di dalam kehidupannya.

Setiap manusia selalu ingin berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, cenderung akan memunculkan dua jenis kemungkinan interaksi yang dikembangkan, yaitu interaksi sosial yang bersifat kerjasama (asosiatif) dan interaksi sosial yang bersifat pertentangan (disosiatif). Interaksi sosial yang bersifat asosiatif akan cenderung menghasilkan hubungan kerja sama (*cooperation*), sementara

interaksi sosial yang bersifat disosiatif akan cenderung menghasilkan pertentangan dan konflik.

Terkait dengan persoalan konflik, dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat di mana pun tempatnya di dunia ini bahkan sejak zaman dahulu, setiap manusia atau kelompok manusia, kehidupannya tidak lepas dari situasi persaingan, pertentangan, dan konflik (*conflict*), sehingga dapat dikatakan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia.

Secara harafiah konflik berarti percekocokan, perselisihan, atau pertentangan antara satu manusia atau satu kelompok dengan manusia atau kelompok lain. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup tersendiri yang khas (*unique*), mereka tidak selalu identik, terpisah dan statis. Oleh karena itu, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia (Francis, 2006).

Menurut Webster dalam Pruitt, dkk. (2004) bahwa istilah konflik "*conflict*" berarti suatu perkelahian, peperangan atau per-juangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Selanjutnya arti kata konflik tersebut kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, pendapat, dan lain-lain". Secara singkat istilah konflik atau "*conflict*" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep yang tunggal.

Lebih lanjut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengatakan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Pruitt, dkk., 2004).

Sementara itu, Johan Galtung (2003) mendefinisikan konflik dalam dua pengertian. Pertama, konflik didefinisikan sebagai benturan fisik dan verbal antar dua orang/kelompok atau lebih di mana akan muncul penghancuran (*destructive*) sebagai akibat dari konflik tersebut. Kedua, konflik sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru (*constructive*).

Galtung (2003) memandang konflik sebagai proses konflik segitiga (*the conflict triangle*) yang dinamis, di mana struktur konflik yang terjadi terdiri dari 3 macam unsur yaitu: pertama, sikap (*attitude*); kedua, perilaku (*behavior*); dan ketiga, pertentangan (*contradiction*). Ketiga macam unsur konflik Galtung tersebut secara konstan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga komponen konflik segitiga ini, menurut Johan Galtung selalu muncul bersamaan dalam sebuah situasi konflik total.

Lebih lanjut Johan Galtung mengatakan bahwa suatu konflik dapat diamati dalam dua level yaitu pada level manifest (*manifest level*) dan pada level laten (*latent level*). Konflik pada level manifest (*manifest level*) atau konflik pada tingkat yang nyata biasanya dapat diamati (*empirical*), kelihatan (*observed*) serta disadari (*conscious*) keberadaannya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik menyadari keberadaan diri mereka masing-masing. Bentuk *real*-nya dapat dilihat pada perilaku (*behavior*) seseorang. Sedangkan konflik pada level laten (*latent conflict*), biasanya tidak kelihatan dan tidak disadari. Aktor yang berkonflik tidak menyadari (*subconscious*) keberadaan diri mereka. Bentuk *real*-nya seperti tampak dalam sikap (*attitude*) dan kontradiksi (*contradiction*).

Definisi konflik kemudian mengalami perluasan makna seiring dengan situasi yang berkembang, serta semakin beragamnya jenis

konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini kemudian memunculkan anggapan bahwa konflik identik dengan kekerasan (*violence*), seperti bentrok fisik atau amuk massa, perkelahian dan sebagainya. Pandangan tentang konflik akan sangat tergantung pada pandangan politik yang dianut serta kepentingan orang-orang yang melihat dan terlibat dalam suatu peristiwa konflik. Konflik dalam kadar rendah hanya sebatas perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan maupun perbedaan ide. Sebaliknya, apabila perbedaan-perbedaan tersebut berubah menjadi pertentangan kepentingan dan ide, maka pada tingkat tertinggi konflik (*conflict high level*) muncul dalam bentuk konfrontasi atau bentrokan fisik yang bisa merobek-robek eksistensi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian konflik tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik (*conflict*) dapat terjadi kapan saja (*when ever*) masa kemarin yang lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Konflik dapat terjadi di mana saja (*where ever*) dalam setiap kelompok masyarakat, di desa atau di kota, di negara berkembang terbelakang maupun di negara maju modern. Konflik dapat terjadi ketika ada benturan pikiran, perkataan dan perbuatan yang tidak menemukan jalan keluar oleh individu atau kelompok yang tengah berkonflik. Meskipun demikian konflik tidak selamanya identik dengan kekerasan (*violence*), atau dapat dikatakan bahwa tidak semua konflik disertai dengan kekerasan. Dalam kadar dan tataran tertentu, untuk kemajuan, dinamisasi dan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, konflik bisa saja dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi yang perlu dicatat bahwa konflik yang dimaksudkan di sini adalah konflik tanpa kekerasan (*conflict without violence*) yaitu konflik yang tidak melibatkan benturan fisik. Oleh karena itu, dalam setiap peristiwa konflik yang terjadi, yang paling dikhawatirkan adalah apabila konflik terjadi, lalu dibiarkan berlarut-larut dan tidak dikelola secara

baik, maka akan dapat memicu terjadinya kekerasan fisik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kekerasan dapat terjadi apabila konflik tidak dikelola dengan baik.

## **B. Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, mempunyai jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa (BPS, 2017). Indonesia juga dikenal sebagai negara bangsa, karena masyarakatnya terdiri dari suku-suku bangsa yang sangat beragam. Ada sekitar 714 suku bangsa dengan budaya tersendiri yang hidup di Indonesia yang mendiami pulau-pulau seluruh Nusantara yang terbentang luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah suku tersebut, 270 suku di antaranya terdapat di Pulau Papua. Fakta tersebut menunjukkan bahwa betapa luas Indonesia dan betapa beragamnya masyarakat Indonesia.

Sebagian besar masyarakat adalah campuran dari kelompok-kelompok sosial yang dibedakan oleh faktor-faktor seperti etnisitas, agama, adat istiadat, atau bahasa. Keberagaman (*diversity*) masyarakat disebabkan oleh imigrasi, penyerbuan, dan sempalan keagamaan. Inggris misalnya oleh imigrasi sejak Perang Dunia II maupun penyerbuan dalam jangka waktu yang lama. Keberagaman di Afrika Selatan disebabkan oleh gelombang pemukiman Belanda dan Inggris selama kolonialisme dari abad ke-19 dan awal ke-20.

Keberagaman dalam masyarakat sering dikaitkan dengan ketimpangan (*inequality*). Warga kulit hitam di Amerika Serikat, misalnya, yang awalnya dibawa sebagai budak, secara keseluruhan miskin dibandingkan warga kulit putih. Demikian pula, warga Katolik di Irlandia Utara rata-rata kurang makmur dibandingkan dengan warga Protestan. Keberagaman juga sering dikaitkan dengan konflik, prasangka dan stereotipe.

Masing-masing kelompok sosial akan membuat keyakinan terhadap satu sama lain yang mencegah kontak sosial sehingga mengakibatkan diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan pemukiman, sementara kekerasan komunal pun menggejala. Kebijakan sosial untuk menangani ketidakadilan dan konflik ini, misalnya dengan menghukum diskriminasi rasial atau hasutan, atas kebencian rasial. Penting untuk dicatat bahwa keberagaman dan kesetaraan adalah bukanlah hal yang sama. Dengan demikian pengakuan bahwa masyarakat diuntungkan oleh percampuran latar belakang etnis, keyakinan agama, dan kebudayaan, ini tidak selalu berarti persamaan kesempatan bagi kelompok-kelompok ini di dalam masyarakat (Abercrombie, dkk, 2010:158-159).

Menurut Nasikun (2007:34) struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, adat-istiadat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas (*upper class*) dan lapisan bawah (*lower class*) yang sangat tajam.

Perbedaan suku-bangsa, agama, adat-istiadat, dan perbedaan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Masyarakat majemuk (*plural societies*) merupakan suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial-humaniora dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut.

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, demikian menurut Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih



elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia disebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas, kendati jumlahnya semakin bertambah-tambah, terutama pada akhir abad ke-19, sekaligus adalah penguasa yang memerintah sejumlah besar orang-orang Indonesia Pribumi (biasa disebut juga sebagai golongan Pribumi) yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas.

Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, bukan sebagai warga negara, tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, seperti halnya dengan orang-orang Belanda, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Sementara itu kehidupan orang-orang Pribumi, seperti halnya dengan kehidupan orang Belanda, dan orang-orang Tionghoa, tidaklah utuh pula. Kehidupan mereka tidaklah lebih dari kehidupan pelayan di negerinya sendiri. Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas dasar sistem kasta (Belanda, Tionghoa, Pribumi) tanpa ikatan agama.

Orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Indonesia Pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan atau memelihara pola pikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing. Hasilnya ialah berupa masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kehendak bersama (*common will*).

Di dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya kehendak bersama tersebut menemukan pernyataannya di dalam bentuk tidak adanya “permintaan sosial” yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat (*common social demand*). Setiap masyarakat politik, demikian menurut Furnivall, dari kelompok “*nomad*” yang berpindah-pindah tempat sampai kepada bangsa yang “berdaulat”, berangsur-angsur melalui periode waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaannya sendiri: membentuk keseniannya sendiri, baik dalam bentuk sastra, seni lukis, maupun musik, serta membentuk berbagai kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari: berupa terbentuknya sistem pendidikan informal di mana setiap anggotanya tersosialisir sebagai anggota dari masyarakat tersebut. Kebutuhan-kebutuhan keagamaan, politik, dan keindahan, pendek kata semua kebutuhan kultural, memiliki aspek ekonomi oleh karena semuanya pada akhirnya menyatakan diri secara terorganisir hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan ekonomi, yakni sebagai permintaan (*demand*) masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi di dalam suatu masyarakat majemuk, seperti halnya dengan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, permintaan masyarakat tersebut tidaklah terorganisir, melainkan bersifat ‘seksional’, dan tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat. Golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan Pribumi, masing-masing memiliki pola permintaannya sendiri-sendiri (Nasikun, 2007:38).

Simpulan dari konsepsi masyarakat majemuk Furnivall, yakni suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Suatu masyarakat, adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat *diverse*. Atau kita meminjam istilah Clifford Geertz (1963) dalam Nasikun (2007:40), maka masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Dengan cara yang lebih singkat, Pierre I. van den Berghe (1969) dalam Nasikun (2007:40-41) menyebutkan beberapa karakteristik berikut sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni:

- (1) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain;
- (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer;
- (3) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
- (4) Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
- (5) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta

(6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Oleh karena sifat-sifat yang demikian itulah, maka van den Berghe menganggap masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu di antara dua jenis masyarakat menurut model analisis Emile Durkheim. Suatu masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter (berdasarkan garis keturunan tunggal dan homogeneus), akan tetapi sekaligus juga tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi, dengan lembaga bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, namun bukan seperti yang dikatakan oleh Furnivall yang melihat masyarakat pluralitas dalam konteks masyarakat kolonial Hindia-Belanda yang membedakan golongan-golongan Eropa, Tionghoa, dan Pribumi. Akan tetapi, pasca Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, golongan Eropa keluar dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, pluralitas yang terdapat di dalam golongan Pribumi itu sendiri memperoleh artinya yang lebih penting daripada apa yang dikemukakan oleh Furnivall.

Menurut Nasikun (2007: 42-62) bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia terjadi. Pertama, keadaan/geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang berjejer dan tersebar di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari Timur ke Barat (dari Merauke ke Sabang) dan lebih dari 1.000 mil dari Utara ke Selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Tentang berapa jumlah suku

bangsa yang ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai-bagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. MetroTV (7/12/17) melansir bahwa ada sekitar 714 suku bangsa di Indonesia, 270 suku bangsa di antaranya ada di Papua. Irwan Abdullah (2006) misalnya menyebut terdapat lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia merupakan pernyataan yang jelas untuk menunjukkan keragaman budaya yang mencakup bahasa, agama, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang dipraktikkan pada tingkat lokal (Abdullah, 2006:64).

Sementara Hildred Geertz, menyebutkan adanya lebih dari 300 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Beberapa suku-bangsa dengan jumlah anggotanya yang tergolong paling besar pada tahun 1956 di antaranya, demikian menurut Skinner, yakni Jawa (36 juta orang), Sunda (12,5 juta orang), Madura (5 juta orang), Minangkabau (2,7 juta orang), dan Bugis (2,4 juta orang), Bali (1,6 juta orang), Batak Toba (950.000 orang), Sumbawa (135.000 orang), dan lain-lain. Jumlah tersebut jika dihitung ulang sekarang awal Tahun 2018, angkanya pasti akan sangat jauh berbeda, perbedaannya bisa berlipat-lipat kali dari jumlah tahun 1956 tersebut di atas disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan sosial.

Faktor kedua, yakni kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun Sesudah Masehi, sudah tersebar luas serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah hidup lebih dahulu sebelum itu. Namun demikian terutama di Pulau Jawa dan Balilah pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini.

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh agama Islam terutama memperoleh tanah tempat berpijak yang kokoh di daerah-daerah di mana pengaruh agama Hindu dan Budha tidak cukup kuat. Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka ke Indonesia tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku, suatu jenis barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu. Kegiatan missionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis ke luar dari daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan.

Ketiga, iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara ini, merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, yakni daerah pertanian sawah (*wet rice cultivation*) yang terutama banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang (*shifting cultivation*) yang banyak kita jumpai di luar Pulau Jawa. Perbedaan lingkungan ekologis tersebut menjadi sebab bagi terjadinya kontras antara Jawa dan luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, dan regional tersebut di atas merupakan dimensi-dimensi horizontal daripada struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu dimensi vertikal struktur masya-

rakat Indonesia yang menjadi semakin penting artinya dari waktu ke waktu, dapat kita saksikan dalam bentuk semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan.

### C. Konsepsi Tentang Konflik

Sebuah konflik terjadi dilatar belakangnya oleh gesekan antar perbedaan baik individu maupun golongan. Konflik merupakan hal yang bersifat niscaya, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik, baik konflik intra diri individu, konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun konflik antar kelompok dengan kelompok atau dengan golongan masyarakat lainnya. Konflik tidak dapat dilynepkan, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, kebutuhan, ciri-ciri fisik, pemahaman, posisi, adat istiadat, nilai, keyakinan, dll yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan dan perubahan sosial masyarakat.

Kata konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu "*conflict*" yang berarti percekcoakan, perselisihan, pertentangan antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lainnya. Dalam Oxford Dictionary (1995:83) disebutkan bahwa "*Conflict is struggle, fight or serious disagreement*". Dalam kamus Oxford bahwa konflik adalah perjuangan (*struggle*), pertengkaran, pertarungan, berjuang melawan (*fight*), atau ketidak sepakatan yang serius (*serious disagreement*) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terkait dengan pikiran dan pendapat (*opinion*), konflik berarti berlawanan, bertentangan, atau oposisi (*opposition*), perselisihan, pertikaian, dan perbedaan (*difference*).

Ada banyak definisi maupun teori tentang konflik yang telah dikemukakan oleh para ahli. Misalnya saja dikemukakan oleh Dale, *et.al* (2006:83) bahwa teori konflik memfokuskan diri pada sifat tidak dapat dielakkan/dihindarkan (*inevitability*) dari perubahan (*change*) dan ketegangan (*tensions*) yang dihasilkan melalui perubahan. “*Conflict theory is focused on the inevitability of change and the tensions that are produced by change*”.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau mereka yang menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Menurut Johan Galtung bahwa di dalam konflik terdapat kontradiksi (pertentangan), sesuatu yang menghalangi sesuatu yang lain. Dengan kata lain, terdapat suatu masalah (Johan Galtung, 2003: 157). Situasi tersebut bisa mengarah pada munculnya kekerasan apabila tidak segera diselesaikan.

Konflik ada dua jenis yaitu konflik intrapersonal (*intrapersonal conflict*) dan konflik interpersonal (*interpersonal conflict*). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, atau keinginannya untuk melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya (*peer group*), sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*).



Menurut Fisher, dkk, (2001:4) bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Konflik menurut Ibn Khaldun lahir dari interaksi antar individu maupun antar kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Persoalan konflik selalu terjadi dalam peradaban umat manusia, terutama dalam realitas masyarakat yang diwarnai oleh peperangan, perebutan kekuasaan, dan disintegrasi. Menurut Khaldun, ada tiga aspek yang menyulut munculnya konflik yaitu: pertama, konsekuensi logis dari *ashobiyah*, kedua, faktor politik, dan ketiga, faktor ekonomi (Affandi, 2004).

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, semua bentuk hubungan manusia – sosial, ekonomi, dan kekuasaan—mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Contohnya: kesenjangan status sosial, kurang meratanya kamakmuran (*welfare*) dan akses yang tidak seimbang, sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang bersifat konstruktif maupun yang destruktif.

Dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, ia menyimpulkan bahwa kunci sejarah manusia adalah perjuangan kelas sosial (*social class*). Dalam tiap masyarakat, beberapa kelompok kecil menguasai alat produksi dan mengeksploitasi orang-orang yang tidak menguasainya. Dalam masyarakat industri (*industry society*), perjuangannya ialah antara kaum yang menguasai alat-alat produksi (*borjuis*) yaitu kelompok kecil kapitalis yang memiliki alat untuk memproduksi kekayaan, dan kaum *proletar*, yakni massa pekerja yang dieksploitasi oleh kaum *borjuis*.

Sewaktu Marx melakukan pengamatannya, kapitalisme berada pada masa kanak-kanak, dan para pekerja berada di bawah kekuasaan pemberi kerja mereka. Para pekerja di kala itu tidak memiliki apa yang sekarang kita terima sebagai hal yang wajar: hak untuk mogok, upah minimum, delapan jam kerja per hari, rehat kopi, lima hari kerja per pekan, cuti dan libur yang dibiayai, jaminan kesehatan, cuti sakit, kompensasi untuk pengangguran, dan jaminan sosial (*social security*). Analisis Marx mengingatkan kita bahwa keuntungan-keuntungan ini tidak datang dengan kemurahan hati, melainkan datang dari kaum pekerja yang berjuang demi mendapatkan hak khusus dari para pemberi kerja mereka.

Adapun Lewis Coser menunjukkan bahwa konflik cenderung berkembang di kalangan orang yang berada dalam hubungan dekat. Orang-orang ini telah merumuskan cara-cara untuk mendistribusikan tanggung jawab dan hak-hak, kekuasaan dan imbalan. Berbeda dengan para fungsionalis, yang memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang harmonis, dengan bagian-bagian yang bekerja bersama, para teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang terlibat dalam persaingan sengit mengenai sumber daya yang langka. Meskipun aliansi atau kerjasama dapat ber-

langsung di permukaan, namun di bawah permukaan tersebut terjadi pertarungan memperebutkan kekuasaan.

#### **D. Peristiwa Konflik Dalam Masyarakat**

David Lockwood mengatakan bahwa dalam setiap situasi sosial senantiasa mengandung di dalam dirinya dua hal, yakni: Pertama, tata tertib sosial yang bersifat normatif, dan Kedua, substratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib dan konflik adalah dua kenyataan yang melekat secara bersama-sama di dalam setiap sistem sosial. Tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat, sama sekali tidak berarti lenyapnya konflik di dalam masyarakat. Sebaliknya, tumbuhnya tata tertib sosial dalam masyarakat justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang stabilitas (harmoni) dan instabilitas (konflik) daripada suatu sistem sosial, maka yang kita maksudkan adalah derajat kemampuan dan keberhasilan dan atau kegagalan dari suatu tertib normatif di dalam mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Konflik merupakan gejala yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat, dan konflik tidak mungkin bisa dienyapkan. Mengapa demikian? Karena sebagai gejala kemasyarakatan yang selalu inheren di dalam kehidupan setiap masyarakat, eksistensi konflik tidak dapat dienyapkan, ia hanya akan lenyap bersama dengan lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu menurut Nasikun (2007) yang dapat dilakukan orang hanyalah mengendalikan agar peristiwa konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan sosial dalam masyarakat, konflik yang terjadi di antara berbagai kelompok sosial yang saling berlawanan tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan (*violence*).

## E. Konflik Tanpa Kekerasan dan Konflik Dengan Kekerasan

Dalam hal konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak terwujud dalam bentuk kekerasan, hal tersebut dapat saja dilakukan sepanjang persoalan dan sumber konflik dapat dikelola dan diatasi dengan baik, dengan mengedepankan azas keadilan. Kondisi ini menurut pandangan Tuwu<sup>1</sup> (2010) adalah disebut dengan istilah kondisi konflik tanpa kekerasan (*conflict without violence*). Kondisi konflik tanpa kekerasan adalah suatu kondisi konflik yang ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, pertentangan, dan atau kompetisi antara satu individu dengan individu lainnya maupun pertentangan antar kelompok sosial dalam masyarakat yang berkonflik, di mana konflik dilakukan secara terbuka, adil, *fair* dan *gentle*, namun semuanya berlangsung dalam suasana tanpa kekerasan (*non violence*). Dalam konflik semacam ini berbagai aktor yang terlibat dalam konflik, baik berupa aktor personal maupun aktor kelompok, masing-masing aktor menyadari keberadaan dan eksistensi mereka. Kesadaran diri (*self consciousness*) tersebut telah menyadarkan diri mereka bahwa mereka berasal dari berbagai kelompok sosial, budaya, etnis, agama yang beragam dan berbeda antara atau sama lain. Kesadaran akan perbedaan tersebut menghasilkan pandangan baru tentang diversitas sehingga mereka dapat menerima keberadaan satu sama lain secara *fair*, terbuka, dan *gentle*. Pengetahuan dan pemahaman tentang diversitas dalam masyarakat majemuk akan menghasilkan individu, kelompok, komunitas dan warga masyarakat yang baik dan beradab.

Dalam kehidupan manusia yang ada dalam setiap kelompok masyarakat, eksistensi konflik selalu menyertai kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> Lihat Darmin Tuwu, dalam opini Kendari Pos Edisi Rabu, 11 Agustus 2010. *Konflik Tanpa Kekerasan: Telaah Kritis Untuk Ciptakan Kampus Unhalu Yang Aman dan Damai*.

Bahkan untuk kemajuan dan perkembangan kehidupan pembangunan masyarakat (dinamisasi masyarakat), kelompok-kelompok sosial dan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat, terkadang dalam kadar tertentu eksistensi konflik itu dibutuhkan oleh masyarakat. Konflik yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut wujudnya adalah konflik tanpa kekerasan (*conflict without violence*) yaitu konflik yang ada dalam masyarakat di mana kemunculannya tidak merugikan dan membahayakan eksistensi manusia dalam masyarakat, kemunculannya tidak menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat. Dengan kata lain, bentuk konflik tanpa kekerasan keberadaannya tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif maupun kerugian besar bagi masyarakat. Hal tersebut terkait dengan sifat, fungsi atau kegunaan konflik dalam kehidupan masyarakat manusia (*functional of conflict in society*) yang berasal dari pandangan teori konflik fungsional. Salah satu asumsi dasar teori konflik fungsional mengatakan bahwa untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat, kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi, lembaga-lembaga sosial, budaya, ekonomi, politik yang ada dalam masyarakat, dalam kadar tertentu, eksistensi konflik itu dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan, dan persaingan (*competition*) menyebabkan kelompok tersebut saling berkompetisi dan bersaing satu sama lain, sehingga terjadi kemajuan, perkembangan dan perubahan sosial.

Selain konflik tanpa kekerasan, kita juga menjumpai bentuk lain dari konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu konflik dalam bentuk kekerasan (*conflict with violence*). Konflik dengan kekerasan adalah suatu bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat di mana aktor-aktor yang terlibat dalam konflik menggunakan kekerasan fisik (*physical violence*) maupun kekerasan non-fisik (*non-physical*

*violence*). Bentuk konflik yang melibatkan kekerasan fisik (*physical violence*) contohnya seperti melempari dengan benda padat/tajam, menampar, menendang, memukul, meninju, berkelahi, adu jotos, hingga menghilangkan nyawa seseorang (membunuh). Sementara konflik dalam bentuk kekerasan non-fisik (*non-physical violence*) contohnya seperti menyinggung perasaan, menganggap rendah seseorang, menganggap remeh, memandang enteng, sikap tidak menghargai, menghina, berkata kasar, melecehkan, mencaci maki, menyakitkan hati dan perasaan orang lain, dll. Konflik dalam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik (*physical violence*) maupun kekerasan non-fisik (*non-physical violence*), kemunculannya dalam masyarakat sebaiknya sedini mungkin dicegah dan dihindari dalam setiap peristiwa konflik, dan apabila bentuk konflik dengan kekerasan tersebut sudah terlanjur terjadi dalam masyarakat, maka langkah bijak terbaik yang dapat dilakukan adalah mengelola konflik secara baik (*manage of conflict*) dengan cara segera menyelesaikan persoalan konflik tersebut sampai ke akar persoalan secara substantif dan berkeadilan (*conflict resolution*), agar konflik tidak menimbulkan kerugian dan korban nonmateril berupa korban jiwa maupun korban materil berupa hilangnya harta benda dan rusaknya sarana prasarana publik dan hilangnya aset-aset berharga lainnya yang merugikan masyarakat (Tuwu, 2010).

Ada 3 hal krusial yang perlu mendapat perhatian agar konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak berakhir dengan kekerasan yaitu: Pertama, setiap kelompok sosial yang terlibat dalam peristiwa konflik harus menyadari (*conscious*) akan adanya situasi konflik di antara mereka. Kedua, pengendalian terhadap konflik-konflik yang terjadi tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisasi dengan jelas. Ketiga, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan main tertentu (*rule of law*) yang telah disepakati bersama.

# Bab 2

## Teori-Teori Konflik

### A. Pengantar

Ragam teori dalam sosiologi maupun ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya sangat banyak jumlahnya. Ambil contoh misalnya Bottomore (2006) menulis tentang teori elite dalam masyarakat; Suwarsono (2000) menulis tentang teori-teori pembangunan (teori modernisasi, teori dependensi, teori sistem dunia); (Sen, 2000; Yunus, 2007; Suyanto, 2013, Soejadi, 2001) menulis tentang kemiskinan dan teori-teori kemiskinan; (Lauer, 1990; Usman, 2015; Kasali, 2011) menulis tentang teori-teori perubahan sosial; Ritzer, dkk, (2009) menulis tentang teori sistem, teori struktural fungsional, teori interaksionisme simbolik, teori etnometodologi, teori pertukaran, teori jaringan, teori pilihan rasional, teori konstruksi sosial, teori-teori konflik, dll. Teori-teori tersebut masih dikelompokkan lagi ke dalam teori-teori besar (*grand theory*), teori-teori menengah (*middle range*), dan teori-teori mikro atau teori-teori dalam skala kecil (*micro theories*). Ritzer, dkk, (2007) mengelompokkan teori ke dalam 3 paradigma besar yaitu (1) Paradigma Fakta Sosial yang melahirkan Teori Fungsionalisme Struktural, Konflik, dan *General System*; (2) Paradigma Definisi Sosial yang melahirkan Teori Tindakan, Interaksionisme Simbolik, dan *Phenomenological*, dan (3) Paradigma Perilaku Sosial yang melahirkan Teori Sosiologi Perilaku dan Teori Pertukaran.

Untuk memahami secara utuh sebuah teori, kita mesti juga memahami bagaimana keterkaitan (*contextual*) teori, turunan teori (*break down theory*), dst. Mengingat banyaknya teori-teori yang ada dalam kajian Sosiologi dan luasnya kajian tentang teori, maka dalam paparan berikut ini hanya dibatasi pada teori-teori konflik saja. Itupun juga, ketika mengkaji pemikiran seorang teori konflik yang dibahas sebagian saja dan yang dibahas hanya pemikiran beberapa orang saja.

Sebelum membahas pemikiran para ahli teori-teori konflik, akan diketengahkan terlebih dahulu pengertian dari sebuah teori. Teori (*theory*) adalah serangkaian preposisi yang saling berhubungan, dapat dipergunakan untuk menjelaskan fenomena dan membuat prediksi tentang fenomena sosial tertentu. Kerlinger (1973) menyatakan bahwa teori adalah sebuah set konsep/konstruk yang berhubungan satu dengan lainnya, suatu set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena.

Dalam Oxford Dictionary dikatakan bahwa teori (*theory*) adalah seperangkat gagasan akal sehat (*set of reasoned ideas*) yang bermaksud untuk menjelaskan fakta atau peristiwa-peristiwa (*to explain facts or events*). Beberapa contoh teori misalnya: teori evolusi Charles Darwin, teori sistem sosial, teori konflik, dll.

Teori sangat penting dalam kehidupan manusia. Belajar teori sangat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, dan kalangan masyarakat. Jika demikian halnya, apa manfaat dari teori (*what's advantages of theories*)? Untuk apa belajar teori sosiologi? Pengkajian terhadap suatu teori bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pemahaman tentang suatu fakta, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat "*to gain knowledge about something, facts, or events*". Dengan adanya pengetahuan (*knowledge*) dan pemahaman (*vertehen*) terhadap suatu fenomena dan fakta tersebut dimungkinkan akan dibuat prediksi dan interpretasi



tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu dapat terjadi dalam masyarakat.

Teori adalah alat dari ilmu (*tool of science*). Di lain pihak, teori juga merupakan alat penolong teori. Sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai berikut:

- (1) Teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat abstraksinya;
- (2) Teori memberikan rencana (*scheme*) konseptual, dengan rencana mana fenomena-fenomena yang relevan disistematisasikan, diklasifikasikan, dan dihubung-hubungkan;
- (3) Teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi empiris dan sistem generalisasi.
- (4) Teori memberikan prediksi terhadap fakta;
- (5) Teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita.
- (6) Teori membantu manusia dalam memprediksi suatu fenomena atau kejadian (*events*) di masa mendatang (*social engineering*).
- (7) Teori membimbing dan memandu (*guide line*) seseorang peneliti dalam melakukan praktik.

Oleh karena itu, setelah mempelajari teori, kemampuan (*competence*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan di level Strata Satu atau para mahasiswa tingkat Sarjana (S1) adalah sebagai berikut: Pertama, mampu mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri sebuah teori. Kedua, mampu memetakan teori serta menempatkan sebuah teori pada konteksnya. Ketiga, memahami implikasi teori terhadap metodologi penelitian dan metode praktis. Keempat, mampu menerapkan teori.

Terakhir, kompetensi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap mahasiswa level

Strata Satu (S1) adalah di samping mereka bisa mengidentifikasi, memahami, dan memetakan teori, mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan dan mempraktekkan teori yang telah dipelajari dengan baik dan benar. Sebagai contoh: misalnya setelah mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang teori-teori konflik, kekerasan, dan perdamaian, maka pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis kasus-kasus konflik dan perdamaian yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mahasiswa level Pasca Sarjana Magister (S2) dan Doktorat (S3), level kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh setiap mahasiswa adalah di samping mereka dapat memetakan dan menerapkan teori, mereka juga diharapkan dapat memberikan kritik terhadap teori yang dikaji (Magister-S2). Adapun mahasiswa tingkat Doktorat, kompetensi yang diharapkan adalah di samping dapat mengidentifikasi, memetakan, menerapkan dan mengkritik teori, para mahasiswa level Doktorat juga diharapkan dapat menemukan konsep baru (*to find out a new concept*) atau dapat membangun sebuah teori (*to construct a new theory*).

Sebuah teori konflik adalah memfokuskan pada sifat yang tidak dapat dielakkan atau tidak dapat dihindarkan (*inevitability*) dari perubahan dan tekanan yang diproduksi melalui perubahan. *Conflict theory is focused on the inevitability of change and the tensions that are produced by change*. Berikut ini akan diuraikan pemikiran dari para teoritikus konflik mulai dari teori konflik kelas yang diwakili oleh Karl Marx dan Ralf Dahrendorf; kemudian teori konflik fungsional yang diwakili oleh Georg Simmel Lewis Coser; serta teori-teori konflik politik.

## **B. Teori Konflik Kelas**

Dalam peta teori Sosiologi, paling tidak ada dua tokoh yang mewakili teori konflik kelas. Tokoh utama teori konflik kelas adalah

Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Karl Marx mewakili konflik kelas dalam bidang ekonomi, yaitu pertentangan kelas (*class conflict*) antara kelas *borjuis* dan kelas *proletar*. Sedangkan Ralf Dahrendorf mewakili konflik kelas dalam bidang politik.

Menurut Karl Marx, pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial (*social classes*). Kelas, bagi Karl Marx, selalu didefinisikan berdasarkan potensinya terhadap konflik. Di dalam kapitalisme terdapat konflik kepentingan yang inheren antara orang yang memberi upah para buruh dengan para buruh yang kerja mereka diubah kembali menjadi nilai-surplus. Konflik inheren inilah yang membentuk kelas-kelas (Ollman, 1976 dalam Ritzer, et.al, 2009). Bagi Marx, sebuah kelas benar-benar eksis hanya ketika orang menyadari kalau dia sedang berkonflik dengan kelas-kelas yang lain. Tanpa kesadaran ini, mereka hanya akan membentuk apa yang disebut Marx dengan suatu kelas di dalam dirinya. Ketika mereka menyadari konflik, maka mereka menjadi suatu kelas yang sebenarnya, suatu kelas *untuk dirinya*.

### **1. Karl Marx**

Karl Marx (1818-1883) lahir di Jerman, ia adalah seorang revolusioner dan teoritis ilmu sosial. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menikah dan menjadi seorang jurnalis. Namun, karena tidak dapat mencari pekerjaan tetap, ia pergi ke Paris pada 1843. Di sana ia bergaul dengan imigran radikal, menjadi seorang sosialis dan bertemu Engels yang bersamanya membentuk persahabatan dan kolaborasi seumur hidup.

Karya Marx yang penting bagi Sosiologi adalah: *The German Ideology* bersama F. Engels (1845b), *The Poverty of Philosophy* (1847), *Manifesto of the Communist Party* (1848) bersama F. Engels, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1852), *Capital* (1867, 1885, 1894), dan dua manuskrip yang diterbitkan setelah kematiannya.

nya, the Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (1964) dan Grundrisse (1973).

Marx telah berpengaruh besar terhadap perkembangan sosiologi, baik sebagai sumber kritik maupun inspirasi. Dalam karya awalnya, Marx tertarik dengan konsep alienasi (*alienation*). Salah satu pengertian yang ia berikan kepada istilah tersebut adalah tentang tenaga kerja yang teralienasi di mana manusia harus bekerja karena dipaksakan kepadanya oleh orang lain. Tema ini terus mengisi semua karya-karyanya berikutnya. Alienasi terdiri dari empat unsur dasar yaitu: pertama, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari ‘aktivitas produktif’ mereka. Kaum pekerja tidak memproduksi objek-objek berdasarkan ide-ide mereka sendiri atau untuk secara langsung memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, melainkan untuk kapitalis, yang memberi mereka upah untuk menyambung hidup dengan imbalan bahwa mereka menggunakan para pekerja menurut cara-cara yang mereka inginkan. Kedua, pekerja tidak hanya teralienasi dari aktivitas-aktivitas produktif mereka, akan tetapi juga dari tujuan aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu ‘produk’. Ketiga, para pekerja di dalam kapitalisme ‘teralienasi dari sesama pekerja’. Terakhir, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari ‘potensi kemanusiaan mereka sendiri’. Kerja tidak lagi menjadi transformasi dan pemenuhan sifat dasar manusia, tetapi membuat manusia merasa kurang menjadi manusia dan kurang menjadi diri sendiri (Ritzer, dkk, 2009:55-57).

Dalam permulaan manifesto komunis disebutkan bahwa “sejarah semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas”. Marx berpendapat bahwa perjuangan kelas (*Class Struggle*), adalah motor sejarah. Kelas sosial yang dimaksudkan oleh Karl Marx adalah merupakan gejala khas masyarakat pasca-feodal, sedangkan dalam masyarakat feodal dan kuno lebih tepat

disebut “kasta”. Sebuah kelas baru dianggap kelas dalam arti sebenarnya apabila kelas tersebut bukan hanya “secara obyektif” merupakan golongan sosial dengan kepentingan sendiri, melainkan juga “secara subyektif” menyadari diri sebagai kelas dan mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik yang akan diperjuangkan.

Kelas, bagi Marx, selalu didefinisikan berdasarkan potensinya terhadap konflik. Individu-individu membentuk kelas sepanjang mereka berada di dalam suatu konflik biasa dengan individu-individu yang lain tentang nilai-surplus. Di dalam kapitalisme terdapat konflik kepentingan yang inheren antara orang yang memberi upah para buruh dengan para buruh yang kerja mereka diubah kembali menjadi nilai-surplus. Konflik inheren inilah yang membentuk kelas-kelas (Ollman, 1976).

Marx mengkritik masyarakat kapitalis dan membaginya menjadi dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, atau kelas atas dan kelas bawah. Dalam sistem produksi kapitalis, dua kelas tersebut saling berhadapan. Kelas atas adalah kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas bawah adalah kelas buruh (*proletar*). Kelas atas-*borjuis* menguasai bidang produksi dan kelas bawah *proletar* harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Keuntungan kelas atas ialah mereka tidak perlu bekerja sendiri, karena dapat hidup dari pekerjaan kelas bawah. Relasi antara kelas tersebut merupakan relasi yang eksploitatif. Kepentingan dua kelas tersebut secara obyektif berlawanan satu sama lain. Setiap kelas sosial bertindak menurut kepentingan yang ditentukan oleh situasi yang obyektif. Kelas *borjuis* berkepentingan untuk mengusahakan laba sebanyak mungkin bukan karena mereka secara pribadi rakus atau asosial, melainkan karena hanya dengan mencapai laba mereka dapat mempertahankan diri dalam persaingan di pasar. Begitu juga sebaliknya, kelas *proletar*, menurut definisi yang sempit, meliputi kenaikan upah, tetapi menurut

definisi yang luas, akan meliputi penguasaan terhadap proses produksi yang lebih luas (Affandi, 2004).

Marx melihat bahwa kontradiksi kapitalisme tidak hanya menyebabkan revolusi proletariat, tetapi juga krisis-krisis individual dan sosial yang menimpa masyarakat moderen. Dari sisi personal, muncul keterasingan (*alineaasi*) sebagai biang dari perasaan tidak berarti yang dirasakan oleh banyak orang di dalam kehidupannya. Pada level ekonomis, Marx memprediksikan suatu rangkaian ledakan dan depresi yang disebabkan oleh produksi yang berlebihan oleh kapitalis dan pemecatan para pekerja demi meningkatkan keuntungan mereka. Sedangkan pada level politis, Marx memprediksikan peningkatan ketidakmampuan suatu masyarakat sipil untuk mendiskusikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.

Menurut Affandi (2004) ada beberapa unsur dalam teori konflik kelas Marx yang perlu diperhatikan. Pertama, besarnya peran segi struktural dibandingkan segi kesadaran dan moralitas. Kedua, kepentingan kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas buruh (*proletar*) secara obyektif bertentangan dan mempunyai sikap berbeda terhadap perubahan sosial. Ketiga, setiap kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi. Berbeda dengan sistem demokrasi sosial yang melaksanakan cita-citanya melalui evolusi, persuasi dan tanpa kekerasan, maka ajaran Marxisme-Leninisme mencapai cita-citanya untuk melakukan perubahan sosial hanya dapat dicapai melalui revolusi (Budiarjo, 1984).

Negara menurut Marx secara hakiki dikuasai oleh kelas yang menguasai ekonomi. Perspektif negara kelas dapat menjelaskan mengapa yang biasanya menjadi korban pembangunan (*developmentalism*) adalah rakyat kecil (*proletar=poor people*). Negara dianggap merupakan negara kelas yang mendukung kepentingan kelas-kelas penindas, oleh karena itu menjadi lawan, bukan teman,

orang kecil. Negara memungkinkan kelas atas untuk memperjuangkan kepentingan khusus mereka “sebagai kepentingan umum”.

## 2. Ralf Dahrendorf

Selain Karl Marx, Ralf Dahrendorf juga berbicara tentang konflik kelas, namun penekanannya yang berbeda. Jika Marx menekankan pada konflik kelas ekonomi antara kelas *borjuis* dan kelas *proletar* dalam masyarakat kapitalis, maka Ralf Dahrendorf lebih menekankan pada konflik kepentingan (politik).

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu teoritikus konflik moderen yang sangat terkenal, terutama semenjak diterbitkan bukunya yang berjudul *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959) dan *Conflict After Class* (1967a). Teori konflik Ralf Dahrendorf menekankan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan (konflik) melekat dalam hubungan apa saja antara mereka yang menggunakan otoritas yang sah (*legal authority*) dan mereka yang tunduk padanya, atau yang tunduk pada pemegang otoritas.

Mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk padanya pasti memiliki kepentingan yang berbeda dan kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan kelas yang berkuasa antara lain mempertahankan legitimasi posisinya yang dominan, atau dengan kata lain mempertahankan *status quo*, paling kurang sejauh ada hubungannya dengan struktur otoritas itu. Sementara itu, di pihak lain, kepentingan kelas bawah adalah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada.

Menurut Ritzer, dkk (2007) bahwa otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan inipun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Oleh

karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling bertentangan”.

Kepentingan kelas obyektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu, disebut Dahrendorf dengan “kepentingan laten” (*latent interests*). Sebaliknya, kepentingan kelas yang disadari individu terutama kepentingan itu dengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut Dahrendorf dengan “kepentingan manifest” (*manifest interests*). Asumsi-asumsi dasar teori model konflik Ralf Dahrendorf adalah:

1. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana.
2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik sosial ada di mana-mana.
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Teori konflik umumnya mengarahkan perhatiannya pada kepentingan-kepentingan kelompok dan orang yang saling bertentangan dalam struktur sosial dan pada cara di mana konflik kepentingan ini menghasilkan perubahan sosial yang terus menerus (Johnson, 1990). Ralf Dahrendorf (1959) menyimpulkan bahwa konflik bersifat berpotongan dan bukan bertindihan. Tidak seperti Marx, Dahrendorf mengklaim bahwa pusat konflik dalam semua institusi sosial berkenaan dengan distribusi kekuasaan dan wewenang alih-alih modal; dan adalah hubungan antara dominasi dan subordinasi yang mem-



bentuk kepentingan yang berlawanan. Ia berpendapat bahwa keberhasilan konflik industrial (*industrial conflict*) daalm ekonomi sehingga tidak melebar ke institusi lain, adalah penting dalam konteks ini (Abercrombie, et.al, 2010).

### **C. Teori Konflik Fungsional**

Menurut Affandi (2004) tokoh konflik fungsional adalah Georg Simmel dan Lewis Coser.

#### **1. Georg Simmel**

Dalam bukunya yang berjudul "*Conflict & The Web of Group-Affiliations (1955)*" George Simmel berusaha untuk mengembangkan teori-teori yang dilandaskan pada bentuk-bentuk dasar proses sosial yang dikenal dengan pendekatan *sosiologi-formal*. Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak dipisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisa. Konflik dapat menjadi penyebab atau pengubah kepentingan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, kesatuan-kesatuan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, faktor-faktor disosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan sebagainya memang merupakan penyebab terjadinya konflik. Dengan demikian, konflik ada untuk mengatasi berbagai dualisme yang berbeda, walaupun dengan cara meniadakan salah satu pihak yang bersaing.

Konflik berfungsi mengatasi ketegangan antara hal-hal yang bertentangan dan mencapai kedamaian. Dalam konflik, ciri positif dan negatif terintegrasi, ciri-ciri itu dapat dipisahkan secara konseptual, namun tidak secara empiris.

Simmel mengatakan, apabila seseorang menjadi lawan rekannya maka hal itu tidak harus merupakan faktor sosial yang

negatif murni, walaupun mungkin akibatnya tidak menyenangkan bagi pihak lain. Kadang-kadang manusia memang harus berinteraksi dengan orang-orang lain yang mempunyai sifat-sifat yang kurang menyenangkan. Oposisi berarti tidak hanya merupakan sarana untuk mempertahankan hubungan, akan tetapi juga merupakan salah satu fungsi kongkret hubungan tersebut.

Motivasi-motivasi untuk mengakhiri konflik menurut Simmel bisa karena lelah atau bosan, atau lagi karena adanya keinginan untuk mencurahkan tenaganya untuk hal-hal lain. Untuk mengatasi dan mengakhiri konflik, menurut Georg Simmel dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya:

- Menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik,
- Kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain,
- Kompromi,
- Perdamaian, dan ketidakmungkinan untuk berdamai.

## **2. Lewis Coser**

Selain Georg Simmel, Lewis Coser juga berbicara tentang konflik fungsional. Dalam bukunya yang berjudul "*The Functions Social Conflict* (1956). Coser mengatakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena konflik; mulai dari pertikaian antarpribadi melalui konflik kelas sampai peperangan internasional.

Coser mengatakan, bahwa para ahli Sosiologi sering kali mengabaikan konflik sosial dan cenderung menekankan pada sisi yang negatif. Coser ingin memperbaikinya dengan cara menekankan pada sisi konflik yang positif, yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi dan sistem sosial. Definisi ini memfokuskan pada adanya per-

tentangan memperoleh sumber yang langka, yakni di mana setiap orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain. Coser menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional dan bersifat disfungsional bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan.

Lebih lanjut Coser menyatakan bahwa konflik tidak hanya merusakkan, atau bersifat disfungsional untuk sistem di mana konflik itu terjadi, melainkan juga bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem itu (Ritzer, dkk., 2007). Untuk itu, konflik mempunyai dua wajah yaitu pertama, konflik dapat memberikan kontribusi terhadap integrasi 'sistem' sosial. Kedua, konflik dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Akan tetapi menurut Darmin Tuwu (2010) bahwa apa yang dikatakan oleh Lewis Coser dalam karyanya yang berjudul "*The Functions Social Conflict*" bahwa suatu konflik dapat memiliki fungsi positif yaitu untuk integrasi, kohesifitas dan perubahan sosial, hal itu sifatnya temporer dan manfaatnya sangat kecil dirasakan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik konflik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, fungsi konflik yang bersifat positif tidak pernah nampak. Yang kelihatan dalam peristiwa konflik malahan hanyalah dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa oleh karena fungsi konflik yang bersifat positif (konflik fungsional) sangat kecil manfaatnya, maka ia tidak pernah tampak dan cenderung dibenamkan oleh kerugian konflik dan/atau akibat negatif dari konflik. Di antara kerugian konflik yang sulit dilupakan oleh masyarakat utamanya bagi mereka yang menjadi korban konflik dan kekerasan adalah rusaknya fasilitas umum, hancurnya sarana dan prasarana publik, rusak atau

hilangnya rumah tempat tinggal, hilangnya aset berharga dan harta benda berharga lainnya, kerugian materil, dan kerugian non-materil seperti penderitaan mental dan psikologis, terjadinya luka-luka pada tubuh, hilangnya salah satu anggota tubuh yang mengakibatkan terjadinya kecacatan (cacat fisik), dan bahkan sampai hilangnya nyawa manusia (korban jiwa).

#### **D. Teori Konflik Politik**

Konflik merupakan salah satu konsep dasar ilmu politik. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari interaksi sosial dengan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan, hasrat maupun tujuan hidupnya. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, manusia memiliki hawa nafsu dan emosi, sehingga dalam berinteraksi sosial sering kali melahirkan pertentangan dalam masyarakat, baik pertentangan antar individu maupun pertentangan antar kelompok atau golongan. Konflik tidak hanya diungkapkan secara verbal tetapi juga dapat diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan ketidak senangan atau pertentangan. Konflik tidak selalu ditunjukkan dengan adanya perilaku saling baku hantam (adu jotos) antara dua pihak atau lebih, tetapi juga dapat diidentifikasi sebagai “perang dingin” yang diekspresikan melalui kata-kata yang mengandung amarah. Dalam sebuah peristiwa konflik politik mengarah pada konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktural-fungsional (konsensus) dan pendekatan struktural-konflik. Pendekatan konsensus berasumsi bahwa masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Kecuali itu, masya-

rakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan (*equilibrium*) dan harmonis (*harmony*).

Lalu pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kecuali itu, masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan (*coersive*) dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Kedua pendekatan ini mengandung kebenaran tetapi tidak lengkap.

Konflik terjadi antarkelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan (konsensus). Selain itu, masyarakat tidak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi, konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang tak terelakkan dalam masyarakat.

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan" seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan.

Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (*riot*), kudeta, pemberontakan, dan seperatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan.

Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Adapun contoh konflik yang tak berwujud kekerasan yakni unjuk-rasa (demonstrasi), pemogokan dengan segala bentuknya, pembangkangan sipil (*civil disobedience*), pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah, dan polemik melalui surat kabar).

Sementara itu, konflik tidak selalu bersifat negatif seperti diduga banyak orang. Apabila ditelaah secara seksama, konflik mempunyai fungsi positif, yakni sebagai pengintegrasikan masyarakat dan sebagai sumber perubahan.<sup>2</sup>

Pengajuan buah pikiran, pendapat, dan tuntutan kebijakan yang berlainan ataupun yang bertentangan merupakan mekanisme guna menghasilkan pemikiran baru yang lebih mendekati kebenaran atau kebijakan yang lebih baik. Semua kreativitas, inovasi, dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakat muncul dari konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan individu, serta antara emosi dengan emosi dalam diri individu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Ralf Dahrendorf (1969). "*Conflict Groups, Group Conflicts, and social Change*," dalam Ritzer, dkk. 2009.

<sup>3</sup> Lewis Coser, 1956. *The Function of Social Conflict*, dalam Surbakti, (2007).

Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara. Namun, seperti telah diuraikan di atas bahwa tidak semua konflik beraspek politik atau berimplikasi politik sehingga mekanisme pengaturannya tidak selalu melalui proses politik. Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang sering kali dapat diselesaikan dengan kedua orang tersebut, atau dengan pihak ketiga yang dihormati kedua pihak tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah.

Apabila pertentangan itu sukar diselesaikan dengan pihak-pihak yang berkonflik atau dengan kalangan masyarakat, maka permasalahan tersebut dapat dibawa ke lembaga peradilan (lembaga pemerintahan). Demikian juga perselisihan antara buruh dan majikan, pada hakekatnya bukan urusan lembaga politik karena kedua pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme yang disepakati tanpa melibatkan pihak pemerintah. Akan tetapi, apabila mereka tidak mampu mencapai kesepakatan maka pemerintah turun-tangan sebagai *mediator* maupun sebagai *arbitrator*. Kedua contoh ini pada mulanya bukan konflik politik, tetapi berkembang menjadi konflik politik karena pihak yang berkonflik meminta pemerintah membuat keputusan yang adil atau pemerintah menganggap konflik itu, kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat, dapat mengganggu kepentingan umum.

Namun demikian, ada sejumlah konflik yang dari sifatnya beraspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini, yakni konflik antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah; atau kegiatan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah; maupun sejumlah tokoh

militer yang didukung dengan sejumlah golongan untuk melakukan kudeta atas pemerintah yang berkuasa.

Berkaitan dengan hal yang pertama dapat dikemukakan contoh berikut. Para petani padi melalui organisasi yang dibentuk menuntut kepada pemerintah agar harga gabah dinaikkan dan harga sarana produksi pertanian dikendalikan sehingga pendapatan mereka meningkat. Sementara itu, para pegawai negeri dan masyarakat perkotaan menuntut agar harga beras dikendalikan karena penghasilan mereka terbatas. Dalam menghadapi tuntutan yang bertentangan itu, pemerintah harus membuat keputusan yang adil.

Jadi, konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik.

Peristiwa konflik kerap kali muncul dalam masyarakat yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang maupun yang seimbang. Faktor-faktor yang memengaruhi konflik dapat berbentuk ideologi politik (*political ideology*), ekonomi (*economic*), budaya (*culture*) dan agama dan kepercayaan (*religion and faith*). Masyarakat yang secara sosiologis dihuni oleh penduduk yang berbeda agama dan kepercayaan, suku (etnik), maka perbedaan itu potensial memicu terjadinya konflik dan kekerasan. Dalam berbagai kasus peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat, terjadinya konflik dan



kekerasan sering kali disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*unjustice*), kesenjangan sosial (*social discrepancy*), diskriminasi sosial (*social discrimination*), dan kemiskinan (*poverty*).

### **1. Penyebab Konflik Politik**

Konflik yang terjadi akibat menajamnya perbedaan (*difference*) dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi.

Simon Fisher, dkk (2000) mengatakan bahwa penyebab konflik dalam masyarakat adalah sebagai berikut: Pertama, hubungan masyarakat yang kurang harmonis dan tidak setara, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Kedua, disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak setara serta perbedaan pandangan politik di antara warga masyarakat. Ketiga, terkait kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan sumber daya (*basic needs*), seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Keempat, masalah identitas, bahwa konflik lebih disebabkan oleh identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima,

terkait dengan masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Menurut Paul Conn dalam Surbakti (2007) bahwa pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik itu mencakup kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dosen, guru, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada sesuatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama (*common values*), konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Kemajemukan horisontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Kelompok masyarakat misalnya, menghendaki harga beras dan bahan bakar minyak dikendalikan oleh pemerintah, dan kalau perlu disubsidi oleh pemerintah, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa agar pemerintah membiarkan harga-harga beras dan bahan bakar minyak berkembang sesuai dengan mekanisme pasar. Sebaliknya, pemerintah hanya berperan dalam menciptakan dan menegakkan aturan main yang adil.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan karena kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik politik. Hal ini disebabkan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini baru menimbulkan konflik, apabila kelompok tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, merasa dirugikan, atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan kemajemukan horisontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik tetapi perbedaan kepentingan (*difference of interests*) itu bukan kondisi yang memadai (*sufficient condition*) untuk menimbulkan konflik.

## **2. Tipe-Tipe Konflik Politik**

Menurut Paul Conn (Surbakti, 2007) bahwa konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif adalah konflik yang

tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi.

Kategorisasi ini mengandung kelemahan. Apabila mayoritas masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak mencerminkan kepentingan umum maka konflik yang disalurkan melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik yang negatif. Sebaliknya, tindakan yang menentang sistem yang tidak mencerminkan kepentingan umum dipandang sebagai konflik yang positif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif sangat tergantung pada persepsi orang atau persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat umum terhadap sistem politik yang berlaku. Dalam hal ini, yang menjadi patokan untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif, yakni tingkat legitimasi sistem politik yang ada. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat umum terhadap sistem politik yang berlaku.

### **3. Struktur Konflik Politik**

Menurut Paul Conn (Surbakti, 2007) bahwa situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*).

Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri dari struktur konflik ini yakni tidak mungkin mengadakan kerjasama (*cooperation*), hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja (pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan semuanya) dan yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipil, seperti harga diri (*self-esteem*), iman-kepercayaan (*religion-faith*), masalah hidup atau mati, dan jabatan penting pemerintahan. Konflik antara penganut iman dan kepercayaan tertentu dengan partai atau kelompok yang menganut ideologi komunis merupakan konflik menang-kalah. Hal ini disebabkan keduanya tidak mungkin mengadakan kompromi dan bekerja sama secara utuh. Sementara itu, pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden dan anggota konggres secara langsung di Amerika Serikat yang menggunakan formula pluralitas dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang merupakan salah satu contoh tentang konflik menang-kalah.

Konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*) ialah suatu situasi konflik dalam mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan menyangkut hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting. Namun, justru hal itu dianggap penting maka diadakan dialog, kompromi, dan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Ciri struktur konflik ini, yakni kompromi dan kerjasama (*cooperation*), hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua belah pihak tetapi tidak secara maksimal. Konflik yang terjadi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara antara pemerintah dan fraksi-fraksi, atau di antara fraksi-fraksi di badan-badan perwakilan rakyat biasanya di-

selesaikan secara kompromi. Akibatnya semua pihak berhasil memperjuangkan usulannya, walaupun tidak secara maksimal.

Lalu pertanyaannya, apakah suatu kelompok atau individu akan menggunakan konflik menang-kalah atau konflik menang-menang dalam usaha mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada sifat yang dipertaruhkan berupa sumber yang hendak didapatkan dan/atau dipertahankan seperti yang dijelaskan di atas.

# Bab 3

## Formasi Konflik Johan Galtung

### A. Pengantar

Teori konflik merupakan salah satu bagian besar dari empat bagian buku berjudul “Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik, Pembangunan dan peradaban” yang ditulis oleh Johan Galtung. Tiga bagian buku lainnya yaitu teori perdamaian, teori pembangunan, dan teori peradaban.

Johan Galtung (2003) mendefinisikan konflik sebagai benturan fisik dan verbal antar dua orang/kelompok atau lebih di mana akan muncul penghancuran (*destructive*) sebagai akibat dari konflik tersebut. Menurut Galtung (2003) konflik lebih dari sekedar apa yang dilihat mata telanjang sebagai “gangguan”, kekerasan langsung. Ada juga kekerasan yang memperdaya struktur, dan kebudayaan yang melegitimasi kekerasan. Untuk mentransformasi suatu konflik antara beberapa partai, diperlukan lebih dari sebuah arsitektur baru bagi hubungan mereka. Partai-partai harus ditransformasi sehingga reproduksi konflik tidak terjadi secara terus menerus. Ada aspek-aspek intra-partai dalam sebagian besar konflik antar-partai.

Mari kita merujuk pada sistem pencapaian-tujuan sebagai *formasi*. Suatu formasi dapat *harmonis* atau *simbiotik* (sama-sama meningkatkan kehidupan) sampai pada tingkat bahwa mencapai satu keadaan-tujuan berkorelasi dengan mencapai keadaan tujuan lainnya. *Sukha* satu orang menyatu dengan *sukha* orang lain. Tetapi jika *sukha*

seseorang menyatu dengan *dukkha* (penderitaan) orang lain, kita tentu saja sedang berbicara tentang formasi *disharmoni* atau *anti-biotik*, meningkatkan kehidupan satu orang dengan menghancurkan kehidupan orang lain. Formasi tersebut telah menjadi formasi konflik.

Formasi kehidupan-riil apapun memiliki aspek harmoni dan disharmoni. Kita akan menemukan konflik dan kerja sama. Darwin dan Kropotkin, saling berdampingan. Dalam formasi konflik, aspek disharmoni dari formasi adalah dominan. Tetapi bagaimanapun itu tidak boleh membuat kita buta terhadap aspek kooperatif dan harmonis yang mungkin menjadi basis bagi terbangunnya formasi konflik (Johan Galtung, 2003, 177).

## **B. Konflik sebagai Pencipta dan Konflik sebagai Penghancur**

Dalam studi konflik, sebuah peristiwa konflik berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan proses perdamaian. Teori konflik sangat diperlukan untuk studi pembangunan dan studi perdamaian. Membangun berarti menciptakan. Hal yang sama berlaku untuk perdamaian, tetapi perdamaian juga memberikan penekanan pada penguangan kekerasan dan transformasi konflik non-kekerasan (*non-violence*).

Di dalam setiap konflik terdapat kontradiksi, sesuatu yang menghalangi sesuatu yang lain. Dengan kata lain, terdapat suatu masalah. Tetapi di suatu tempat yang bahaya (*danger*) juga mengancam, khususnya jika masalahnya sangat resisten terhadap solusi. "Sesuatu yang menghalangi sesuatu yang lain". Saya sangat menginginkan sesuatu, tetapi begitu juga orang lain. Saya sangat menginginkan sesuatu, tapi saya juga menginginkan sesuatu yang lain. Situasi klasik ini disebut sebagai formasi *konflik elementer* atau *atom-atom konflik*.



Dasar formasi konflik atau unsur-unsur konflik menurut Johan Galtung (2003) adalah sebagai berikut:

Sengketa: *Dua orang, atau aktor, mengejar tujuan yang sama.*

Dilema: *Satu orang, atau aktor, mengejar dua tujuan yang berbeda.*

Sengketa, atau perselisihan (*disputes*) dapat dengan mudah mengarah pada upaya-upaya untuk merugikan pihak lain atau melukai/mencederai aktor yang menghalangi jalannya untuk mencapai tujuan, dengan kata lain penghancuran/merusak orang lain. Sementara pilihan atau dilema menunjuk pada upaya-upaya untuk menghilangkan/menghancurkan sesuatu di dalam dirinya sendiri (*self-destruction*), dengan kata lain penghancuran diri, contohnya: frustrasi. Keduanya sering dialami oleh seseorang dalam kehidupan. Di lain pihak konflik membangkitkan energi. Masalahnya adalah bagaimana menyalurkan dan menggunakan energi tersebut secara konstruktif dan bukan menggunakan energi konflik untuk menghancurkan (*destruction*).

Hal tersebut mengingatkan kita pada definisi karakter-ganda Cina klasik tentang "krisis", yaitu sebuah konsep yang dekat pada 'konflik' sebagai "*danger*" + "*opportunity*". *Danger* atau bahaya dekat pada 'kekerasan' sedangkan '*opportunity*' atau kesempatan dekat pada 'tantangan' akar dari penciptaan. Di sini kita melihat kebijaksanaan Cina kuno, yang sangat berbeda dari ketakutan dalam hubungan dengan konflik.

Tesis dasar yang mendasari pendekatan terhadap konflik yang digunakan di sini ialah bahwa tidak ada alternatif yang layak bagi transformasi konflik kreatif. Pertanyaannya kemudian menjadi bagaimana untuk melakukannya?

Menurut Johan Galtung, pembangunan (*development*) merupakan 'upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia' baik kebutuhan secara individual maupun secara kelompok, dengan cara-cara

yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Galtung, dalam Trijono, 2007). Menurut Galtung, setiap kegiatan membangun dalam proses pembangunan sejatinya dapat membawa kesejahteraan bagi semua manusia (*welfare for all human being*) karena membangun itu sendiri dapat berarti “menciptakan” yaitu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada, guna memenuhi kebutuhan dasar manusia (*basic needs*), baik secara individual maupun secara kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik kerusakan dalam kehidupan sosial maupun kerusakan pada lingkungan alam.

Demikian pula halnya dengan masalah perdamaian (*peace*) dan perdamaian yang sesungguhnya (*true of peace*). Perdamaian sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan karena tanpa perdamaian pembangunan tidak bisa dijalankan. Dengan kata lain, perdamaian merupakan salah satu syarat untuk melakukan pembangunan, yaitu perdamaian yang ditekankan pada pengurangan kekerasan dan perubahan konflik non kekerasan.

Perdamaian (*peace*) di sini tidak harus diartikan secara sempit sebagai resolusi konflik, sebagaimana difahami oleh banyak orang selama ini. Tetapi, lebih dari itu, perdamaian merupakan segala prakarsa dan upaya kreatif manusia, termasuk kreativitas dalam praktik dan kebijakan pembangunan, untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, struktural maupun personal, di dalam masyarakat. Pembangunan sebagai perdamaian menjadikan ketersediaan dan keterpenuhinya keempat kebutuhan dasar manusia sebagai prasyarat penting terwujudnya perdamaian di masyarakat. Keempat kebutuhan dasar manusia menurut Johan Galtung (2003) yaitu:

1. Kebutuhan kesejahteraan,
2. Kebutuhan kebebasan,

3. Kebutuhan keamanan, dan
4. Kebutuhan identitas budaya.

Keempat kebutuhan tersebut bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sekaligus sebagai hak-hak asasi manusia dalam hidup yang harus dipenuhi, baik oleh negara, masyarakat, maupun individual (Galtung, 2003). Karena itu, kelangkaan dan tidak terpenuhinya empat kebutuhan dasar tersebut akan menyebabkan manusia terjebak dalam empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan kemiskinan, kekerasan represi, kekerasan kerusakan, dan kekerasan alienasi budaya (Trijono, 2007).

### **C. Dialektika Manifes-Laten dan Segitiga Konflik Galtung**

Kehidupan setiap manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia ataupun dengan kelompok sosial lain dalam masyarakat, cenderung berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan konflik, perilaku yang diperagakan tersebut secara umum dibagi dua macam yaitu *pertama*, perilaku merusak (*desctructive behavior*) dan *kedua*, perilaku konstruktif (*constructive behavior*).

Perilaku merusak (*desctructive behavior*), dapat diamati secara jelas (*manifest*) dalam semua level interaksi sosial, terutama nampak sebagai "kekerasan fisik" atau tindakan verbal (misalnya bertengkar), atau memperagakan sikap tubuh bermusuhan, lalu dapat disimpulkan sebagai konflik terbuka. Namun di sisi lain konflik atau permasalahan juga terletak pada perilaku konstruktif (*constructive behavior*) yaitu dengan melakukan dialog secara ke dalam dan keluar (dialog terbuka) dengan pihak-pihak lain menyangkut permasalahan yang dihadapi. Nasikun (2007) menyebut hal ini sebagai "konsiliasi". Perilaku kostruktif dan perilaku destruktif, dapat terjadi pada waktu dan tempat

yang sama pada semua orang, sehingga mereka tidak dapat didamaikan. Contoh perilaku yang konstruktif seperti kondisi yang "bahagia", dan contoh perilaku destruktif seperti kondisi yang "kurang bahagia".

Sementara kontradiksi meliputi sesuatu keinginan, suatu tujuan, dan hal itu mencerminkan keadaan hasil yang dicapai. Johan Galtung merumuskannya sebagai berikut:

*Contradiction*: keadaan-tujuan yang tidak cocok dalam suatu sistem pencapaian-tujuan

*Conflict* : Sikap/asumsi + perilaku + pertentangan/isi

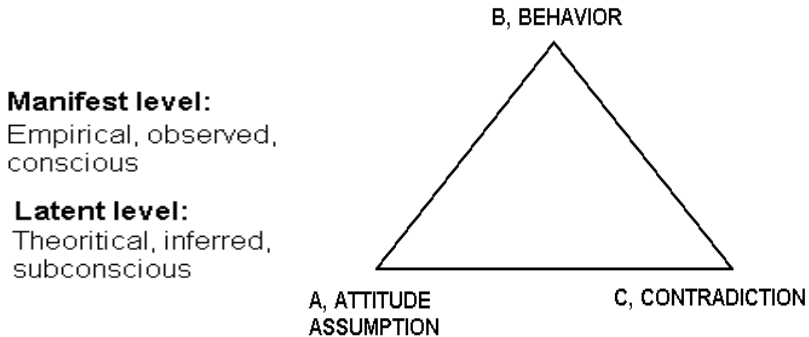
*Conflict* = Attitude + Behavior + Contradiction

Menurut Galtung (1996) bahwa konflik dapat dibangun dari 3 (tiga) unsur yaitu *pertama*, sikap atau asumsi ( $A=attitude, assumption$ ); *kedua*, perilaku ( $B=behavior$ ); dan *ketiga*, pertentangan atau kontradiksi ( $C=contradiction$ ). Sistem, sebagai pencarian tujuan kebahagiaan manusia (*happiness*) atau (*sukha*) dan penderitaan manusia (*suffering*) atau (*dukkha*). Kita semua baik individu maupun kelompok manusia termasuk dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dengan individu/kelompok lain, di mana dalam interaksi kerap menghasilkan hubungan yang bersifat konfliktual, sehingga meniadakan konflik dari kehidupan adalah tidak mudah atau bahkan tidak mungkin, sebab selalu terdapat kontradiksi antara kehidupan kreatif (*creative life*) dengan kehidupan yang merusak (*destructive life*). Manifest level dapat diidentifikasi pada perilaku sedangkan aspek laten dapat diamati pada sikap dan kontradiksi.

Konflik yang terjadi pada tingkat nyata (*manifest level*) bersifat empiris (*empirical*), dapat diamati (*observed*) pada perilaku (*behavior*) manusia selaku aktor, sedangkan konflik yang terjadi pada tingkat laten (*latent level*), dapat dilihat pada sikap (*attitude or assumption*) dan pertentangan (*contradiction*). Ketiganya membentuk

segitiga konflik (*the conflict triangle*) seperti terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Segitiga Konflik Johan Galtung



Segitiga konflik Johan Galtung ini dapat digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi arah terjadinya konflik, kita dapat memulai dari mana saja (tergantung kebutuhan), namun semuanya saling berhubungan satu sama lain. Misalnya: suatu pertentangan (*contradiction*) mungkin dialami ketika seseorang mengalami suasana hati yang tidak menentu (frustrasi), di mana tujuan diblok atau dihalangi oleh sesuatu sehingga tujuan tersebut tidak tercapai. Hal lain misalnya sikap agresivitas akan melahirkan perilaku yang agresif pula. Menurut Galtung, suatu persoalan dasar dapat dimulai dari sikap dan perilaku, akumulasi sifat-sifat negatif menyebabkan agresifitas, atau kecenderungan perilaku negatif.

Agresi bukanlah perilaku tanpa sebab. Agresi muncul karena banyak faktor yang terkondisikan sedemikian rupa. Salah satu faktor yang sangat penting menjadi pemicu agresi adalah marah (*anger*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Nasikun (2007) menyatakan bahwa setidaknya ada dua macam tingkatan konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat, yaitu: pertama, konflik di dalam tingkatannya yang bersifat ideologis, dan kedua, konflik di dalam tingkatannya

yang bersifat politis. Pada tingkatannya yang bersifat *ideologis*, konflik tersebut terwujud dan bentuk konflik antara sistem-nilai yang dianut serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Pada tingkatannya yang bersifat *politis*, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, maka sadar atau tidak, setiap pihak yang bereselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan (*well-being*) dan pertahanan bersama: mendirikan sekolah-sekolah untuk memperkuat identitas kultural, bersaing dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

#### **D. Konflik Aktor dan Konflik Struktur**

Setiap peristiwa konflik mempunyai keterkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik-konflik aktor.

*Actor conflict* : Attitude and Contradiction both Conscious

*Structural conflict* : Attitude and Contradiction both Subconscious

Berdasarkan formasi konflik aktor dan struktur Galtung (1996) tersebut, bahwa seorang konflik aktor (*subject*) adalah biasanya menyadari apa keinginan (*cognition*), kemauan (*volition*), dan untuk alasan apa serta bagaimana relasi antara kemauan-kemauan tadi (*feels*) terjadi. Jika perasaan baik, kemauan dan keinginan terpenuhi, maka keadaannya "baik", tetapi sebaliknya jika keadaan tidak baik, maka artinya ada masalah (*terrible*). Konflik aktor adalah orang-orang, kelompok orang, organisasi, lembaga bahkan negara yang berada di belakang konflik yang terjadi, yang keberadaannya berpengaruh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tinjauan psikoanalitis dari Sigmund Freud, cenderung melihat konflik dari pertentangan (*contradiction*) antara *id* dan *super-ego*. Sedangkan Marxian menunjuk pada *intra social contradictions* (antara modal dan pekerja, atau antara tujuan (*means*) dengan cara produksi (*modes of production*). *Id* meliputi kebutuhan dan dorongan alamiah yang diperoleh individu di luar sosialisasi, tetapi *ego* dan *superego* masing-masing mewakili tuntutan realitas dan yang membenarkan kode-kode moral yang muncul dalam kehidupan sosial dan menjamin keberlangsungannya. Jadi kebutuhan dan dorongan alamiah dari individu itu ditekan dan energi utama yang digunakan dengan cara ini dalam memenuhi kebutuhan yang spontan ini disalurkan dalam bentuk-bentuk perilaku yang memenuhi persyaratan kehidupan sosial yang di-organisasi. Freud sendiri tidak membatasi model ini pada tipe sistem sosial kapitalis, tetapi untuk menjelaskan dinamika berbagai bentuk dominasi yang ada dalam tipe masyarakat secara psikologis (Johnson, 1990).

Bagi Freud, konsep represi ini mencerminkan ketegangan yang tidak dapat dielakkan dan konflik antara insting serta dorongan alamiah individu dan persyaratan kehidupan sosial organisasi, khususnya dalam suatu peradaban yang kompleks. Konflik individu dan masyarakat menjadi konflik internal psikologis, yang dikonseptualisasikan dengan *id*, *ego* dan *super-ego*.

Pandangan Freud tentang *ego* bersifat materialistis, yakni *ego* yang terikat pada masyarakat. Hasilnya adalah *ego* yang "historis", *ego* yang tidak berkhayal dirinya sudah bebas tetapi *ego* yang berkonflik dengan dirinya sendiri karena merasa menjadi bagian dari masyarakat yang masih berada dalam kontradiksi. Konflik itu akan selesai jika kontradiksi dalam masyarakat sudah hilang. Pada saat ia merasakan masyarakat sebagai dunianya yang sejati. Dengan memaknai totalitas sebagai kerangka berpikir serta pandangan tentang *ego*

yang berkonflik dengan dirinya sampai kontradiksi dalam masyarakat diselesaikan itulah maka teori baru benar-benar bisa menjadi emansipatoris (Sindhunata, 1982).

Sedangkan Marxian melihat persoalan konflik ini dengan menunjuk pada *intra social contradictions* yaitu konflik antara modal dan pekerja, atau antara tujuan (*means*) dan cara produksi (*modes of production*). Karl Marx adalah seorang determinis ekonomi, yang menganggap bahwa sistem ekonomilah (infra struktur) yang terpenting dan menentukan semua sektor kehidupan masyarakat lainnya, seperti: politik, pendidikan, agama, seni, keluarga, dan sebagainya (super struktur), setidaknya dalam masyarakat kapitalis. Dasar ekonomi ini dilihat Marx sebagai "infrastruktur" di atas mana "superstruktur" sosial dan budaya yang lainnya dibangun dan harus menyesuaikan diri dengannya.

Individu terpaksa mengubah lingkungan materialnya melalui kegiatan produktif untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Tetapi alat-alat produksi tidak tersebar secara merata di kalangan anggota masyarakat. Ini berarti bahwa mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi harus menjalin hubungan sosial dengan mereka yang memiliki. Hasilnya berupa suatu perbedaan (diferensiasi) anggota-anggota masyarakat dalam kelas-kelas sosial ekonomi. Totalitas hubungan-hubungan produksi dengan alat-alat atau cara produksi (*mode of production*) yang bersangkutan, membentuk struktur ekonomi masyarakat (Johnson, 1988).

Hubungan antara majikan kapitalis dan buruh sangat bersifat ekonomis, sama sekali terlepas dari pengaruh ikatan sosial non-ekonomi yang bersifat manusiawi dan lunak. Akibatnya, pekerja menjadi suatu komoditas (*comodity*) dalam pasaran tenaga kerja yang tugasnya ditentukan oleh keinginan majikan kapitalis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan oleh tuntutan-tuntutan



mesin produksi. Buruh melayani majikan kapitalis. Semakin produktif kaum buruh dalam memproduksi komoditi, semakin mereka merasa diri menjadi miskin dan semakin mereka tidak mampu mengontrol kegiatan hidup mereka sendiri (Johnson, 1988).

Senada dengan pendapat Galtung, Mitchell dalam Rozi, dkk. (2006) membedah konflik dalam tiga komponen yang saling terkait yaitu: pertama, situasi konflik, yang didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana dua orang atau lebih entitas sosial beranggapan bahwa mereka memiliki suatu tujuan yang bertentangan satu sama lain; kedua, perilaku konflik, yang diartikan sebagai tindakan entitas sosial dalam suatu konflik yang ditujukan kepada pihak lawan dengan tujuan agar pihak lawan bersedia memodifikasi tujuan mereka; dan ketiga, sikap atau persepsi konflik, yaitu atribut-atribut psikologis yang sering muncul saat suatu entitas sosial berada dalam situasi konflik. Penjabaran tiga komponen ini kemudian mampu menggambarkan proses perkembangan konflik dari *incipient* konflik hingga *manifest* konflik.

Adapun, Lambang Trijono memetakan konflik di kawasan Indonesia Timur, khususnya yang terjadi pada tiga daerah provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Poso Sulawesi Tengah. Menurut Trijono bahwa terdapat tiga faktor utama terjadinya konflik yaitu: pertama, sumber atau akar konflik, yaitu praktek kebijakan pembangunan di masa lalu, di era Orde Baru, yang telah menimbulkan kesenjangan, ketegangan struktural, dan potensi konflik terpendam dalam masyarakat; kedua, pendorong konflik, yaitu krisis ekonomi dan krisis pemerintahan disertai jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang mendorong konflik terpendam mencuat ke permukaan menjadi konflik kekerasan terbuka; dan ketiga, faktor pemicu konflik, yaitu kejadian-kejadian konflik di masyarakat, yang seringkali ditandai oleh pertikaian antar kelompok pemuda dalam memperebutkan sumber-

daya ekonomi terbatas dalam situasi krisis ekonomi lingkungan kehidupan mereka (Trijono, 2007:91-92).

Selanjutnya, ada dua perspektif dalam melihat konflik, yaitu: a) Pandangan tradisional tentang konflik; b) Pandangan modern tentang konflik atau *the interactionist view*. Perspektif pertama, menyatakan bahwa konflik berasal dari faktor-faktor dari luar yang dapat dihindarkan (*kontigensi*). Menurut perspektif ini, konflik tidak perlu karena dapat merusak, sehingga konflik dapat dihindarkan apabila pihak-pihak yang terlibat dapat menghargai segala perbedaan yang ada. Perspektif kedua, menyatakan bahwa konflik senantiasa melekat dalam masyarakat (*inheren*), sehingga tidak dapat dihindarkan. Anggapan ini karena kapasitas manusia selaku pribadi maupun makhluk sosial, apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat majemuk. Dalam kaitan ini konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua sisi kehidupan sosial di manapun berada, bahkan sampai kadar tertentu keberadaan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya konflik akan terlihat bahwa di masyarakat tersebut berlangsung suatu dinamika kehidupan. Oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan orang adalah hanyalah mengendalikan agar konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak akan ter-wujud di dalam bentuk kekerasan (*violence*) (Nasikun, 2007).

# Bab 4

## Teori Konflik Ibn Khaldun

### A. Pengantar

Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M) dalam sebuah keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab, leluhur keluarganya adalah Arab Yaman. Dia hidup menjelajah ke mana-mana, Maroko Tunisia, namun akhirnya wafat di Mesir. Keluarganya, yang banyak menjabat di kantor besar Andalusia, telah beremigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Seville ke Reconquista pada tahun 1248. Di bawah dinasti Tunisia Hafsid beberapa keluarganya menduduki jabatan politik; namun, ayah dan kakek Ibn Khaldun menarik diri dari kehidupan politik. Saudaranya, Yahya Khaldun, juga seorang sejarawan yang menulis buku tentang dinasti Abdalwadid, dan yang dibunuh oleh saingan untuk menjadi penulis sejarah resmi Istana. Ibn Khaldun menyaksikan pertumbuhan dan kemunduran kekuasaan Islam di Spanyol. Sebelum berusia 20 tahun, ia telah terlibat dalam berbagai intrik politik. Sepanjang hidupnya, Ibn Khaldun banyak mengalami perlakuan diskriminasi, dituduh, difitnah, dipenjara, hingga digelapkan karyanya.

Ibn Khaldun adalah seorang intelektual muslim terkenal. Namun ketokohnya sebagai seorang teoritikus konflik tidak lebih dikenal dari kepakarannya dalam bidang filsafat atau filsuf sejarah, sejarawan, ilmuwan politik, maupun ahli ekonomi. Menurut Affandi (2004) bahwa mungkin hal itu terjadi karena ia tidak menyebutkan

secara eksplisit dalam salah satu bagian *muqaddimah*<sup>4</sup> bahwa yang dilakukannya adalah konseptualisasi terhadap persoalan konflik. Sehingga teori konfliknya tidak begitu dikenal dan dikaji oleh para ilmuwan sosial. Ini sangat bisa dipahami ketika Ibn Khaldun memandang konflik sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Konflik lahir dari interaksi antarindividu maupun kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karenanya, sekalipun *muqaddimah* ditulis di tengah kondisi masyarakat yang penuh dengan konflik, tetapi Ibn Khaldun tidak menyebutnya secara eksplisit, bahwa salah satu bagian atau keseluruhan dari *muqaddimah* adalah merupakan konseptualisasi konflik. Dengan kata lain, terminologi teori konflik Ibn Khaldun hanya disebutkan secara implisit di dalam *muqaddimah*nya, bahwa persoalan konflik selalu terjadi dalam peradaban umat manusia, terutama dalam realitas masyarakat yang diwarnai peperangan, perebutan kekuasaan, dan disintegrasi.

Konsep “*ashobiyah*” merupakan poros utama pemikiran Ibn Khaldun. Melalui konsep ini Ibn Khaldun mencoba menjelaskan berbagai fenomena sosial (termasuk fenomena konflik) yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, dan agama. Secara etimologi, “*ashobiyah*” dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut.

Baali (1989) membedakan *ashobiyah* dalam empat tahapan. Pertama, *ashobiyah* yang berasal dari ikatan hubungan darah. Kedua, *ashobiyah* yang didasarkan pada hubungan kekerabatan. Ketiga, *Ashobiyah* karena partisipasi atau koalisi yang saling menguntungkan-

---

<sup>4</sup> *Muqaddimah* Ibnu Khaldun memuat teori politik, ekonomi, sosiologi, agama, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

kan. Khaldun memberi contoh orang-orang yang terbuang atau diusir dari keluarga adalah contoh *ashobiyah* jenjang ketiga. Keempat, *ashobiyah* bermakna kekuatan bersama yang dimiliki oleh suatu suku atau kelompok individu yang diekspresikan melalui kepentingan bersama mereka. Semangat nasionalisme bisa berasal pada aspek keempat ini.

## **B. Teori Konflik Ibn Khaldun**

Menurut Ibn Khaldun ada tiga aspek yang menyulut munculnya konflik yaitu: pertama, konsekuensi logis dari *ashobiyah*, kedua, faktor politik, dan ketiga, faktor ekonomi. Faktor pertama yang menyulut konflik adalah konsekuensi logis dari *ashobiyah*, maksudnya bahwa *ashobiyah* yang diekspresikan melalui rasa cinta pada kelompok (primordialisme) yang muncul di dalam kelompok atau etnis, dalam beberapa hal memunculkan rasa primordialisme (bahkan lebih ekstrim lagi adalah chauvinism) menjadi pemicu bagi pertentangan dengan kelompok atau etnis yang lain (*the otherness*). Konsekuensi lain dari sifat manusia adalah agresifitas mereka, merupakan aspek laten dari primordialisme yang dipicu oleh aspek eksternal, meliputi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu kelompok. Faktor pertama sebagaimana dijelaskan oleh Khaldun lebih banyak mengambil konteks masyarakat Badawa<sup>5</sup> yaitu masyarakat yang masih memiliki pola hidup sederhana, kebutuhan dasar juga sederhana seperti pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat Badawa dicirikan oleh sifat sederhana, egaliter, spontan, bebas (tidak banyak ikatan), gembira (bebas berekspresi), bersatu, merekat dan berpadu

---

<sup>5</sup> Dalam masyarakat Badawa, konflik terjadi antar kelompok/suku, lebih banyak disebabkan oleh karena mempertahankan keutuhan kelompok dan mendapatkan kebutuhan dasarnya kelompok. Masyarakat kota yang kompleks disebut Khaldun dengan masyarakat Hadori.

(*cohesive*). Orientasi tertinggi masyarakat Badawa adalah penguasaan terhadap suku lain dan penguasaan terhadap sumber-sumber produksi (sumur atau sumber air, pasar, dan tanah). Hal ini merupakan penyulut terjadinya konflik dalam masyarakat.

Faktor kedua yang menyulut konflik adalah faktor politik. Pada aspek ini, konflik muncul karena motif mempertahankan kelompok, dinasti dan kerajaan atau negara. Raja (*king*) atau pemimpin (*leader*) mempertahankan kerajaan atau negara karena mereka menginginkan kekuasaan negara yang damai, sehingga mereka dapat membangun negara dengan lancar. Pada masyarakat Hadori<sup>6</sup> yang lebih kompleks, faktor politik juga muncul pada pertentangan antara kepentingan berbagai kelompok masyarakat (yang tentunya telah bersifat heterogen) untuk mencapai tampuk kekuasaan dan kemudian menjadi raja atau pemimpin.

Faktor ketiga yang menyulut konflik adalah faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi, konflik lebih disebabkan oleh kepentingan penguasaan terhadap sumber-sumber produksi, dan penguasaan terhadap pasar. Pada konteks ini Ibn Khaldun tidak mengandaikan adanya penguasaan modal oleh pemodal atau penguasa dan penguasaan tanah oleh tuan tanah (*landlord*) yang umumnya telah menjadi konteks bagi masyarakat modern.

Selanjutnya menurut Affandi (2004), bahwa ada tiga pilar utama teori konflik Ibn Khaldun yaitu: pertama, watak psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku, dan lainnya); kedua, adalah fenomena politik, yaitu berhubungan dengan

---

<sup>6</sup> Masyarakat Hadori adalah masyarakat kota yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan, kompleks, beradab, menetap, yang ditandai oleh pembatasan, perbedaan, pengeangan, kepentingan pribadi bermain, bikin aturan sendiri, serba artifisial.

perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti, dan negara; dan ketiga, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun negara.

### **1. Watak Psikologis Manusia**

Manusia memiliki tiga potensi dalam dirinya yaitu *intelligibilia*, *sensibilia*, dan *spiritualia*. Tiga potensi ini digunakan manusia untuk mengembangkan eksistensi kemanusiaan dalam diri manusia. Apabila ketiga potensi tersebut mampu dikembangkan dengan baik, maka manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Namun, manusia juga memiliki potensi lain yang bisa mendorongnya bertindak agresif. Potensi tersebut muncul karena adanya pengaruh *animal power* dalam dirinya. Karena potensi inilah, manusia juga dikenal sebagai *rational animal* (*animale rationale*). Dalam hubungannya dengan konflik, ada dua potensi dalam diri manusia yang menjadi perhatian Ibn Khaldun yaitu, *pertama*, cinta terhadap (identitas) kelompok, dan *kedua*, adalah sifat agresif.

Menurut Ibn Khaldun, manusia secara fitrah telah dianugerahi rasa cinta terhadap garis keturunan dan golongannya. Rasa cinta ini menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta harga diri kelompok, kesetiaan, kerja sama, dan saling membantu dalam menghadapi musibah atau ancaman yang pada akhirnya akan membentuk kesatuan dan persatuan kelompok.

Ketika manusia hidup bersama-sama dalam suatu kelompok maka fitrah ini mendorong terbentuknya rasa cinta terhadap (identitas) kelompok atau (*ashobiyah*). Manusia tidak akan rela jika salah satu anggota kelompoknya terhina dan dengan segala daya upaya akan membela dan mengembalikan kehormatan kelompok mereka. Rasa cinta terhadap kelompok ini terdapat pada semua bentuk masyarakat, baik masyarakat nomaden yang suka berpindah-

pindah yang diikat berdasarkan ikatan darah atau garis keturunan, maupun rasa cinta pada masyarakat menetap yang pertaliannya berdasarkan kepentingan-kepentingan anggota atau secara imajiner menjadi kepentingan kelompok.

Manusia juga memiliki watak agresif sebagai akibat adanya *animal power* dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan. Agresifitas manusia ini bisa berakibat terjadinya pertumpahan darah dan permusuhan, bahkan pemusnahan umat manusia itu sendiri. Penemuan senjata yang dimaksudkan sebagai pelindung manusia dari ancaman binatang buas ternyata tidak mampu menahan agresifitas antar sesama manusia.

Agresifitas manusia tersebut kemudian menjadi pemicu terjadinya konflik antar mereka. Apalagi bila tidak terdapat institusi atau seorang pemimpin yang mampu mengendalikan agresifitas manusia atas manusia yang lainnya. Argumen inilah yang kiranya dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai konflik dan kekerasan yang begitu lekat dengan sejarah umat manusia.

*Ashobiyah* mempunyai dua refleksi sosial, yaitu pertama, untuk menumbuhkan solidaritas dan kekuatan dalam kelompok, dan kedua, untuk mempersatukan berbagai *ashobiyah* yang bertentangan sehingga menjadi suatu kelompok manusia yang besar dan bersatu.

## **2. Fenomena Politik**

Fenomena politik yang berhubungan dengan konflik dalam masyarakat menurut Ibn Khaldun ada dua hal yaitu, pertama, akar berdirinya negara; dan kedua, kekuasaan raja atau kepala negara. Negara sebagai perkembangan paling maju dalam kehidupan berkelompok manusia sering kali dipandang sebagai arena pertarungan antar kelompok dalam masyarakat. Pertarungan terjadi karena masing-masing kelompok ingin memegang kekuasaan, dan puncak kekuasaan tersebut adalah kekuasaan negara.



Dalam kaitannya dengan konflik, kekuasaan raja atau kepala negara memegang peran yang sangat penting, yang diharapkan mampu menjadi penengah dan pemisah di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk melarang orang lain melakukan tindakan yang merusak, dan larangan itu untuk didengarkan dan dipatuhi oleh orang lain. Namun, seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya tidak menjamin dapat berbuat adil. Bahkan kekuasaannya dapat membuat raja atau kepala negara berlaku zalim dan aniaya. Ketika seorang raja atau kepala negara dalam menjalankan kekuasaannya berbuat tidak adil, berlaku zalim, dan aniaya kepada warga negara, kepada masyarakat, atau kepada kelompok-kelompok masyarakat, maka ketika itu akan muncul gelombang protes, perlawanan, dan konflik di permukaan.

### **3. Fenomena Ekonomi**

Para teoritikus sosial kontemporer moderen yang membahas isu-isu konflik tidak satu pun yang melepaskan perhatian mereka dari fenomena dan persoalan ekonomi. Perbedaannya hanya terjadi pada apakah faktor ekonomi menjadi penyebab utama (determinan utama) yang menyebabkan terjadinya konflik atau tidak. Teori-teori konflik yang mempunyai akar pada pemikiran Karl Marx akan memandang konflik disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi. Karenanya, setiap kali konflik meletus perhatian mereka akan segera tertuju pada persoalan penguasaan sumber-sumber ekonomi, distribusi ekonomi atau perebutan sumber-sumber ekonomi.

Perspektif semacam ini bisa saja menjadikan pemahaman akan konflik menjadi lebih mendalam, karena fokus yang mereka berikan. Tetapi, tidak selamanya konflik bisa dijelaskan atas motivasi-motivasi ekonomi. Misalnya, konflik-konflik yang terjadi pada negara-negara seperti: Irlandia, Skotlandia, dan Welsh yang menuntut otonomi lebih

besar dari Inggris, atau tuntutan orang Breton serta Korsika dari Perancis, tuntutan orang Kanada kepada Perancis di Quebec dari Kanada, ataupun konflik yang tidak putus-putus antara orang Vlaam dan Vallon di Belgia, perjuangan kemerdekaan orang Basque, Catalonia, dari Spanyol, tidaklah hanya didorong oleh ketidakpuasan ekonomi. (Affandi, 2004). Dengan kata lain, tidak semua persoalan konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi konflik terjadi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti faktor politik, sosial, budaya, dan lain-lain.

Ibn Khaldun termasuk salah satu teoritikus konflik yang tidak melihat faktor ekonomi lebih dominan dibandingkan faktor lain sebagai penyebab konflik. Bahkan konflik kerap kali muncul karena adanya motivasi-motivasi ekonomi seperti disebut dalam *muqaddimah*, tetapi keberadaannya tidak lebih dominan dibanding yang lain. Bahkan, dalam penjelasan beberapa peristiwa konflik, terlihat perhatiannya yang lebih ditujukan pada faktor-faktor non-ekonomi (sosial politik).

Untuk mengetahui bagaimana perilaku ekonomi mempengaruhi relasi antarkelompok dalam masyarakat dapat dilihat pada penjelasannya mengenai perubahan pola-pola perekonomian. Penjelasan mengenai hal ini sejalan dengan penjelasannya tentang perkembangan masyarakat dari masyarakat nomaden yang diwakili oleh suku pengembara padang pasir menuju ke masyarakat kota (*hadharoh*) yang cenderung hidup menetap.

Perkembangan masyarakat dan perbedaan antargenerasi sangat terkait erat dengan perbedaan pada pola perekonomian atau mata pencaharian yang mereka lakukan. Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki iklim yang relatif sama, belum tentu memiliki kesuburan yang sama. Penduduknya pun belum memiliki taraf hidup yang baik. Sedangkan bagi penduduk yang hidup

di daerah panas dan tandus seperti yang dialami oleh orang-orang Badui padang pasir, mereka harus menghadapi kehidupan yang berat. Masing-masing penduduk dengan iklim yang berbeda mempunyai kemampuan yang berbeda pula untuk mempertahankan hidup mereka.

Dalam hubungannya dengan perubahan politik, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa perekonomian yang dijalankan di bawah kekuasaan politik yang korup akan mengakibatkan hancurnya *ashobiyah* yang mengantarkan seorang penguasa ke puncak kekuasaan negara. Semakin kekuasaan tenggelam dalam kemewahan dan kenikmatan hidup, maka semakin dekat dengan kehancuran. Hal ini dikarenakan oleh perilaku para pejabat negara yang hidup dalam kemewahan, bermewah-mewahan tanpa batas, yang diperoleh dari hasil korupsi atau merampas hak rakyat. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan kondisi yang demikian, maka *ashobiyah* yang sebelumnya mengantarkan mereka ke puncak kekuasaan secara perlahan-lahan akan hancur disebabkan oleh perilaku pejabat negara yang korup dan hidup bermewah-mewahan.

Menurut Ibn Khaldun, peradaban masyarakat manusia akan runtuh oleh 5 hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidakadilan dalam masyarakat di mana jarak antara orang kaya dan orang miskin sangat lebar, juga karena adanya ketimpangan dan kerusakan;
2. Penindasan merajalela di mana-mana, ada kelompok orang yang kuat semena-mena menindas kelompok orang yang lemah;
3. Moralitas runtuh, terutama di kalangan pemimpin, sebagai contoh misalnya pemimpin yang terkena kasus korupsi, dll;
4. Tertutupnya saluran dan media komunikasi antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Pemimpin tidak bisa lagi diberi tahu, dikritik, atau dikasih masukan karena pemimpin sudah merasa diri paling pintar dan paling benar, serta tidak bisa lagi di-

nasehati. Malahan yang memberikan nasehat kepada pemimpin akan dicopot dari jabatannya atau disingkirkan dan bahkan dipenjarakan. Hal ini sebagai alamat dan pertanda bahwa peradaban akan runtuh, karena tidak bisa lagi menerima perubahan.

5. Kalau ada bencana alam secara besar-besaran itu sebagai pertanda bahwa peradaban akan runtuh.

Ibn Khaldun mengatakan bahwa *ashobiyah* muncul karena empat sebab, yakni:

1. Ikatan darah atau keturunan dan kerabat.
2. Ikatan perjanjian atau persekutuan.
3. Ikatan yang timbul karena hubungan perlindungan dengan yang dilindungi karena bergabungnya seseorang atau sekelompok dengan kelompok lain dan menyatakan loyal terhadap kelompok yang melindunginya.
4. Ikatan agama.

Ibn Khaldun mengatakan bahwa *ashobiyah* itu berwajah dua, yaitu apabila *ashobiyah* berdasar pada fanatisme, chauvinisme, kesombongan, berarti *ashobiyah* yang dimaksud itu tergolong buruk (*worthless*), sebaliknya, bila berdasar pada keberanian, pemenuhan aturan/kewajiban (*fulfillment of commands*) berarti *ashobiyah* itu baik (*valuable*).

# Bab 5

## Perspektif Konflik Kontemporer

### A. Pengantar

Sesungguhnya berbagai masalah sosial-politik saat ini berkisar di seputar persetujuan akibat penegasan identitas (*identity*) yang berlainan di antara kelompok yang berbeda-beda, sebab konsepsi tentang identitas ini memang memengaruhi pikiran dan tindakan kita melalui berbagai cara.

Pelbagai tindak kekerasan dan kekejian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini telah mengantar kita memasuki suatu periode penuh pertentangan yang amat membingungkan sekaligus menggiriskan. Pertikaian politik global kerap kali dipandang sebagai suatu kewajaran akibat adanya perbedaan agama atau budaya di dunia. Sesungguhnya, kian lama dunia ini kian dipahami, meski hanya secara tersirat, sebagai suatu federasi agama-agama atau peradaban-peradaban, dan dengan demikian mengabaikan semua aspek lain yang dipakai seseorang untuk membedakan dirinya dari yang lain.

Rasa kemanusiaan dicabik-cabik manakala beraneka ragam bentuk pengelompokkan orang di dunia disatukan ke dalam satu sistem klasifikasi dominan, yakni klasifikasi berdasarkan agama, komunitas, budaya, bangsa, atau peradaban. Banyak konflik dan kekejaman di dunia ini dipupuk melalui ilusi tentang adanya sebuah identitas yang tunggal dan tanpa pilihan. Keterampilan dalam mengo-

barkan kebencian diwujudkan dalam upaya menyulut tenaga ajaib dari adanya anggapan tentang suatu identitas dominan yang bisa menenggelamkan afiliasi-afiliasi lainnya.

Dalam bentuknya yang agresif, ilusi ini bahkan bisa mengalahkan rasa simpati dan kebaikan manusiawi apapun yang lazimnya kita miliki. Hasilnya bisa berupa kekerasan buas di dalam negeri, maupun keberingasan dan terorisme yang canggih di aras global.

Sesungguhnya, sumber utama potensi konflik di dunia kontemporer dewasa ini adalah praanggapan bahwa orang bisa secara mutlak dikategorikan berdasarkan agama atau budayanya saja. Keyakinan yang tersirat dalam klasifikasi tunggal yang serba mutlak ini bisa membuat dunia jadi “panas membara”. Pandangan pemisahan yang serba total ini bukan hanya bertentangan dengan keyakinan kuno bahwa semua manusia itu pada dasarnya sama, melainkan juga bertentangan dengan pemahaman yang lebih masuk akal meski kurang banyak dibahas bahwa kita ini memang sungguh-sungguh beraneka satu sama lain. Dunia kerap kali dipandang sebagai kumpulan agama-agama (atau “peradaban-peradaban” atau “kebudayaan-kebudayaan”), dengan mengabaikan identitas-identitas lain yang dimiliki dan dihargai oleh manusia, kelompok, dan masyarakat yakni kelas, jenis kelamin, profesi, bahasa, bidang keilmuan, moral, keyakinan politik, dll.

## **B. Perspektif Konflik dalam Masyarakat**

Perspektif-perspektif tentang konflik dapat dilihat dari berbagai pendapat, di antaranya adalah pendapat Ted Robert Gurr yang melihat konflik dari sisi psikologi sosial, Charles Tilly dan Sidney Tarrow melihat konflik dari sisi politik mobilisasi, dan Gerry Van Klinken melihat konflik dari sisi etnisitas-kultural.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai macam motivasi untuk melakukan sesuatu. Kompleksitas motivasi inilah yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan.

Ted Robert Gurr dalam bukunya berjudul *Why Men Rebel*, menyebut istilah psikologis yaitu rangsangan (stimuli) untuk melakukan tindakan. Rangsangan yang satu disediakan oleh perasaan gembira kita, perasaan puas dan perasaan cinta. Rangsangan yang lain adalah ketertarikan, teror, tekanan dan amukan.

Ted Robert Gurr menyatakan bahwa manusia selalu mengalami keadaan yang berubah. Maka ketika rangsangan motivasi manusia terhalang, manusia menjadi frustrasi. Cantril menulis, “ketika kita merasakan suatu konflik, berarti kita membawa suatu situasi yang bekerja pada masa yang lalu tetapi tampak tidak berhubungan ...muncul situasi yang kita hadapi. Konflik atau tekanan secara fundamental adalah tidak menyenangkan, dan harus dihindarkan “*non-realistic*”. Dua hal yang merupakan sumber fundamental manusia yaitu *innovation* dan *destruction*. Perilaku inovasi senantiasa terjadi dalam merespon ketegangan yang cukup: proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk belajar menghindari stimuli yang tidak menyenangkan, dan hanya beberapa konflik baru yang diperoleh melalui proses yang dapat diadaptasikan oleh manusia.

Konflik harus dibedakan dari frustrasi; tujuan yang tidak dicapai (kebutuhan yang tidak terpenuhi, kepuasan yang tidak diperoleh, nilai yang tidak dipenuhi, dan sebagainya) untuk beberapa alasan. Sebuah kasus yang sangat sederhana adalah pada kelangkaan. Kasus sederhana yang lain adalah ketika sesuatu akses diblokir untuk sumber kepuasan, tetapi kasus khusus yang lebih penting adalah kasus konflik yang mana usaha oleh seseorang atau yang lain untuk memperoleh sesuatu nilai dapat dilihat sebagai sumber frustrasi. Gurr menyebut “*Relative Deprivation*” (RD) sebagai persepsi aktor pada

pertentangan antara nilai pengharapan dan nilai kemampuan. Nilai pengharapan adalah baik dan kondisi kehidupan manusia yang yakin akan kebaikannya. Nilai kemampuan adalah baik dan kondisi-kondisi yang mereka pikirkan, mereka mampu dapatkan dan pelihara. Nilai adalah kejadian yang diinginkan, obyek dan kondisi-kondisi yang manusia usahakan. Istilah psikologi, nilai adalah tujuan objek motivasi manusia kiranya disebabkan pada atau berasal dari kebutuhan dasar atau insting. Nilai yang dimaksud menurut Gurr mencakup nilai kesejahteraan (*welfare value*), nilai kekuasaan (*power value*) dan nilai antar pribadi (*interpersonal value*). Ketika nilai-nilai tersebut terhalang (tidak dapat dicapai), maka manusia cenderung melakukan *deprivation*. Inilah salah satu inti dari tulisan Ted Robert Gurr dalam bukunya “*Why Men Rebel?*”.

Berbeda dengan Ted Robert Gurr yang melihat konflik dari sisi psikologi sosial, maka Gerry Van Klinken (2007) melihat konflik dari sisi etnisitas-kultural. Klinken mengajukan sebuah pertanyaan: mengapa kekerasan terkesan begitu “normal” dalam budaya Indonesia? Columbijn menggunakan prinsip-prinsip psikologi sosial untuk mengemukakan bahwa *xenophobia* adalah salah satu konsekuensi dari kohesi sosial yang kuat di Indonesia, dengan menyimpulkan: “suatu identitas sosial yang sangat kuat, bersama dengan kecenderungan untuk memandang orang luar identitas tersebut seolah-olah bukan lagi manusia, kombinasi itu adalah akar dari segala macam kekerasan di Indonesia. Kecenderungan ke arah kekerasan adalah yang paling menggelisahkan dari sebuah daftar panjang tentang sikap-sikap kultural yang berkemungkinan akan menghadang demokrasi untuk jangka panjang. Sikap-sikap lain meliputi “egoisme yang ekstrim, intoleransi, kenafian, hubris, paranoia, dan emosionalisme”. Dengan demikian, fakta heterogenitas etnis dan religius dapat dianggap sebagai penyebab destabilisasi (Klinken, 2007).



Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana identitas terbentuk dan bagaimana identitas (harga diri) menciptakan kekerasan dan menjadi motivator untuk melakukan suatu aksi. Identitas merupakan semacam solidaritas, ikatan antara individu dan kelompok. Sebuah definisi yang memang tampak kaku namun mungkin bermanfaat menandakan betapa ikatan tersebut mungkin bersifat kognitif, moral dan emosional atau sekaligus semuanya. Sejauh ikatan tersebut bersifat emosional, akan membawa kesenangan yang melebihi pertimbangan kepentingan pribadi. Identitas juga bisa melampaui ideologi yang tidak membuat para anggota sebuah kelompok merasa senang akan satu sama lain.

Lantas bagaimana identitas bisa terkait dengan suatu tindakan atau aksi? Identitas pada dasarnya adalah sebuah "persepsi" ikatan antara individu dan kelompok tidak dengan sendirinya mengubah individu-individu menjadi robot-robot yang tidak bisa berpikir sendiri.

Dengan demikian, kita membutuhkan sebuah konsep tentang identitas yang terbuka bagi politik, bagi pembelajaran dan interaksi. Salah satu aspek kunci dari konsep itu adalah interaksi melintasi batas-batas kelompok-kelompok identitas. Interaksi lintas batas adalah gagasan sentral dari konsep etnisitas yang lebih merupakan hasil rundingan politis. Fredrik Barth menulis bahwa "batas etnislah yang mendefinisikan kelompok, bukan kandungan kultural di dalamnya". Orang-orang hanya sadar bahwa mereka mempunyai identitas ketika mereka berinteraksi dengan orang luar. Identitas etnis berkembang melalui persaingan (*competition*), bukan melalui isolasi atau keterasingan (Klinken, 2007).

Literatur mengenai bagaimana identitas membuahkan aksi terbagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama bersifat sosiologis, dan menempatkan kuncinya pada kerapatan jaringan-jaringan

sosial yang mewarnai identitas itu. Yang kedua bersifat psikologis, yang memusatkan perhatian pada apa yang orang-orang ketahui (kognisi).

Pendekatan Sosiologis dikenal sebagai "teori identitas" yang mendasarkan diri pada interaksionisme simbolik, dan menekankan hubungan-hubungan timbal balik antara diri dengan masyarakat. Orang-orang membuat komitmen untuk bertindak terutama untuk meningkatkan harga diri mereka sendiri dalam jaringan hubungan-hubungan di dalam kelompok mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin rapat jaringan sosialnya, semakin besar pula kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada anggota-anggotanya. Pola tindakan identitas ini menurut McAdam, Tarrow dan Tilly dalam Klinken (2007) disebut "*embedded*" (berakar), dan yang lain disebut "*detached*" atau lepas atau tidak berakar.

Identitas yang berakar (*embedded*) adalah identitas yang mewarnai rentang hubungan-hubungan sosial yang luas. Keluarga di sebuah desa merupakan salah satu contoh identitas berakar. Perseteruan yang melibatkan identitas berakar cenderung menengahkan rangkaian aksi perseteruan yang sangat khas. Tindakannya sangat partikularistik, lokalitas, berskala kecil, bersifat langsung, dan aksinya terkesan spontan. Sebaliknya, identitas-identitas lepas (*detached*) mewarnai rentang hubungan-hubungan sosial yang sangat sempit. Salah satu contohnya adalah keanggotaan dalam sebuah partai politik. Hubungan-hubungan sosial bersifat modular, berskala besar, dan membutuhkan koordinasi yang luas (Klinken, 2007).

Penjelasan psikologis tentang pembentukan identitas etnis yang diprakarsai oleh Tajfel dan Turner. Model itu menekankan unsur-unsur kognitif dalam hubungan antara seorang diri yang dibangun secara sosial dan identitas yang bersifat kolektif. Kuncinya ada pada

sebuah proses *stereo-typing*, yang secara teknis disebut kategorisasi kognitif.

Di dalam sebuah kelompok muncullah "prototipe-prototipe" mengenai siapa dia anggota kelompok tersebut dibanding dengan orang yang di luar kelompok (*out group*). Anggota-anggota kelompok memperkuat kedudukan mereka dalam kelompok dengan jalan mem-peragakan "prototipe" kelompok yang relevan. Dalam proses itu mereka menjadi "depersonalized". Prototipe itu bisa dengan jelas merupakan suatu konstruk ideologis.

### **C. Prasangka Dalam Konflik Antar Etnik**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ke-ragaman budaya dan masyarakat (*plural societies*). Keragaman tersebut bukan hanya menyangkut daerah asal, tetapi juga menyangkut budaya, etnis, agama dan lain-lain. Dalam keragaman tersebut mencerminkan perbedaan-perbedaan di antara berbagai budaya, etnis dan agama antara satu dengan yang lain. Karena keragaman tersebut pulalah, sehingga bangsa Indonesia senantiasa menyimpan potensi konflik di dalam dirinya.

Indonesia mencatat puluhan bahkan ratusan perselisihan antar kelompok etnik sejak berdirinya. Meskipun demikian hanya beberapa yang berskala luas dan besar. Selain konflik antara etnik-etnik yang digolongkan asli Indonesia dengan etnis Cina yang laten terjadi, konflik antar etnik yang terbesar di antaranya melibatkan etnik Madura dengan etnik Dayak di Kalimantan yang terkenal dengan "tragedi Sambas" dan "tragedi Sampit". Konflik-konflik dalam skala lebih kecil terjadi hampir setiap tahun di berbagai tempat di penjuru tanah air.

Tentunya sebagaimana konflik lain, mencari akar penyebab konflik antar etnik merupakan kunci dalam upaya meredam konflik

dan mencegah terulangnya kembali konflik serupa. Berbagai perspektif telah memberikannya, baik itu perspektif politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, dan lainnya. Berbagai sebab konflik telah pula diidentifikasi. Salah satu sebab yang sering ditemukan dalam konflik antar etnik adalah prasangka antar etnik. Dalam bagian ini akan diketengahkan bagaimana peranan prasangka dalam mempengaruhi terjadinya konflik antar etnik.

Apakah konflik antar etnik? Konflik adalah ekspresi perjuangan di antara minimal dua belah pihak yang saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dua pihak itu merasa tidak memiliki kesamaan tujuan, memperebutkan sumber daya yang langka, dan merasa adanya campur tangan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan. Definisi konflik di atas mencakup segala tindakan yang merupakan efek dari perjuangan mencapai tujuan, seperti saling memaki atau permusuhan verbal, menghindari pertemuan, perkelahian, perang, dan lainnya. Konflik bisa terjadi dalam skala besar bisa juga kecil. Memaki pihak lawan ketika bertemu di jalan mungkin hanya merupakan konflik skala kecil. Tapi itupun tergantung konteksnya, karena kalau yang bertemu dan saling memaki itu merupakan pemimpin dua belah pihak yang sedang berkonflik, efeknya bisa sangat besar.

Kita semua hampir selalu mengidentikkan konflik dengan pertentangan. Akan tetapi pertentangan tidak selalu bermakna konflik. Tidak semua pertentangan menciptakan konflik. Pertentangan yang terjadi antara dua pihak dalam forum diskusi misalnya, jarang sekali menimbulkan konflik karena pertentangan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat yang tidak dibarengi dengan benturan fisik serta tidak melibatkan kelompok dalam pertentangan tersebut.

Menurut Gurr (1980) kriteria agar sebuah pertentangan bisa dikatakan sebagai sebuah konflik adalah:

Pertama, sebuah konflik melibatkan minimal dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling tarik menarik dalam aksi saling memusuhi. Mereka cenderung menjalankan perilaku kekerasan (koersif) untuk menghadapi dan menghancurkan pihak lawan. Hubungan pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas karena peristiwa pertentangan itu dapat dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Kedua, konflik antar etnik berarti dua pihak yang berlawanan adalah dua atau lebih kelompok etnik. Dalam konflik itu sendiri bisa saja pelakunya mengatasnamakan etnik dan bisa juga tidak. Demikian juga lawan dalam konflik bisa disebutkan mengatasnamakan etnik bisa juga tidak. Dalam kasus konflik antara etnik Madura dan etnik Dayak, jelas sekali mereka membawa bendera etnik. Pada kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya, tampak sekali bahwa sasaran kerusuhan adalah etnik Cina, sementara pelakunya etnik mana tidak jelas. Namun demikian, kerusuhan Mei di Jakarta, tetap bisa disebut konflik antar etnik, karena setidaknya salah satu pihak bisa diidentifikasi sebagai etnik mana.

Seringkali terjadi segerombolan pemuda etnik tertentu berkelahi dengan gerombolan pemuda etnik lain karena memperebutkan seorang gadis. Apakah hal ini juga bisa disebut konflik antar etnik? Apabila tidak melibatkan struktur dalam etnik masing-masing dalam konflik, maka perkelahian itu tidak bisa disebut konflik antar etnik. Perkelahian disebut perkelahian antar etnik bila telah membawa identitas etnik masing-masing.

Konflik bisa disebabkan oleh suatu sebab tunggal. Akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Kadangkala antara sebab yang satu dengan sebab yang lain saling tumpang tindih sehingga sulit menentukan mana sebenarnya penye-

bab konflik yang utama. Setidaknya ada enam hal yang biasa melatarbelakangi terjadinya konflik yaitu:

- 1) Kepentingan yang sama di antara beberapa pihak,
- 2) Perebutan sumber daya,
- 3) Sumber daya yang terbatas,
- 4) Kategori atau identitas yang berbeda,
- 5) Prasangka atau diskriminasi, dan
- 6) Ketidakjelasan aturan (ketidakadilan).

Sementara itu, bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama yaitu:

- 1) konflik muncul karena ada benturan budaya,
- 2) karena masalah ekonomi-politik, dan
- 3) karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial.

Berdasarkan hal di atas, konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi-politik yang menghimpit mereka.

Benturan budaya antar etnik terjadi karena adanya kategori atau identitas sosial yang berbeda. Perbedaan identitas sosial, dalam hal ini etnik dan budaya khususnya, seringkali menimbulkan *etnosentrisme* yang kaku, di mana seseorang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Sikap etnosentrik yang kaku ini sangat berperan dalam menciptakan konflik karena ketidakmampuan orang-orang untuk memahami perbedaan. Sebagai tambahan, pengidentifikasian kuat seseorang terhadap kelompok cenderung akan menyebabkan seseorang lebih berprasangka, halmana juga merupakan sumber konflik yang potensial. Terkait dengan resolusi konflik, karena konflik dimunculkan salah satunya karena adanya identitas budaya, yang mengandaikan adanya perbedaan

dalam memahami realitas, maka sangatlah penting untuk membuat suatu resolusi konflik yang mempertimbangkan asal budaya.

Seringkali pelaksana resolusi konflik gagal menjalankan perannya dalam menghentikan konflik antaretnik karena metode yang dipakai mengharuskan adanya sikap dan persepsi tertentu dari mereka yang bertikai, tapi sementara itu mereka yang bertikai memiliki sikap dan persepsi terhadap konflik yang beragam akibat perbedaan budaya.

Persoalan ekonomi sebagai penyebab konflik antar etnik merupakan sesuatu yang tak terbantahkan, meskipun tentu tidak semua konflik antar etnik ditimbulkan karena persoalan ekonomi belaka. Ketersediaan sumber daya ekonomi di suatu wilayah menjadi indikator penting bagi kemungkinan terjadinya konflik. Semakin mudah sumber daya itu didapatkan oleh setiap orang, maka kemungkinan konflik juga semakin rendah. Sebaliknya semakin langka sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kompetisi untuk mendapatkan sumber daya maka kemungkinan terjadinya konflik semakin besar. Persoalan ekonomi juga menyangkut distribusi sumber daya. Ketidakjelasan aturan dalam kompetisi memperebutkan sumber daya merupakan sumber konflik yang potensial. Dalam hal ini ketidakjelasan aturan bisa dimaknai sebagai kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Adanya kesenjangan sosial sebagai akibat adanya kesenjangan ekonomi yang besar merupakan cerminan dari adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Bila terjadi kesenjangan yang besar antar berbagai kelompok etnik maka kemungkinan terjadinya konflik juga semakin besar, karena perasaan ketidakadilan akan mendorong timbulnya semangat perlawanan.

Sementara itu peranan politik dalam konflik antar etnik berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap adanya konflik. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satu akar permasalahannya adalah adanya faktor pemicu, selain faktor

adanya deprivasi antar kelompok masyarakat dan faktor dominasi sosial, politik, dan agama. Faktor pemicu konflik antar etnik mungkin dimunculkan secara sengaja oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penguasaan sumber daya tertentu yang diinginkan oleh beberapa pihak mungkin menjadi salah satu sebab yang membuat pihak-pihak yang terlibat menggunakan konflik antar etnik sebagai jalan untuk memenangkan persaingan. Hal ini bisa dilihat dari siapa yang mendapatkan keuntungan dari adanya konflik.

Faktor pemicu dengan sendirinya mengandaikan telah adanya faktor-faktor yang potensial mencipta konflik. Dalam hal ini faktor prasangka merupakan determinan penting. Semakin besar prasangka antar etnik yang timbul maka semakin sedikit faktor pemicu yang diperlukan untuk menciptakan konflik antar etnik secara terbuka. Faktor prasangka sendiri seperti yang telah dibahas di atas bisa dimunculkan oleh lima sebab lainnya. Sehingga sangat beralasan kalau dinyatakan bahwa prasangka merupakan sumber konflik antar etnik terbesar.

### **1. Kasus Konflik Etnik Dayak vs Etnik Madura**

Salah satu konflik antar etnik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik antara etnik Dayak dan etnik Madura di Kalimantan (tragedi Sambas dan Sampit), di mana ribuan orang terbunuh dan puluhan ribu lainnya harus menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Sebenarnya pemantik konflik hanya disebabkan oleh perkelahian antar pemuda etnis Dayak dengan etnis Madura. Akan tetapi karena dalam perkelahian itu ada yang terbunuh maka muncullah solidaritas dan balas dendam kesukuan karena pada konflik tersebut terjadi pembunuhan, dan kemudian diperkuat pula oleh prinsip-prinsip adat sehingga konflik menjadi berkepanjangan dan membawa korban yang luar biasa besar.

Banyak analisis telah dilakukan untuk mencari tahu akar dari adanya konflik. Selain analisis yang menunjukkan adanya pihak-



pihak tertentu yang sengaja mengorganisir terjadinya kekerasan, ada banyak analisis lain yang didasarkan pada berbagai perspektif. Sebuah analisis menyimpulkan bahwa terjadinya perebutan sumber daya ekonomi yang semakin terbatas yang telah menyebabkan terjadinya konflik. Dulu saat sumber daya ekonomi cukup melimpah dan mudah didapatkan maka konflik dihindarkan. Akan tetapi begitu sumberdaya ekonomi semakin terbatas dan semakin banyak orang memperebutkannya maka terjadilah kompetisi perebutan sumberdaya. Sebagai konsekuensi logis dari adanya kompetisi perebutan sumber daya adalah terciptanya prasangka antar etnik. Dan lalu adanya prasangka terhadap etnik lain menjadi justifikasi kekerasan terhadap etnik tersebut.

Sebagai lanjutan dari analisis di atas, analisis lain menunjukkan bahwa adanya kesenjangan ekonomi antara etnis Dayak dan etnis Madura sebagai penyebab konflik. Kesenjangan ekonomi itu tercipta sebagai konsekuensi dari adanya kompetisi perebutan sumberdaya ekonomi di mana relatif etnis Madura memenangkannya. Namun kondisi sosial ekonomi etnik Madura dan etnik lain relatif sama sehingga tak ada alasan yang menyatakan telah terjadi kecemburuan sosial antara etnik Dayak dan etnik Madura di Kalimantan.

Kecemburuan sosial dan dendam yang merupakan sifat negatif dan sifat kurang terpuji di antara etnik dapat memicu terjadinya konflik antar etnik. Dalam kasus konflik etnik Dayak-Madura, sebagai contoh sifat negatif dan kurang terpuji etnik Dayak misalnya: pertama, fanatis dan mendewakan kesukuan; kedua, tidak punya tenggang rasa dan pendengki etnis yang dimusuhi; ketiga, menggeneralisasikan kesalahan orang-perorang menjadi kesalahan keseluruhan; keempat, melestarikan budaya mengayau; kelima, suka menyebarkan kebencian dan prasangka buruk.

Adapun sifat-sifat negatif etnik Madura yang menimbulkan dendam etnik lain adalah sebagai berikut: pertama, mencuri, menjambret, dan menipu; kedua, menempati tanah orang lain tanpa izin; ketiga, membuat kekacauan dalam perjudian; *keempat*, melanggar lalu lintas; dan kelima, merampas milik etnik lain di penambangan emas.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa konflik antar etnis merupakan akumulasi dari sifat-sifat negatif dan kurang terpuji serta adanya prasangka buruk etnik satu terhadap etnik lainnya. Berbagai sifat negatif dan keburukan anggota etnik lain dicatat, disimpan, dan digunakan sebagai dasar dalam bergaul dengan etnik tersebut. Cara pandang sempit tersebut pada akhirnya akan memvonis kesalahan satu orang atau sekelompok kecil orang menjadi kesalahan keseluruhan etnik. Pelaku keonaran hanya satu orang, namun digeneralisasi menjadi kesalahan keseluruhan etnik pembuat keonaran. Fenomena semacam ini membuat konflik antar etnik bak api dalam sekam, tinggal menunggu saat yang tepat, lalu konflik akan pecah ke permukaan.

## **2. Kasus Konflik Etnis di Ambon**

Kasus konflik antar etnis yang berskala besar lainnya adalah kasus konflik Ambon. Pertikaian yang membawa ribuan korban itu bermula dari isu etnis yang kemudian berkembang menjadi isu keagamaan sehingga tidak kunjung selesai hingga hari ini. Sebelum terjadi konflik, praktis kehidupan ekonomi di Ambon dikuasai oleh tiga etnis yang berasal dari luar Maluku yaitu Buton, Bugis, dan Makassar (BBM), yang notabene merupakan etnis pendatang dari Sulawesi, sementara itu orang Ambon sendiri kurang memiliki peranan dalam bidang ekonomi.

Keadaan demikian mudah saja kita mengerti bila menimbulkan konflik antar etnik. Sebab pertama mungkin adalah timbulnya

deprivasi orang Ambon di mana mereka merasa kalah bersaing di tanah sendiri oleh pendatang. Sebab kedua, munculnya prasangka mayoritas-minoritas, sebagaimana yang juga terjadi di berbagai tempat lain di Indonesia terhadap etnis Cina. Prasangka muncul karena etnis Buton, Bugis, dan Makassar sebagai minoritas menguasai perekonomian di Ambon. Sebab ketiga, munculnya faktor pemicu, yakni dihembuskannya isu keagamaan oleh pihak-pihak tertentu dalam isu etnisitas. Di Ambon ternyata etnisitas tumpang tindih dengan keagamaan. Etnis Bugis, Buton dan Makassar notabene beragama Islam dan orang Ambon umumnya beragama kristen.

Pengusiran etnis Bugis, Buton dan Makassar (BBM) dari Ambon oleh orang-orang Ambon asli pada awalnya boleh jadi hanya dipicu oleh persoalan etnisitas belaka, mirip dengan pertikaian antara etnis Madura dan Dayak di Kalimantan. Namun jika hanya persoalan etnisitas tentunya begitu etnis Bugis, Buton dan Makassar keluar dari Ambon maka selesailah permasalahan konflik di Ambon. Faktanya, konflik di Ambon justru semakin menghebat. Setelah etnis Bugis, Buton dan Makassar keluar dari Ambon, kemudian yang berkonflik adalah orang Ambon yang beragama Islam kontra orang Ambon yang beragama kristen. Selanjutnya, konflik itu terus menerus membesar dan dilabeli konflik antar agama. Secara gampang bisa dikatakan bahwa konflik antar agama di Ambon muncul sebagai bentuk solidaritas agama.

Tatkala etnis Bugis, Buton, dan Makassar yang beragama Islam terusir oleh orang Ambon yang beragama Kristen, lalu muncullah rasa solidaritas sesama muslim pada orang Ambon yang beragama Islam. Akibatnya kemudian pertikaian yang terjadi adalah antara penganut agama Islam dan agama Kristen. Akibat konflik yang luas dan merusak antara penganut agama, muncullah prasangka masing-masing pihak terhadap pihak lain, halmana menyulitkan upaya rekonsiliasi.

Prasangka inilah yang terus-menerus, sampai saat ini, menyebabkan potensi konflik antar agama di Ambon tetap besar. Jadi, konflik yang berawal dari adanya pra-sangka kemudian menghasilkan prasangka pula.

Di Indonesia, agama merupakan isu utama yang paling sensitif dalam menimbulkan konflik, sedangkan urutan kedua adalah etnis. Pada kasus pertikaian terhadap etnis Cina, dan pertikaian etnis di Kalimantan, persoalannya hanyalah persoalan etnisitas. Sedangkan pada kasus Ambon pertikaian yang terjadi dimulai dengan isu etnisitas tetapi kemudian berkembang menjadi isu keagamaan sehingga persoalannya lebih kompleks. Semua kasus di atas dipicu salah satunya oleh prasangka yang kemudian juga melahirkan prasangka. Hubungan prasangka dengan konflik antar etnis seperti lingkaran setan. Prasangka melahirkan konflik antar etnis, dan konflik antar etnis melahirkan prasangka.

# Bab 6

## Teori-Teori Kekerasan

### A. Pengantar

Kekerasan (*violence*) merupakan fenomena sosiologis dan politik yang bersifat universal. Ia dapat terjadi di mana saja dan dalam masyarakat apa saja, baik masyarakat sosialis, kapitalis, maupun teokratis. Dalam perspektif Durkheimian, kekerasan dapat dijumpai pada masyarakat pedesaan yang hidupnya masih sangat sederhana, maupun pada masyarakat perkotaan yang hidupnya sudah maju dan moderen. Dalam perspektif Khaldunian, kekerasan tidak hanya dijumpai pada masyarakat “*badawi*” yang berkarakter pedesaan di mana masyarakatnya masih hidup sederhana dan cenderung hidup secara berpindah-pindah (*nomaden*), tetapi juga dapat dijumpai pada masyarakat “*hadari*” yang berkarakter perkotaan yang hidupnya sudah maju dan moderen, kompleks, menetap dan beradab.

Kekerasan dapat berupa kekerasan simbolik maupun kekerasan fisik. Ia dapat berlangsung dalam level individual, kelompok, institusi, maupun sistem secara keseluruhan. Kekerasan bisa berlangsung secara horisontal pada masing-masing level, tetapi bisa juga berlangsung secara vertikal atau kombinasi antara keduanya. Kekerasan juga bisa berlangsung secara terbuka, tetapi juga bisa berlangsung secara tertutup, sebagaimana diekspresikan dengan sangat baik dalam kekerasan domestik yang umumnya menempatkan kaum perempuan dan anak-anak sebagai korban. Kekerasan dalam level global misal-

nya konflik kekerasan yang terjadi di Timur Tengah (Jalur Gaza, Yerusalem, Palestina), Rakhine State Myanmar, korban jiwanya tidak jarang kebanyakan adalah anak-anak, wanita dan para lansia.

Masyarakat zaman dahulu mungkin mengenal perbudakan, namun tidak seperti masyarakat sekarang ini yang mengeksploitasi bayi (*the infant formula scandal*), mengusir jutaan penduduk dari tempat hidupnya (contohnya Suriah, Rakhine-Myanmar) demi kepentingan kapitalisme, memanfaatkan wanita sebagai pelengkap wisata seks, memperlakukan suku primitif sebagai sub-manusia demi keuntungan pribadi dan kemudian sah-sah saja kalau mereka harus dihilangkan, dan mengeksploitasi sumber daya alam dengan merusak lingkungan, padahal merupakan tempat manusia menggantungkan hidupnya.

Dalam masyarakat moderen yang majemuk, berbagai tindak kekerasan antar/lintas etnik dapat terjadi setiap saat terutama di suatu kawasan, wilayah, kota atau negara yang terdiri dari beragam Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Realita keanekaragaman (*diversity*) dari berbagai perbedaan tersebut ada kalanya menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan antar/lintas etnik.

## **B. Definisi Kekerasan**

Kekerasan (*violence*) adalah segala bentuk tindakan dan perilaku nyata manusia yang menggunakan kekuatan (*strong*), memperlihatkan kekuatan atau disebabkan oleh kekuatan, yang menyebabkan orang lain menderita, terluka, cedera, kehilangan salah satu anggota tubuh, dan/atau bahkan kehilangan nyawa. Kekerasan dapat juga ditunjukkan dengan tanpa melalui perilaku fisik nyata, tetapi melalui perkataan kasar dan agumentasi keras pada pihak lain (*very strong feeling*), sehingga menyebabkan perasaan pihak lain merasa terlecehkan, terganggu, terhina, tersinggung, emosi, dan bahkan marah. Tipe

pertama disebut dengan kekerasan perilaku (*behavior violence*) dan tipe kedua disebut dengan kekerasan non-perilaku fisik (*non-physical behavior violence*) atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*).

Mayoritas orang menganggap kekerasan dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang (*war*), perkelahian, pembunuhan (*homicide*) atau kekacauan, namun faktanya kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seperti ini banyak sekali jumlahnya. Jika orang beranggapan bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu bentuk kekerasan, maka rasisme, polusi, atau kemiskinan (*poverty*) juga dapat dianggap sebagai kekerasan.

Menurut Fisher, dkk, (2001:4) bahwa kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh.

Douglas, *et.al*, (1982) mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor (misalnya *crowd*) yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Oleh karena kekerasan dilakukan banyak orang, maka disebut sebagai kekerasan kolektif (*collective violence*), yaitu tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan, seperti dalam perang, kerusuhan dan kepanikan. Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang. Bentuk kekerasan yang bersifat kolektif contohnya seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), pemerkosaan (*rape*), dan terorisme (*terrorism*), sedangkan bentuk tindak kekerasan individu, seperti bunuh diri (*suicide*). Meskipun terorisme bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi jauh sebelumnya

terorisme dilakukan oleh suatu kelompok secara bersamaan. Oleh karena itu, terorisme termasuk dalam bentuk kekerasan kolektif.

Ted Robert Gurr (1970) mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor yang menentang rezim yang berkuasa. Ted Robert Gur melihat kekerasan dalam pertautannya dengan deprivasi relatif. Gur (1970) menyatakan bahwa individu yang memberontak sebelumnya harus memiliki latar belakang situasi seperti terjadinya ketidakadilan, munculnya kemarahan moral, dan kemudian memberi respons dengan kemarahan pada sumber kemarahan tersebut.

Charles Tilly (1981) melihat bahwa kekerasan akan berhasil apabila aktor mampu memobilisasi massa lewat suatu kalkulasi politik. Johan Galtung (1975) mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Yang menghalangi orang tersebut adalah struktur. Kekerasan struktural yang dikemukakan Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis, serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga dapat dilakukan oleh struktur seperti aparaturnegara.

Kekerasan tidak selamanya berbentuk tindakan fisik. Simon Fisher, dkk (2004) mengemukakan tiga wujud atau sumber kekerasan yaitu (1) kekerasan yang terlihat baik fisik maupun bukan fisik seperti perilaku, tindakan dan perbuatan langsung atau tidak langsung; (2) kekerasan yang tidak tampak atau di bawah permukaan, seperti sikap, nilai-nilai, dan perasaan; (3) kekerasan yang juga tidak kelihatan, seperti kondisi pemerintahan, konteks, sistem dan struktur atau kekerasan struktural atau kekerasan melembaga.

Refleksi sumber kekerasan di atas dapat diwujudkan ke dalam berbagai aksi, konteks, nilai budaya dan paradigma. Beberapa unsur



budaya kekerasan seperti *carok* atau *acarok* pada budaya Madura, *mengayau* pada unsur budaya Dayak, *siri` repakasiri`* pada budaya Bugis, kesemuanya mengandung unsur kekerasan yang sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan harga diri dan kejayaan (Alqadrie, dalam Trijono, dkk (ed.) 2004:172-173).

### C. Sifat Kekerasan

Istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku (*behavior*), baik perilaku yang terbuka (*overt*) ataupun perilaku tertutup (*covert*), dan baik perilaku yang bersifat menyerang (*offensive*) atau perilaku bertahan (*deffensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu:

- 1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
- 2) Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi yang tidak terlihat, atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
- 3) Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, dan;
- 4) Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku mengancam mengkomunikasikan kepada orang lain suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan; orang hanya mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan ancamannya. Pada waktu

seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan mengancam kepada seseorang atau sekelompok orang, maka orang yang diancam akan mengalami tekanan, depresi, ketakutan, dan gangguan secara psikologis.

Dengan mengancam, ada sedikit orang yang dapat mengontrol orang lain. Ancaman, dianggap sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur penting kekuatan (*power*), kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Ancaman menjadi efektif jika seseorang mendemonstrasikan keinginan untuk mewujudkan ancamannya (Weber, 1958, dalam Santoso, 2002).

Penggunaan kekuatan dan ancaman dianggap sebagai tindak kekerasan, sebagaimana halnya dengan kekerasan ilegal seperti perampokan bersenjata yang terjadi di kota-kota besar dunia. Bahkan tindakan bisnis yang berpotensi bagi munculnya bahaya terhadap individu seperti penjualan obat berbahaya, mobil yang tidak aman dalam setiap kecepatan, atau permainan yang berpotensi mematikan, juga harus dianggap sebagai tindak kekerasan.

#### **D. Jenis-Jenis Kekerasan**

Sebagian dari kita menganggap kekerasan sebagai perilaku saja. Pembunuhan, pemukulan, penyiksaan, pemotongan salah satu dari anggota tubuh dan sebagainya merupakan contoh kekerasan fisik dan tidak pernah habis di mana saja di dalam komunitas, masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia. Peperangan adalah sesuatu yang sangat nyata dan merupakan manifestasi dari perilaku tersebut. Banyak sekali perilaku kekerasan yang juga terjadi pada tingkat pribadi misalnya, dalam keluarga di mana para wanita dan anak-anak mendapatkan perlakuan kejam. Tetapi dalam kasus-kasus kekerasan yang lain dijumpai bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik

(*behavior violence*) tetapi juga kekerasan yang bersifat non-fisik yang bersifat simbolik (*symbolic violence*).

### **1. Johan Galtung dan Kekerasan Budaya**

Johan Galtung (2003) membagi kekerasan dalam 2 tipologi yaitu pertama, kekerasan langsung, dan kedua, kekerasan struktural. Kekerasan budaya (*cultural violence*) membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural menjadi terlihat, dirasakan dan benar; atau setidaknya tidak salah. Seperti halnya ilmu politik yang berbicara tentang dua masalah, yaitu penggunaan kekuasaan dan legitimasi penggunaan kekuasaan, studi kekerasan juga berbicara tentang dua masalah: penggunaan kekerasan dan legitimasi penggunaan kekerasan itu. Mekanisme psikologisnya adalah internalisasi. Studi kekerasan budaya menyoroti cara bagaimana suatu perbuatan kekerasan langsung dan fakta kekerasan struktural dilegitimasi dan menjadi bisa diterima di masyarakat. Satu cara bagaimana kekerasan budaya dapat berlangsung adalah dengan mengubah warna moral perbuatan dari merah/salah menjadi warna hijau/benar atau setidaknya menjadi warna kuning/bisa diterima. Contohnya adalah pembunuhan atas nama negara sebagai sesuatu yang benar, atas nama seseorang sebagai sesuatu yang salah. Cara lainnya, adalah membuat realitas menjadi tidak jelas atau samar-samar, sehingga kita tidak mampu melihat perbuatan atau fakta yang penuh kekerasan, atau setidaknya sebagai perbuatan atau fakta yang keras. Jelasnya, hal demikian lebih mudah dilakukan dengan bentuk kekerasan daripada dengan bentuk lainnya.

Galtung menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan mereduksi kemampuan mental atau otak.

- 2) Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat ‘pengendalian’, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*.
- 3) Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
- 4) Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (struktur jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
- 5) Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
- 6) Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*), baik yang personal maupun yang struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Windhu, 1992).

## 2. Kekerasan Langsung dan Tidak Langsung

Selanjutnya Lambang Trijono mengatakan bahwa ada dua jenis kekerasan yaitu pertama, kekerasan langsung (*direct violence*), dan kedua, kekerasan tidak langsung (*indirect violence*). Dalam suatu peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat seperti konflik Maluku, korban kekerasan langsung seperti luka, cacat, meninggal dunia, dan sebagainya. Sementara korban kekerasan tidak langsung seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan tanah miliknya, kehilangan harta benda, dan hancurnya kekerabatan-kekerabatan, sistem kekerabatan, kohesi sosial, keharmonisan sosial, dan lain sebagainya (Trijono, 2001).

Adapun Salmi (2003) menyebut empat jenis kekerasan sebagai berikut: pertama, kekerasan langsung (*direct violence*), kedua, kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), ketiga, kekerasan represif (*repressive violence*), dan keempat, kekerasan alienatif (*alienating violence*).

Kekerasan langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah semua bentuk pembunuhan (*homicide*), seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal, dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar yang mengganggu hak-hak azasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup.

Kekerasan tidak langsung, adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dengan pihak (orang, masyarakat, atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindakan

kekerasan tersebut. Di sini terdapat dua sub kategori, yang perlu dibedakan yaitu kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).

Isu kelaparan juga dapat menggambarkan bentuk kekerasan tidak langsung. Ketika manusia menderita kelaparan atau kurang makan, bukan karena tiadanya makanan atau karena terjadinya bencana alam, namun karena alasan-alasan sosial dan politis (pendapatan yang rendah, distribusi makanan yang tidak merata, pengiriman makanan yang tidak lancar, kebijakan ekspor yang mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal), maka masyarakat ini bisa dianggap sebagai korban kekerasan sosial (*social violence*) yang dilakukan oleh masyarakat atau institusi sosial (misalnya, perusahaan multi nasional agro-industri, atau pejabat negara yang mengurus pasar). Fenomena ini kadang-kadang menyebabkan tindakan kejahatan yang tiada batas. Pierre Spitz (1978) mengatakan bahwa kelaparan adalah 'kekerasan bisu' (*silent violence*) di zaman modern ini. Menurut data statistik PBB, 10.000 orang mati karena kelaparan setiap hari dan jumlah total orang yang menderita malnutrisi kronis mencapai 500 juta, 150 juta di antaranya adalah anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun.

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Oleh karena itu, di dalamnya termasuk pelanggaran hak-hak azasi manusia yang, meskipun secara langsung atau tidak langsung tidak membahayakan kehidupan manusia, merupakan pelanggaran berat dalam mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak-hak sipil yang pokok adalah kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan bergerak, privasi, kesamaan di depan hukum dan hak untuk berusaha secara adil. Hak-hak politik mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat secara

demokratis dalam kehidupan politik di suatu daerah atau negara (hak untuk bersuara, mengikuti pemilihan umum, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, atau partai, kebebasan berbicara dan berpendapat, dan kebebasan pers). Sedangkan jaminan terhadap hak-hak sosial diberikan untuk melindungi kekerasan represif yang paling sering terjadi yakni larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh, atau larangan untuk mogok.

Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya atau intelektual. Pentingnya mendefinisikan dan memasukkan hak-hak azasi manusia ke dalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non-materi. Kepuasan kerja, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak-anak akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya adalah contoh-contoh hak azasi tersebut di atas yang dimungkinkan untuk dilanggar, baik secara sengaja atau tidak.

Salah satu bentuk kekerasan alienatif yang paling kejam adalah apa yang disebut dengan penindasan budaya yang ekstrim (*ethnocide*), yakni kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kultural kelompok tertentu. Kebijakan ini bisa dijalankan dengan banyak cara. Misalnya melalui penulisan buku-buku, kurikulum pendidikan, melalui pendidikan, dan lain-lain. Tujuan semua kebijakan itu adalah memaksakan satu kebudayaan tunggal dominan agar diikuti supaya menjadi satu (*unity*) tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan aspek-aspek kebudayaan yang lain.

### **3. Kekerasan Simbolik dan Kekerasan Fisik**

Kekerasan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pertama, kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok

aktor, kedua, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan ketiga, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur (Santoso, 2002).

Kelompok pertama dipelopori oleh ahli biologi, fisiologi, dan psikologi. Para pendukung teori biologi dan fisiologi berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (*innate*) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. Kelompok kedua memberikan pengertian kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Kekerasan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kelompok kedua ini menganggap bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga dilakukan oleh struktur, seperti aparatur negara. Kelompok ketiga memandang kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Asumsi kelompok ini adalah bahwa konflik bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat dan konflik sebagai sesuatu yang ditentukan.

#### **4. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan adalah suatu fenomena sosial yang kompleks, terlebih lagi jika hal itu merupakan kekerasan terhadap perempuan karena diwarnai oleh unsur relasi antar *gender* yang berbeda (*gender-based violence*). Persoalan kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan salah satu dari 12 keprihatinan dunia terhadap perempuan yang dirumuskan dalam Konferensi Beijing pada tahun 1995. Dimasukkannya isu kekerasan sebagai keprihatinan dunia disebabkan semakin meningkatnya eskalasi dan intensitas kekerasan di berbagai belahan dunia.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin, yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk di dalamnya tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau



perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Damanik, 1998).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan berakar dari persoalan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan terhadap perempuan memiliki dua basis yaitu basis biologis dan basis kultural. Pertama, basis biologis kekerasan terhadap perempuan berakar dari pandangan umum bahwa seksualitas laki-laki secara alamiah bersifat agresif, sedangkan seksualitas perempuan bersifat pasif dan submisif yang menempatkannya pada *sex provider*. Sedangkan basis kultural kekerasan terhadap perempuan merupakan perluasan dari konstruksi seksualitas perempuan yang berimplikasi pada proses disposisi dan relasi gender yang timpang. Budaya patriarki yang phallocentris memberikan *privelege* laki-laki pada posisi superior dan inferior pada perempuan. Terlahir sebagai perempuan telah menjadikan perempuan target mata rantai kekerasan sepanjang hidupnya, mulai dari mutilasi genital, pembunuhan bayi perempuan (*female infanticide*), kekurangan gizi (*food deprivation*) sejak masa kanak-kanak, kekerasan dan kejahatan seksual di masa dewasa (Espiritu, 1996).

Kaum perempuan bisa dikatakan sebagai makhluk yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan karena posisinya yang lemah ataupun sengaja dilemahkan, baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun secara budaya. Febriasih, dkk, (2008) mengatakan ada beberapa definisi mengenai arti dan makna kekerasan terhadap perempuan (KTP), yaitu sebagai berikut:

Pertama, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak azasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk

di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kedua, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik, maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan). Ketiga, kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Keempat, kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya.

### **E. Agama dan Kekerasan**

Tidak semua kekerasan di dunia ini mempunyai basis keagamaan. Tetapi, dalam kenyataannya, banyak sekali kekerasan terjadi atas nama agama. Charles Tilly, dkk. (2007) dalam bukunya yang berjudul: *Contentious Politics* menyebutnya sebagai “*lethal conflicts*”. Agama dan etnisitas (*religion and ethnicity*) bangkit menjadi sentimen yang mampu memobilisasi konflik dalam bentuknya yang luas dan eskalatif. Di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia, kita menyaksikan bahwa misi dan eksistensi agama yang selama ini diperjuangkan sebagai juru damai, tiba-tiba tampil bersama sentimen etnis sebagai senjata perusak dan pembunuh (*weaponry of disruption and killing*). Gejala dan peristiwa seperti ini sesungguhnya sudah terjadi di berbagai negara seperti halnya di Irlandia, Israel, India, Balkan, Sarajewo, Yugoslavia, bahkan tahun 2017 ada konflik

dan kekerasan terbesar yang terkait agama di Rakhine state Myanmar dan di Timur Tengah tepatnya di Yerusalem. Kekerasan ini dipicu oleh statement kontroversial dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkata akan mendukung pemindahan ibukota Israel dari Tel Afif ke Yerusalem. Menurut Data MetroTV hingga pekan ketiga Desember 2017, sudah ada puluhan korban jiwa dari warga Palestina, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka dan cedera.

Demikianlah dari hari ke hari muncul berita: terror atas nama Islam; pengeboman oleh orang-orang Kristen dan Katolik; pembunuhan oleh pengikut Hindu dan Budha; pembantaian di Afrika; perang antara umat Katolik, Ortodoks dan Muslim; penindasan terhadap keadilan sosial di Amerika Latin, dan lain-lain. Terror ini biasanya meluas. Apakah agama masih terus mengilhami orang-orang untuk menggunakan kekuatan, melegitimasi kekerasan dan kematian?

Tidak ada yang mengingkari, bahwa berakhirnya Perang Dingin dan konfrontasi antara Timur dan Barat dekade terakhir (abad dua puluh) telah menimbulkan Revolusi Politik yang luar biasa. Namun demikian, fakta ini juga menimbulkan peningkatan yang mengejutkan, yakni kekerasan yang diwarnai oleh agama. Konflik etnis, nasional, dan sosial meletus di hampir semua tempat di belahan dunia, di mana dalam setiap kawasan agama memainkan peran yang membahayakan. Konflik juga semakin meningkat ketika agama menjadi sumber langsung kekerasan.

Masalah ini, yang beberapa di antaranya adalah problem lama dan ada juga problem yang baru, perlu dipahami; kita perlu menangkap makna antropologis, sosial, budaya, dan etnologisnya.

Kekerasan ada dalam setiap masyarakat. Kekerasan bisa fisik, bisa simbolik. Ia bisa diterima atau diderita. Kekerasan muncul dalam rekonstruksi, reproduksi ataupun transformasi hubungan sosial. Sejak negara muncul, negara membangun dirinya di atas kekerasan, dan

Max Weber menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang absah merupakan salah satu karakteristik negara. Ada juga pemikir yang menyatakan bahwa, sebab kekerasan harus dicari dalam diri manusia.

Secara apologis kiranya sangat mudah menyatakan bahwa kandungan agama-agama di dunia pada dasarnya adalah *non-violent* (anti-kekerasan), dan manusialah, baik secara individu atau kolektif, yang menyelewengkan maknanya. Kenyataannya akar kekerasan dapat dilacak ulang dalam kekerasan agama, dan itulah sebabnya agama bisa dengan mudah menjadi kendaraan bagi kecenderungan kekerasan. Di bawah ini adalah beberapa contoh singkat menyangkut kenyataan tersebut.

Pengorbanan merupakan unsur sangat penting bagi kebanyakan agama. Teori-teori Rene Girard sangat terkenal. Ia menjelaskan watak dasar kekerasan dan peran pengorbanan sebagai cara untuk melepaskan diri dari kekerasan. Di sini pengorbanan semakin menjadi ritual, muncul dalam kekuatan simbolis. Ia memberi bentuk yang lebih abstrak pada kekerasan. Sakralisasi kekerasan memungkinkan untuk membedakannya dengan kekerasan yang tanpa dasar hukum (*lawless violence*), yang tidak bisa diterima. Jelas, semua ini juga bisa ditemukan dalam kejadian masa kini, seperti kenyataan bahwa GIA Aljazair memenggal leher korbannya.

Pertentangan antara yang baik dan yang jahat merupakan sumber lain dari kekerasan yang terkait erat dengan agama. Ada 3 (tiga) mekanisme yang berperan dalam kaitannya dengan hubungan antara agama dan kekerasan dalam fungsi masyarakat. Pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial; Kedua, agama sebagai faktor identitas; dan Ketiga, legitimasi etis atau delegitimasi dari hubungan sosial tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi salah satu kawasan di dunia yang paling produktif dalam memproduksi aneka

kisah tragis di sekitar kekerasan atas nama agama. Dengannya, menempatkan negeri ini sebagai “perpustakaan” maha luas yang menyimpan arsip berbasis pengalaman diri mengenai berbagai variasi kekerasan yang menjadikan agama sebagai pembenar. Beberapa kasus selektif yang direkam media massa berikut ini memberikan gambaran cukup menyeluruh mengenai isu ini, berikut variasinya.

Pertama, kekerasan yang berlangsung dalam ranah agama yang sama. Dari sudut aktor yang terlibat, terdapat variasi-variasi antara lain: (a) kekerasan yang melibatkan ormas dalam komunitas agama yang sama; (b) kekerasan yang melibatkan negara yang bertindak atas nama agama resmi dalam merepresi “aliran sesat” dalam satu agama; (c) kekerasan yang melibatkan komunitas dari agama yang sama; (d) kekerasan yang melibatkan institusi pemegang otoritas agama atas warga dari komunitas agama yang sama.

Kedua, kekerasan yang melibatkan agama yang berbeda. Dari sudut aktor yang terlibat, terdapat variasi pola, yaitu: (a) kekerasan yang melibatkan ormas satu agama atas komunitas dari agama lain; (b) kekerasan yang melibatkan ormas dari komunitas agama yang berbeda; (c) kekerasan atas kelompok yang melibatkan negara melalui pengaturan tertentu.

Ketiga, kekerasan satu kelompok agama atas kelompok lain yang melakukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama. Variasi polanya berupa: (a) kekerasan dilakukan ormas agama atas aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai simbol kemaksiatan, dan sejenisnya; (b) kekerasan atas nama agama oleh kelompok masyarakat yang ditujukan pada aktivitas-aktivitas yang didakwa sebagai simbol kemaksiatan, dan sejenisnya.

Terakhir, perlu dibangun komunikasi di antara para pemimpin agama, ataupun tokoh etnik/adat di semua level kehidupan bermasyarakat, seyogyanya semua pemimpin agama dan para tokoh

masyarakat dapat duduk bersama dalam satu forum untuk membicarakan masalah-masalah kekerasan yang terjadi atas nama agama dan juga budaya, supaya dapat dicarikan penyelesaian dan jalan keluar (*solution*).

Dialog dan komunikasi antar pemimpin kelompok dan antar elit agama dalam konteks pluralisme etnik dan agama, akan tertuju pada upaya membangun rekonsiliasi, apresiasi dan penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia, menghormati perbedaan, toleran, berkeadilan sosial, solidaritas sosial, dsb. Dialog yang kreatif dan produktif akan melahirkan solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para penganut umat beragama, sehingga dapat tercipta kedamaian, toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama yang berkelanjutan dan berjangka panjang.

Termasuk juga upaya meluruskan pendapat “keliru” bahwa Islam sebagai agama kekerasan. Agama Islam adalah agama perdamaian sebagai “*rahmatan lil aalamin*”, bukan sebaliknya.

# Bab 7

## Analisis, Pemetaan, Resolusi Konflik dan Perdamaian

*What you do is of little significance  
But it is very important that you can do it.*  
Mahatma Gandhi

### A. Pengantar

Pepatah Cina mengatakan bahwa “jika anda tidak pernah bertikai dengan orang lain, anda tidak akan mengenal satu sama lain”. Pepatah Cina tersebut seolah-olah benar adanya, karena dalam kehidupan sosial utamanya dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang ditandai oleh adanya perbedaan dan keberagaman (*plural society*) atau masyarakat majemuk (Furnivall, 1944), peluang untuk bertikai dan bekerjasama selalu muncul ke permukaan.

Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Hal tersebut terjadi karena: pertama, setiap manusia memiliki sejarah dan karakter yang unik. Kedua, setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Ketiga, setiap manusia dilahirkan dalam suatu cara hidup tertentu: orang desa primitif yang kolot (*jadul*) dan orang kota maju-modern yang tinggal di apartemen mewah dan megah, memiliki perbedaan pengalaman, dan perbedaan pandangan tentang dunia dan tempat hidup mereka. Keempat, setiap manusia memiliki nilai-nilai (*values*),

yang memandu pikiran dan perilaku serta memotivasi manusia dalam mengambil tindakan tertentu dan untuk menolak tindakan lainnya.

Perbedaan-perbedaan (*diversities*) berbagai kelompok masyarakat tersebut baik terkait perbedaan agama, suku bangsa, budaya, bahasa, pekerjaan, daerah asal, kepentingan, dan lain-lain, pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan intensitas hubungan-hubungan sosial di antara mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam interaksi sosial dengan orang atau kelompok sosial lain, kita mengalami bahwa pandangan mereka tentang sesuatu hal berbeda (*difference*). Hal ini merupakan realitas naif (*naive reality*) yang dijumpai dalam semua kelompok masyarakat di dunia, tidak hanya pada masyarakat perkotaan tetapi juga dalam masyarakat pedesaan.

## **B. Analisis dan Pemetaan Konflik**

Ilmu sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan, pembatasan, mengelola, atau menangkal konflik-konflik (sosial). Ketika masyarakat mengalami konflik, baik konflik secara vertikal maupun konflik secara horisontal, hal ini perlu dianalisis. Analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan.

Analisis konflik dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat bantu, teknik yang sederhana, praktis dan yang sesuai dengan kebutuhan. Mengapa kita perlu menganalisis konflik? Fisher, dkk (2001:17-18) mengatakan bahwa: pertama, untuk memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian saat ini. Kedua, untuk mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang menonjol saja. Ketiga, untuk memahami pan-



dangan semua kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain terbentuk. Keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik. Kelima, untuk belajar dari kegagalan dan juga kesuksesan.

Analisis konflik bukan merupakan kegiatan satu kali saja. Analisis konflik merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus seiring dengan perkembangan situasi, sehingga anda dapat menyesuaikan tindakan-tindakan dengan berbagai faktor, dinamika, dan keadaan yang berubah.

Alat bantu untuk menganalisis situasi konflik berupa penahapan konflik menurut Fisher dkk. (2001:19) terdiri dari:

Pertama, tahapan prakonflik. Tahapan ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

Kedua, tahapan konfrontasi: pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung pada masing-masing pihak.

Ketiga, tahapan krisis. Tahapan ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam

konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua belah pihak terbunuh. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan terputus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-(pihak) lainnya.

Keempat, tahapan akibat. Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan dan menyelesaikan pertikaian. Apa pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

Kelima, tahapan pascakonflik. Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Dalam realitas peristiwa konflik yang terjadi pada semua level dan jenis konflik di masyarakat, penahapan konflik Simon Fisher tersebut terkadang tidak berlangsung sesuai tahapan-tahapan konflik tersebut (sesuai dengan teori), akan tetapi sering terjadi tumpang tindih, saling bersilangan, atau terjadi pola maju mundur (*zig zag*). Oleh karena itu, dalam penerapannya harus diterapkan secara fleksibel, tidak kaku, serta dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor lain di luar konflik sesuai kebutuhan, untuk mendapatkan hasil yang baik.

Sekedar contoh analisis sebuah peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat adalah dapat disimak pada hasil penelitian tentang konflik yang dilakukan oleh Darmin Tuwu. Penelitian Tuwu (2009), menganalisis konflik yang terjadi antara Pemkot Bau-Bau dengan Pemkab Buton. Dalam konteks konflik antara Pemkot Bau-Bau versus Pemkab Buton, penahapan konflik Simon Fisher, utamanya tahapan konflik "pascakonflik" tidak tampak dalam hasil penelitian dan analisis konflik. Hal tersebut disebabkan oleh karena konflik yang terjadi antara dua pemerintahan daerah tersebut belum tuntas atau periodisasi konfliknya belum selesai sampai sekarang. Periode konflik sudah berlangsung relatif lama yaitu hampir berlangsung dua dasa warsa (2001-2017), namun konflik di antara keduanya belum juga selesai sampai sekarang. Yang menjadi obyek konflik adalah bangunan, gedung-gedung perkantoran, dan rumah-rumah dinas Pemkab Buton yang berada dalam wilayah Pemkot Bau-Bau. Karena obyek konflik adalah aset daerah, maka konfliknya disebut dengan "konflik aset daerah". Konflik aset daerah antara Pemkab Buton dengan Pemkot Bau-Bau tidak melewati tahapan pascakonflik. Fakta empirik konflik aset daerah adalah hingga akhir Desember 2017, konflik aset tersebut belum selesai, namun yang tampak dalam analisis konflik hanya terjadi kemacetan (*dead lock*). Konflik aset daerah antara dua pemerintahan daerah ini tidak menemukan penyelesaian yang tuntas berupa "*win-win solution*". Meskipun sudah berusaha difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat (Mendagri) pada awal-awal pecahnya konflik tahun 2002, namun tetap gagal. Realitas existingnya adalah konflik masih ada dan masih bisa meledak kembali setiap saat, tergantung situasi dan konteks sosial politik yang berkembang.

Analisis konflik yang lain dapat dijumpai dalam kasus peristiwa konflik di Universitas Halu Oleo Kendari. Hasil penelitian

Darmin Tuwu (2011) tentang konflik Unhalu Kendari menemukan bahwa konflik Unhalu tidak ada tahapan pascakonflik, dalam setiap peristiwa konflik yang terjadi di Unhalu proses penyelesaiannya belum tuntas dilakukan (secara substantif), melainkan hanyalah terjadi "dead lock". Hal tersebut terjadi karena penyelesaian konflik belum menyentuh akar permasalahannya. Oleh karena akar konflik dan kekerasan belum tuntas, maka situasi konflik menjadi diam sejenak, terpendam, dan konflik dan kekerasan akan mencuat kembali ke permukaan setelah ada pemicu konflik (*conflict trigger*) seperti rasa ketidakadilan, perlakuan diskriminasi, represi dan intimidasi, dominasi, penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi politik yang langka, kepentingan yang tidak terakomodir, dan lain-lain.

Intensitas konflik dan kekerasan yang terjadi di Kampus Unhalu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal kampus. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Di antara faktor pemicu terjadinya konflik sehingga peristiwa konflik kembali "pecah" dan mencuat ke permukaan adalah karena masih jamaknya dijumpai fenomena kekerasan (*conflict with violence*) dipraktekkan, tidak hanya di sekitar kampus tetapi juga di dalam lingkungan kampus. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa budaya kekerasan (*culture of violence*) masih akan terus berlangsung disebabkan oleh tindak kekerasan masih sering dipraktekkan di kampus, tidak hanya kekerasan simbolik (*symbolic violence*) tetapi juga kekerasan fisik (*physical violence*) (Galtung, 2003).

Terkait dengan konflik dan perdamaian, Lambang Trijono mengatakan bahwa analisis konflik meliputi: akar konflik yang masih ada, pendorong konflik dan dampak konflik, dikurangi akar perdamaian, pendorong perdamaian, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh warga masyarakat. Akar konflik merupakan sebab-sebab struktural, kultural, dan tindakan individual atas terjadinya konflik.

Sebab-sebab ini sudah ada sejak sebelum konflik terjadi dan muncul menjadi konflik terbuka dalam berbagai bentuk ketika konflik berlangsung. Bentuknya bisa kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan, pengangguran, represi politik, alienasi budaya, polarisasi sosial, dan sebagainya. Pendorong konflik adalah faktor-faktor yang membuat akar konflik mencuat kembali ke permukaan menjadi konflik terbuka. Bentuknya bisa perubahan disengaja seperti kebijakan atau perubahan tidak disengaja dalam masyarakat. Dampak konflik adalah akibat-akibat yang ditimbulkan konflik pada kehidupan sosial, seperti kekerasan, kerusakan, kesenjangan berlanjut, segregasi sosial, kemiskinan, pengangguran baru, dan sebagainya (Triyono, 2007).

Sedangkan akar perdamaian adalah nilai-nilai perdamaian yang hidup dalam masyarakat. Pendorong perdamaian merupakan lembaga-lembaga yang selama ini digunakan sebagai penyelesaian konflik dan masih efektif sebagai pemangku perdamaian. Sedangkan upaya perdamaian adalah usaha-usaha dan agenda-agenda yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengatasi konflik. Bentuknya bisa tekanan, arbitrase, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi.

Setiap peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dan dipetakan (*conflict mapping*), baik berdasarkan jenis konflik yang terjadi, konteks, isu konflik, aktor konflik, maupun resolusi konflik. Analisis dan pemetaan konflik tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Anda dalam menentukan *action* untuk menangani dan menyelesaikan peristiwa konflik.

Simon Fisher, dkk. (2001) menyatakan bahwa dalam menganalisis situasi peristiwa konflik, maka dibutuhkan alat-alat bantu. Alat-alat bantu tersebut antara lain dengan menggunakan pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak

yang bermasalah (bertikai); antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Cara memetakan suatu situasi konflik, antara lain:

1. Tentukan apa yang ingin dipetakan, kapan dan dari sudut pandang apa. Akan lebih bermanfaat jika pemetaan situasi yang sama dilakukan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda dan memperhatikan bagaimana pihak-pihak yang berbeda menanggapi.
2. Jangan lupa menempatkan diri dalam peta. Menempatkan diri dalam peta berarti mengingatkan bagian dari situasi, bukan di luar situasi.
3. Pemetaan bersifat dinamis yaitu mencerminkan suatu keadaan tertentu dalam suatu situasi yang berubah dan menuntun ke arah tindakan.

Selain Simon Fisher, dkk, Paul Wehr juga memiliki kerangka pemetaan konflik. Adapun kerangka pemetaan konflik menurut Paul Wehr (dalam Trijono dkk., (Ed.) 2004), yaitu mengurai konflik dengan menjelaskan bekerjanya elemen-elemen konflik sebagai berikut:

1. Konteks atau situasi yang melatar belakangi konflik.
2. Pihak-pihak yang terlibat, langsung dan tidak langsung dalam konflik dan upaya perdamaian.
3. Isu atau masalah yang diidentifikasi sebagai objek konflik.
4. Dinamika konflik.
5. Alternatif pemecahan masalah (resolusi konflik).

*Konteks* atau situasi dari konflik yang sedang atau telah berlangsung. Situasi/setting konteks yang dimaksud di sini mencakup latar sosial dan ekonomi pada konflik yang berlangsung dalam tempat dan waktu tertentu.

*Pihak-pihak yang berkonflik*, yaitu unit-unit pengambilan keputusan, baik individu, kelompok yang langsung maupun tidak langsung

terlibat konflik. Mereka adalah pihak-pihak yang memiliki pilihan tertentu terhadap hasil yang akan dicapai dalam suatu situasi konflik. Pilihan itu merupakan ungkapan kongkrit kepentingan mereka yang seringkali didasarkan pada keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka.

Isu yang dikonflikkan yaitu mencakup topik atau hal yang dikonflikkan. Isu ini bisa bervariasi dan pihak yang berkonflik bisa memiliki pilihan yang berbeda-beda dalam tempat, waktu, dan isu yang berbeda. Sedangkan dinamika konflik yaitu pasang surut, eskalasi konflik dan kecenderungan persekutuan, permusuhan, dan pemisahan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dinamika konflik menurut Trijono (2001) meliputi proses kemunculan (*emergence*), peningkatan (*escalation*), konflik meletus (*outbreak of conflict*), dan penurunan (*deescalation*).

Adapun resolusi konflik adalah menyangkut cara-cara penanganan konflik dan penyelesaian masalah konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pemetaan konflik menurut Paul Wehr tersebut telah banyak digunakan oleh kalangan peneliti konflik, maupun kalangan akademik yang *concern* dengan masalah konflik, kekerasan dan perdamaian, dalam memetakan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Saya sendiri pun menggunakan pemetaan Paul Wehr dalam meneliti masalah konflik, kekerasan dan perdamaian. Penelitian pertama, yaitu penelitian untuk Tesis saya di Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2009. Dalam kerangka analisis, saya menggunakan pemetaan Paul Wehr dalam memetakan dan menganalisis peristiwa konflik yang terjadi. Konteks konflik digunakan ketika menganalisis rentetan peristiwa yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa konflik. Dalam konteks konflik perebutan, penguasaan, dan pengelolaan aset daerah dalam pemekaran wilayah (peningkatan status Kotif Bau-Bau menjadi Kota Bau-Bau tahun

2001) antara Pemerintah Kabupaten Buton (kabupaten induk) dengan Pemerintah Kota Bau-Bau (daerah pemekaran), konflik terjadi karena dipicu oleh “perbedaan dan “kesalahan” dalam membaca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001” Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Penelitian *kedua*, adalah penelitian saya yang didanai oleh BLU-DIPA Unhalu Tahun 2011, yang berjudul: “Merajut Perdamaian Kampus Unhalu”. Analisis dan pemetaan konflik juga diberikan untuk mengatasi konflik Unhalu. Demikian pula tulisan-tulisan saya pada halaman opini tentang konflik dan kekerasan yang telah dipublikasi di media massa lokal yaitu Kendari Pos juga menggunakan kerangka analisis Paul Wehr.

### **C. Teori Resolusi Konflik**

Sebuah peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat, entah ia skala besar ataupun kecil, sebaiknya segera ditangani dengan cepat, dan harus diselesaikan dengan tuntas sampai ke akar masalah, agar eskalasi konflik tidak meningkat, supaya wilayah konflik tidak meluas, dan supaya akibat dari konflik tidak menimbulkan kerugian dan korban yang lebih banyak lagi. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan dan mengeliminasi segala bentuk kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh konflik dan kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.

Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bertikai dan bermusuhan. Resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Sementara itu transformasi konflik adalah strategi yang



paling menyeluruh dan luas, yang juga merupakan strategi yang membutuhkan komitmen yang paling lama dan paling luas cakupannya.

Untuk menyelesaikan suatu konflik, biasanya dibutuhkan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu mereka yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Masuknya pihak ketiga dapat mengubah struktur konflik dan menimbulkan sebuah pola komunikasi yang berbeda. Pihak ketiga memungkinkan menyaring atau melihat kembali pesan, sikap dan perilaku yang berkonflik. Penyelesaian konflik menurut Fisher dkk. (2001) dapat dilakukan dengan cara:

1. Membangkitkan kepercayaan; membangkitkan kembali dan meningkatkan saling percaya dan keyakinan di antara pihak-pihak yang berkonflik.
2. Memfasilitasi dialog; memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung.
3. Negosiasi; suatu proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
4. Mediasi, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
5. Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa; tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Dalam masyarakat ada banyak bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial. Bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial menurut Nasikun (2007:27-31) ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*),

2. Mediasi (*mediation*), dan
3. Perwasitan (*arbitration*).

Bentuk pengendalian konflik-konflik sosial yang pertama, adalah konsiliasi (*conciliation*), merupakan pengendalian yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Pada umumnya, mengambil contoh di dalam kehidupan politik, lembaga-lembaga semacam itu berupa badan-badan yang bersifat parlementer atau *quasi parlementer*, di mana berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka saling bertemu satu sama lain untuk mewujudkan pertentangan-pertentangan mereka melalui cara-cara yang bersifat damai. Dalam pada itu, agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif, lembaga-lembaga yang dimaksud harus memenuhi sedikitnya empat hal berikut:

1. Lembaga-lembaga tersebut harus merupakan lembaga-lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya.
2. Kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian.
3. Peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para anggotanya.
4. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, yakni setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyata-

kan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Tanpa hadirnya keempat hal tersebut, menurut Nasikun, maka konflik-konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan sosial akan menyelinap ke bawah permukaan, yang pada saatnya tanpa dapat diduga sebelumnya akan meledak ke dalam bentuk kekerasan. Namun demikian, semuanya itu hanya mungkin diselenggarakan apabila kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu sendiri mampu memenuhi tiga macam prasyarat berikut:

1. Masing-masing kelompok yang terlibat di dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka, karena itu menyadari pula perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak.
2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas. Sejauh kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan berada di dalam keadaan tidak terorganisir, maka pengendalian atas konflik-konflik yang terjadi di antara mereka pun akan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya, konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang terorganisir akan lebih mudah melembaga, dan oleh karena itu akan lebih mudah dikendalikan pula.
3. Setiap kelompok yang terlibat di dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu, suatu hal yang akan memungkinkan hubungan-hubungan sosial di antara mereka menemukan suatu pola tertentu. Aturan-aturan permainan tersebut, pada gilirannya justru menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri oleh karena dengan demikian ketidakadilan akan dapat dihindarkan, memungkinkan tiap kelompok dapat meramalkan

tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kelompok yang lain, serta menghindarkan munculnya pihak ketiga yang akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Tanpa semua itu, maka lembaga-lembaga diskusi macam apa pun tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Sebaliknya, konflik justru akan menjadi semakin parah. Dalam keadaan yang demikian, maka suatu cara pengendalian konflik yang lain dibutuhkan apabila kedua belah pihak yang bertentangan tidak menghendaki kemungkinan timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Cara pengendalian yang demikian berupa apa yang disebut mediasi.

Bentuk pengendalian konflik-konflik sosial yang *kedua* adalah mediasi (*mediation*), yakni kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan “nasihat-nasihat”-nya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun nasihat-nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif karena memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengurangi irasionalitas yang biasanya timbul di dalam setiap konflik, memungkinkan pihak-pihak yang bertentangan menarik diri tanpa harus kehilangan muka, mengurangi pemborosan yang dikeluarkan untuk membiayai pertentangan dan lain sebagainya.

Apabila cara pengendalian inipun masih tidak cukup efektif, maka suatu cara pengendalian yang ketiga, yakni apa yang biasa disebut sebagai perwasitan (*arbitration*), mungkin sekali akan timbul. Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertikai bersepakat untuk menerima atau “terpaksa” menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Di dalam bentuk mediasi, kedua belah pihak yang bertentangan menyetujui untuk menerima pihak

ketiga sebagai wasit, akan tetapi mereka bebas untuk menerima atau menolak keputusan-keputusan wasit. Lebih daripada mediasi, sebaliknya, suatu perwasitan menempatkan kedua belah pihak yang bertentangan pada kedudukan untuk harus menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit.

Ketiga jenis pengendalian konflik tersebut di atas, baik dipandang sebagai cara-cara pengendalian konflik yang bertingkat-tingkat maupun berdiri sendiri-sendiri, memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Sejauh hubungan-hubungan sosial berdasarkan ketiga jenis mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial tersebut berkembang, maka konflik-konflik sosial akan kehilangan pengaruhnya yang merusak. Sebaliknya, konflik-konflik tersebut akan menjelma ke dalam pola hubungan-hubungan sosial yang melembaga, suatu hal yang akan dapat meredusir kegoncangan-kegoncangan sosial yang bersifat revolusioner menjadi perubahan-perubahan yang bersifat evolusioner. Dengan perkataan lain, melalui mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial yang efektif, konflik-konflik sosial di antara berbagai-bagai kelompok kepentingan justru akan menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang tidak akan mengenal akhir. Ketiga bentuk pengendalian konflik yang dikemukakan di atas, yakni konsiliasi, mediasi dan arbitrase dapat dilaksanakan secara berurutan atau dapat pula diterapkan secara terpisah-pisah sesuai dengan situasi konflik-konflik sosial yang terjadi.

Terkait dengan resolusi konflik, terutama konflik yang disertai dengan kekerasan (*conflict with violence*) yang melibatkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda, atau konflik berbasis suku-bangsa dan agama (konflik komunal), bangsa Indonesia menyimpan sejarah panjang, terutama pasca lengsernya Soeharto sebagai simbol

penguasa Orde Baru. Dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat, konflik dengan kekerasan justru lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Bagian Timur, baik konflik dalam skala kecil maupun konflik dalam skala besar. Penyelesaian konflik dalam skala kecil relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan penyelesaian konflik dalam skala besar, hal tersebut dikarenakan oleh kompleksitas variabel yang melingkupi setiap konflik skala besar. Beberapa contoh konflik kekerasan dalam skala besar di Indonesia yang berbasis etnik dan agama adalah konflik Poso (Sulawesi Tengah), konflik Sampit-Kalimantan yang melibatkan suku Dayak dengan suku Madura, konflik Maluku Ambon, yang melibatkan etnik lokal dengan etnik pendatang (Bugis, Buton, Makassar) yang disertai sentimen agama yang melibatkan muslim dengan non-muslim, serta konflik Maluku Utara.

Dalam menyelesaikan peristiwa konflik skala besar seperti yang terjadi di Maluku, berdasarkan pada pengalaman praktis dalam menangani konflik, menurut Jakob dalam Trijono (2001), cara-cara yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: Pertama, melenyapkan kegawatan suasana, korban ditolong berturut-turut yang cedera parah, yang memang sudah sakit sebelumnya, anak-anak dan perempuan. Keluarga yang terpisah dipersatukan kembali. Kedua, diusahakan kebutuhan yang sangat pokok, yaitu makanan, tempat berteduh dan pelayanan kesehatan. Kebiasaan nasional yang buruk, yang mengkorupsi bantuan, harus ditinggalkan sama sekali. Ketiga, arus informasi, transportasi, dan energi diupayakan pulih kembali. Bencana susulan yang bersifat sekunder harus dicegah: perampok dan pencuri, turis, dan rombongan pembesar yang berkunjung sejam dua jam tetapi memerlukan persiapan keamanan dan protokol yang lama dan mahal serta mengganggu pemberian bantuan. Keempat, rehabilitasi kerusakan: kediaman, jalan, toko-toko, rumah ibadah, sekolah, kantor,

sarana produksi dan distribusi. Keamanan harus terus diperhatikan dengan *razzia* senjata. Kelima, rekonsiliasi diusahakan dengan memanfaatkan inisiatif dan kemauan dari dalam masyarakat sendiri, dibantu oleh adat, agama, hukum dan mediasi dari luar. Pelaku-pelaku yang membuat kesalahan besar dalam keonaran itu harus diadili. Terakhir, ada usaha khusus untuk mencegah kerusuhan menyala kembali, karena masyarakat masih sangat sensitif dan akal sehat tidak begitu berperan dalam suasana pasca-onar.

#### **D. Resolusi Konflik dan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal**

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian terdahulu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*plural societies*), namun majemuk bukan dalam pengertian Furnivall, tetapi majemuk dalam konteks masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang. Pierre I. van den Berghe (1969) dalam Nasikun (2007:40-41) menyebutkan beberapa karakteristik sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Saya menggaris bawahi pada poin keempat, van den Berghe mengatakan bahwa secara relatif masyarakat majemuk itu seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan

kelompok yang lain. Secara implisit, van den Berghe setuju dengan pendapat para teoritis konflik bahwa konflik merupakan gejala yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat, dan konflik tidak mungkin bisa dilenyapkan, ia hanya akan lenyap bersama dengan lenyapnya masyarakat itu sendiri.

Namun yang patut dicatat bahwa perbedaan-perbedaan (*diversities*) yang ada dalam setiap masyarakat seperti perbedaan suku-bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan kebudayaan, perbedaan agama, perbedaan jenis pekerjaan, dan segala perbedaan kultural lainnya tidak secara “serta merta” menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang beragam (*plural societies*) tersebut. Sebuah peristiwa konflik dapat terjadi dalam masyarakat karena ada faktor pemicunya (*trigger*). Dengan demikian, meskipun terjadi perbedaan-perbedaan (*diversities*) di antara berbagai kelompok-kelompok masyarakat, namun tidak secara otomatis konflik dan kekerasan terjadi. Konflik dengan kekerasan baru akan pecah ke permukaan jika ada faktor-faktor pemicu yang mendahuluinya. Faktor pemicu konflik bermacam-macam mulai dari hal-hal sepele seperti: mengganggu, mengejek, mengolok-olok, meneriaki, menghina, dll, sampai kepada hal-hal yang serius seperti: pemukulan, pengeroyokan, perkelahian, pembunuhan, perlakuan diskriminasi yang tajam, ketidakadilan, penekanan yang sangat (*serious oppression*) dan lain-lain.

Dalam kehidupan masyarakat dijumpai ada dua kekuatan yang saling berlawanan yaitu kekuatan perusak (*destructive power*) atau memecah belah dan kekuatan membangun atau kekuatan integratif (*integration power*). Terkait dengan resolusi konflik dan upaya perdamaian, pada bagian ini akan dibahas kekuatan-kekuatan apa saja yang terdapat dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya peristiwa konflik (agar konflik tidak terjadi), atau jika konflik sudah terjadi, bagaimana membatasi konflik yang terjadi



supaya konflik tidak meluas ke mana-mana, serta nilai-nilai apa yang mendorong terciptanya keamanan dan perdamaian secara berkelanjutan dalam masyarakat.

Mari kita mulai dengan menengok salah satu asumsi dasar dari teori struktural fungsional Talcott Parsons dalam Ritzer, dkk (2009:256) bahwa suatu sistem sosial (masyarakat) akan senantiasa terintegrasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat umum.

Dalam analisis sistem sosialnya, selain perhatian pada status-peran, Parsons dalam Ritzer, dkk (2009:260) terutama tertarik pada komponen sistem sosial skala-besar seperti kolektivitas, norma dan nilai. Ia menguraikan sejumlah prasyarat fungsional bagi sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus terstrukturkan sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi secara baik dengan sistem lain. Kedua, agar dapat bertahan hidup, sistem sosial harus didukung sepenuhnya oleh sistem lain. Ketiga, sistem harus secara signifikan memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya. Keempat, sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. Kelima, sistem paling tidak harus memiliki kontrol minimum terhadap perilaku yang berpotensi merusak. Keenam, jika konflik menjadi sesuatu yang menimbulkan kerusakan signifikan, ia harus dikontrol. Akhirnya, sistem sosial memerlukan bahasa agar bertahan hidup.

Terkait dengan upaya perdamaian (*peace building*) untuk menciptakan keamanan dan mencegah konflik dan/atau mengatasi peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat, upaya perdamaian dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, baik di tingkat nasional/internasional maupun pada tingkat lokal.

Di tingkat lokal, ada nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang tetap terjaga dan dipertahankan oleh pendukungnya sampai sekarang untuk merawat dan menjaga keamanan dan perdamaian di wilayahnya. Salah satu kearifan lokal yang masih terjaga dan dipertahankan oleh

pendukungnya sampai sekarang adalah “*parabela*<sup>7</sup>” yang ada dalam budaya Buton di Sulawesi Tenggara. *Parabela* pada masyarakat suku Buton dapat diartikan sebagai tokoh adat atau tokoh masyarakat yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Eksistensi *Parabela* dalam masyarakat suku Buton dianggap sebagai sesuatu yang sangat menentukan aman tidaknya atau berkah tidaknya suatu kampung yang dihuni oleh masyarakat.

Dalam masyarakat Buton, tidak semua orang Buton bisa diangkat menjadi seorang *parabela*, karena peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang *parabela* besar. Untuk menjadi seorang *parabela* harus memenuhi beberapa persyaratan. Dalam masyarakat Buton, persyaratan untuk menjadi seorang *parabela* tidak hanya memiliki kharisma saja di dalam dirinya, tetapi juga ia harus memiliki hal-hal berikut: *akabala* (sakti), *atomaeka* (berwibawa), *aumane* (pemberani), *akoadati* (berdasarkan adat), *atomasiaka* (dicintai atau disayangi warga), *atobungkale* (terbuka), dan *akosabara* (sabar).

Peran *parabela* dalam budaya Buton sangat besar sekali. *Parabela* tidak hanya berperan menjaga keamanan dan menciptakan perdamaian kampung (*kadie*) yang dipimpinnya, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan, dan keutuhan wilayah kampung (sistem sosial) secara keseluruhan dari gangguan, rongrongan, ancaman, dan serangan musuh yang hendak merusak kelestarian hutan atau yang hendak merusak dan mengganggu keamanan *kadie* yang dipimpinnya secara keseluruhan.

Hasil penelitian Rahman (2003), dan Tahara (2014) terkait peran *parabela*, menemukan bahwa peran *parabela* sangat besar

---

<sup>7</sup> *Parabela* adalah pemimpin adat dalam wilayah *kadie* (desa) dalam masyarakat Buton.

dalam mencegah konflik dan menciptakan perdamaian di lingkungan yang dipimpinnya. Peran *parabela* dapat terlihat antara lain dalam peristiwa konflik kekerasan yang terjadi di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara pada Hari Jum`at tanggal 26 Januari 2001 yang melibatkan sub etnik Katobengke dengan warga Wameo etnik Buton yang dibantu oleh pengungsi Ambon. Para eksodus Ambon ini secara kultural masih mempunyai kedekatan hubungan emosional dengan warga Wameo. Jadi secara kultural orang Katobengke dengan orang Wameo dan eksodus Ambon berbeda, sehingga membuat konflik mudah mencuat ke permukaan, di samping juga disebabkan oleh adanya kebencian dan dendam-dendam lama yang tersimpan dan terpendam yang belum terselesaikan dengan tuntas.

Peristiwa konflik Bau-Bau ini dipicu oleh terbunuhnya dua orang polisi yang berasal dari Wameo oleh oknum orang Katobengke pada tanggal 25 Januari 2001. Dua orang polisi warga Wameo tersebut baru saja pulang bertugas dari Batauga Kabupaten Buton (berbatasan dengan Kota bau-Bau), dan ketika mereka melintas di Jalan depan SMAN 3 Bau-Bau, yang lokasinya terletak di Kelurahan Katobengke, mereka dikeroyok oleh orang-orang Katobengke hingga tewas. Dua Polisi tersebut dikeroyok oleh orang Katobengke karena diduga mereka telah meledakan bom dengan kekuatan kecil yang memecahkan beberapa kaca ruang kelas di SMAN 3 Bau-Bau (Tahara, 2014:178).

Peristiwa terbunuhnya dua orang polisi warga Wameo tersebut spontan memancing emosi, kemarahan dan dendam warga Wameo yang dibantu oleh warga eksodus Ambon yang tinggal di Wakonti untuk melakukan serangan balik sebagai upaya balas dendam. Ribuan warga Wameo yang dibantu oleh warga eksodus Ambon, dan juga warga kelurahan lain yang punya kedekatan emosional dan kultural dengan warga Wameo seperti Kaobula, Nganganaumala, Tarafu,

Bone-Bone, dan warga sekitar<sup>8</sup> berkumpul bersama untuk menyerang orang Katobengke. Mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap seperti parang, tombak, bom rakitan, dan senjata rakitan disertai teriakan: “*bunuh orang Katobengke, bakar orang Katobengke*”. Situasi ini membuat Kota Bau-Bau menjadi membara dan lumpuh total.

Namun secara heroik, di tengah kerumunan massa ada seorang lelaki lanjut usia bernama La Ngiwa, sosok *parabela* asal Katobengke yang berkat kepemimpinannya berhasil meredam amukan ribuan massa yang hendak menyerang dan membunuh orang-orang Katobengke. Dengan hanya membaca *batata*<sup>9</sup>, dilanjutkan dengan menggaris jalan raya, tempat lewat ribuan massa kubu Wameo cs, membuat pasukan Wameo Cs tidak berhasil dan gagal menembus blokade yang telah dibacakan *batata* oleh seorang *parabela*. Dalam peristiwa konflik tersebut, gerombolan massa dan para penyerang yang membawa bom rakitan dan senjata api rakitan berhasil dihalau oleh pemuda Katobengke di bawah kepemimpinan *parabela*. Bahkan banyak bom buatan eksodus Ambon tidak meletus ketika dilemparkan di dekat *parabela*.

Pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa konflik Bau-Bau adalah *parabela* sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) masih sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakatnya. Peran *parabela* bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah setempat sangat besar dalam menciptakan keamanan dan perdamaian masyarakat, tidak hanya dalam suasana konflik yang sedang berkecamuk tetapi juga dalam suasana aman dan damai. Di Buton, peran *parabela* masih

---

<sup>8</sup> Warga sekitar mau membantu warga Wameo untuk menyerang orang Katobengke, karena mereka ingin balas dendam pada orang Katobengke yang berperilaku kurang ajar, suka tahan-tahan orang ke Pantai Nirwana, suka pajak-pajak, atau perkosa anaknya orang.

<sup>9</sup> *Batata* adalah doa atau keyakinan terhadap supranatural.

sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya. Pertama, dalam keadaan perang dan perkelahian yaitu keadaan konflik dahsyat terbuka seperti kasus konflik warga Wameo dengan orang Katobengke, *parabela* berfungsi sebagai benteng pertahanan yang berfungsi membentengi dan melindungi warganya dari serangan musuh yang ingin merusak atau menghancurkan mereka. Di samping itu, *parabela* juga dapat berfungsi sebagai peredam agar konflik disertai kekerasan tidak meluas menjalar ke mana-mana, menekan kerugian, dan menghindari korban berjatuhan tidak semakin banyak. Dalam kasus konflik di atas, hanya dua orang korban tewas, puluhan luka-luka, dan beberapa rumah sempat dibakar oleh massa. Kedua, dalam keadaan aman damai, *parabela* berperan sebagai penjaga adat dan budaya, penyelenggara pesta dan penjaga kawasan hutan *kaombo* tetap terjaga.

Terkait dengan peran *parabela* dalam menjaga kelestarian kawasan hutan *kaombo* dapat dilihat dalam penelitian Husain (2014) yang berjudul “Kepemimpinan *Parabela* Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan *Kaombo* di Kabupaten Buton” antara lain menemukan bahwa peran *parabela* sangat besar dalam proses perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga hutan *kaombo* di Buton masih tetap terjaga hingga saat ini. Dalam hutan *kaombo* itu terdapat mata air yang terus mengalir meski saat musim kemarau. Kalau hutan itu dirusak, maka mata air akan terancam keberadaannya. Kelestarian hutan *kaombo* sangat terkait dengan keamanan, perdamaian, kesejahteraan (*well-being*), keselamatan, dan keberlanjutan masyarakat secara umum.

## **E. Dari Konflik Menuju Perdamaian**

Suatu peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dan dipetakan supaya dapat diselesaikan menuju per-

damaian abadi. Berikut ini akan diketengahkan sebuah ringkasan tulisan sederhana yang berasal dari hasil penelitian penulis dalam periode waktu peristiwa konflik, mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, dengan mengambil setting lokasi konflik di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kampus Baru Kota Kendari, di mana dalam lokasi tersebut terdapat Kampus Universitas Halu Oleo. Analisis dan pemetaan konflik menggunakan pemetaan Paul Wehr. Menurut Paul Wehr (dalam Trijono, dkk. Ed. 2004), yaitu mengurai konflik dengan menjelaskan bekerjanya elemen-elemen konflik yaitu:

1. Konteks atau situasi yang melatar belakangi konflik;
2. Aktor konflik dan pihak-pihak yang terlibat, langsung dan tidak langsung dalam konflik dan upaya perdamaian;
3. Isu dan masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai objek atau sumber konflik;
4. Dinamika konflik; dan
5. Alternatif pemecahan masalah (resolusi konflik dan perdamaian).

Pemetaan Paul Wehr ini tidak kaku, sebaliknya pemetaan konflik ini sangat dinamis dan fleksibel. Analisis dan pemetaan konflik dapat diterapkan dalam setiap peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena sifatnya yang mudah, fleksibel, dan sederhana ini, sehingga pemetaan konflik ini banyak digunakan oleh para ilmuwan dan peneliti konflik, kekerasan dan perdamaian.

### **1. Konteks Konflik**

Mengapa Konflik Unhalu diberi nama “konflik Unhalu?” Setidaknya ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, karena lokasi terjadinya “Konflik Unhalu” adalah di sekitar Kampus Baru Universitas Halu Oleo (sebelumnya disebut Unhalu, sekarang disingkat menjadi UHO), tepatnya berlokasi di sepanjang Jalan HEA Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kampus Baru (Kambu), yang meliputi lorong-lorong seperti Lorong Mata Air,

Lorong Kusuma, Lorong Torikale, Lorong Perintis, Anawai, Pelangi, Beringin, Bintang, Salangga, dan Lorong Damai. *Kedua*, aktor konflik Unhalu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah mahasiswa Unhalu. Karena alasan itulah, maka dalam tulisan ini konflik tersebut disebut dengan Konflik Unhalu.

Menurut informasi yang dihimpun dari para informan penelitian dan para “pelaku sejarah”<sup>10</sup>, konflik Unhalu sudah dimulai sejak akhir tahun 1990-an, tetapi ketika itu sifat dan intensitas konflik dan kekerasan masih kecil. Derajat dan intensitas konflik mulai memperlihatkan eskalasi yang meningkat pasca tahun 2005. Setelah periode 2005, yaitu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 terus menggeliat, dan puncaknya pada konflik dan kekerasan tahun 2011, yang sempat memakan korban jiwa sebanyak 3 (tiga) orang meninggal dunia.

Hasil penelitian Tuwu (2009; 2011)<sup>11</sup> menemukan bahwa konteks konflik Unhalu terjadi pada saat momentum penerimaan mahasiswa baru (Maba Unhalu), dan juga terjadi pada event-event pemilihan pimpinan mahasiswa di lembaga kemahasiswaan Unhalu, mulai dari pimpinan tingkat HMJ, DPM, MPM, BEM fakultas maupun tingkat universitas. Waktu-waktu terjadinya konflik berkisar antara bulan Juli sampai bulan Oktober setiap tahun, dan bahkan bisa juga di luar bulan tersebut. Namun setelah periode 2005, baik secara langsung maupun tidak, konteks konflik Unhalu tidak hanya terjadi pada event-event pemilihan pimpinan mahasiswa Unhalu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi politik seperti event-event pemilihan rektor dan pemilihan kepala daerah.

---

<sup>10</sup> Orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak, dalam peristiwa konflik dan kekerasan. Termasuk juga para korban konflik.

<sup>11</sup> Untuk penjelasan detail, silahkan baca hasil penelitian Darmin Tuwu tentang (1) Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kekerasan di FISIP Unhalu Kendari (2009). (2) Merajut Perdamaian Kampus Unhalu: Konteks, Aktor, Dinamika dan Resolusi Konflik Unhalu Kendari (2011).

## **2. Aktor dan Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Konflik**

Aktor-aktor konflik atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu unit-unit pengambilan keputusan, baik individu atau kelompok, yang langsung maupun tidak langsung terlibat konflik. Mereka adalah pihak-pihak yang memiliki pilihan tertentu terhadap hasil yang akan dicapai dalam suatu situasi konflik. Pilihan itu merupakan ungkapan kongkrit kepentingan mereka yang seringkali didasarkan pada keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka.

Aktor-aktor konflik Unhalu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah mahasiswa Unhalu. Di samping itu, aktor-aktor konflik bisa juga berasal dari luar kampus, namun masih punya *link* dan relasi dengan kampus, baik berkaitan langsung dengan mahasiswa maupun tidak. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang berasal dari luar kampus ini kebanyakan dari mereka adalah dikategorikan sebagai “perangkat keras”<sup>12</sup>.

### **Perbandingan antara Konflik di UHO Kendari dengan Konflik di Universitas Hasanuddin Makassar**

Sekedar perbandingan dengan konflik UHO Kendari, berikut akan saya ketengahkan peristiwa konflik yang terjadi di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Salah satu peristiwa konflik terbesar di Unhas adalah peristiwa konflik yang terjadi pada akhir Agustus 1992 sampai awal September tahun 1992. Dalam peristiwa konflik Unhas 92, yang menjadi aktor konflik adalah mahasiswa Fakultas Teknik melawan mahasiswa FIS yang meliputi fakultas-fakultas: FISIP, Ekonomi, Hukum, dan Sastra, namun aktor utama konflik adalah mahasiswa Sosial Politik dengan mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Unhas.

---

<sup>12</sup> Perangkat keras adalah aktor-aktor konflik UHO, mereka dapat berasal dari mahasiswa aktif, tidak aktif, alumni, dan/atau preman.



Peristiwa konflik ini terjadi pada waktu kegiatan Orientasi Penerimaan Siswa dan Pengenalan Kampus (OPSPEK). Seperti tahun-tahun sebelumnya (1991, 1990, 1989, ke bawah) di mana mahasiswa FT selalu menyerang dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa fakultas lain dalam lingkungan Unhas seperti Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, FMIPA, dan mahasiswa FIS. Dalam peristiwa penyerangan disertai tindak kekerasan tersebut, tidak ada satu pun fakultas yang berani melawan ataupun mengimbangi kekuatan serangan mahasiswa FT. Dan peristiwa konflik 1992 tersebut merupakan upaya balas dendam yang dilakukan oleh korban kekerasan yang dilakukan oleh FT di tahun-tahun sebelumnya. Dan adalah mahasiswa Sospol atau FISIPOL yang berani melawan mahasiswa FT, sehingga terjadilah “perang terbuka” baku kejar-kejaran, baku lempar batu, baku pukul (adu jotos), sampai kepada penggunaan senjata tajam seperti pisau (*badik*), parang, tombak, busur panah, dll. Dalam konflik terbuka tersebut, yang berkonflik adalah hanyalah para senior-senior yaitu senior mahasiswa FT versus senior mahasiswa FISIPOL Cs. Tidak ada korban jiwa dalam konflik terbuka tersebut, tetapi kerugian materil sangat besar yaitu berupa rusaknya fasilitas sarana dan prasarana kampus, terutama fasilitas kampus yang berada sekitar gedung Fakultas Teknik dan Gedung Rektorat Unhas, bahkan salah satu gedung Fakultas Teknik dibakar oleh massa kelompok mahasiswa FIS.<sup>13</sup>

Setelah peristiwa perkelahian massal tersebut, proses perkuliahan atau aktivitas kampus Unhas diliburkan selama 3 (tiga) hari

---

<sup>13</sup> Buntut dari peristiwa konflik September 1992 tersebut, secara implisit ditengarai menjadi faktor penyebab kekalahan Rektor Unhas Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. melawan PANGDAM VII Wirabuana Mayjen TNI Purn H. Zainal Basri Palaguna dalam perebutan kursi nomor 1 di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan periode 1993-1998.

secara berturut-turut untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya konflik meluas dan menjalar menjadi lebih besar. Pada hari keempat, setelah kuliah kembali normal, sekitar pukul 16.00 Wita, sebagai upaya balas dendam mahasiswa Fakultas Teknik kembali menyerang mahasiswa baru FISIPOL yang sedang mengikuti perkuliahan Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dalam peristiwa penyerangan tersebut, mahasiswa Fakultas Teknik memasuki ruangan kuliah tanpa seizin dosen yang sedang mengajar, lalu kemudian mereka memukuli dan menghajar habis-habisan semua mahasiswa (baca: mahasiswa laki-laki) yang berada dalam ruangan kuliah, sehingga suasana ruang kuliah spontan berubah menjadi kacau-balau diiringi teriakan histeris ketakutan mahasiswa. Beberapa mahasiswa baru FISIP mencoba menyelamatkan diri dengan cara lari keluar dan sebagian lain lagi lari keluar melompat melalui jendela. Tidak hanya mahasiswa yang lari, tetapi dosen pengajar juga ikut kabur karena ia merasa ketakutan dan nyawanya terancam.

Namun persoalan konflik antara mahasiswa ini tidak dibawa pulang ke kamar kost masing-masing. Dengan kata lain, masing-masing mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas berbeda yang terlibat dalam konflik tersebut menyadari diri bahwa masalah konflik di dalam kampus adalah masalah internal masing-masing mahasiswa, sehingga tidak perlu di bawa pulang ke tempat kost masing-masing. Sehingga suasana di tempat-tempat kost tetap kondusif, aman, dan damai. Atau sebaliknya, kalau secara kebetulan ada kejadian konflik di tempat kost, maka segera diselesaikan di tempat kost sehingga tidak perlu masalah konflik tersebut di bawa masuk ke dalam kampus. Hal inilah yang membuat sehingga keamanan dan kedamaian kampus Unhas tetap terjaga dari gangguan konflik sampai sekarang.

### **3. Masalah yang diidentifikasi sebagai objek konflik**

Terkait dengan kasus pemilihan Ketua HMJ ataupun pimpinan mahasiswa di lembaga eksekutif mahasiswa (BEM) dan lembaga legislatif mahasiswa (MPM dan DPM). Pertama, masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai obyek konflik adalah adanya kecurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (paslon) dalam event pemilihan pimpinan mahasiswa. Kecurangan dan penggelembungan tersebut menyebabkan perbedaan jumlah suara. Terdapat ketidak sesuaian jumlah suara, antara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Hal tersebut memancing protes dan keributan.

Kedua, masalah lain yang juga dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadi konflik dan kekerasan adalah perilaku menghalang-halangi mahasiswa kubu tertentu yang hendak masuk memberikan suara. Tujuannya adalah supaya mahasiswa yang dihalangi tersebut tidak jadi memilih, sehingga secara tidak langsung menguntungkan pihak pelaku. Atau bahkan lebih jauh bisa juga kasusnya adalah salah satu timses menyandera salah satu pasangan calon (kandidat) yang diidentifikasi sebagai pesaing, musuh, atau “lawan” mereka. Selama penyanderaan, kandidat yang disandera tersebut dilarang pergi memberikan suara. Kalau terpaksa harus pergi memilih, maka dengan sangat terpaksa dia harus memilih lawannya (kelompok sang penyandera) atau sekalian memberikan dukungan kepada kelompok penyandera. Untuk memuluskan tujuan strategi ini, biasanya sang penculik menggunakan “perangkat keras”. Jika skenario menyandera dan menculik “gagal” dan tidak berhasil, atau jika mereka kalah dalam proses pemilihan, maka “perangkat keras” akan bekerja dan beraksi melaksanakan tugasnya yaitu melakukan tindakan mengancam dan memukul, dan tindakan kekerasan lainnya. Jika tindakan

“kekerasan” sudah terjadi, maka selanjutnya akan dibalas lagi dengan tindakan “kekerasan lainnya”. Fakta inilah yang menyebabkan kenapa konflik disertai kekerasan sering menyertai kampus ataupun masyarakat secara umum.

Dalam kasus-kasus konflik yang lain, terjadinya konflik dan kekerasan juga dipicu oleh adanya ejekan, hinaan, bahkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh seseorang (*person*) atau sekelompok orang (*collectivity*) terhadap orang atau kelompok lainnya yang diasosiasikan sebagai “mereka” atau “lawan”. Sikap dan perilaku tersebut dilakukan akibat pelaku kekerasan (*violence actors*) sudah dalam keadaan mabuk, karena telah mengkonsumsi minuman keras. Setelah dalam keadaan mabuk, pelaku kekerasan tidak bisa mengendalikan diri, lalu membuat kekacauan, keributan, mengganggu, mengejek, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan seperti memukul orang tanpa alasan. Setelah kejadian, si korban pemukulan lalu melakukan tindakan pembalasan kepada orang atau kelompok orang yang melakukan pemukulan. Aksi pukul-memukul, balas-membalas ini kemudian menjadi “rantai kekerasan” (*violence chain*) untuk terjadinya konflik dalam skala besar, jika tidak diatasi secara cepat dan tuntas. Fenomena mabuk-mabukan ini lebih banyak terjadi pada periode tahun 2012 ke bawah. Setelah periode 2012, jumlah para pemabuk semakin berkurang namun tidak hilang sama sekali.

Terkait konflik dan kekerasan di lembaga pendidikan, hasil penelitian Darmin Tuwu di FISIP UHO Kendari menemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di dunia kampus adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh mabuk-mabukan karena mengkonsumsi minuman keras yang beralkohol;

2. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap peraturan kampus, bahkan tidak jarang melanggar peraturan;
3. Fanatisme kelompok dan etnisitas;
4. Media massa yang menayangkan program kekerasan secara vulgar (perkelahian, pembunuhan, dll);
5. Satuan Keamanan Kampus yang kurang berfungsi dengan baik;
6. Sikap pimpinan lembaga pendidikan yang kurang tegas terhadap para pelaku kekerasan (Tuwu, 2011:186-187).

Selama periode tahun 2005 ke atas, konteks dan isu konflik UHO cenderung dihubungkan dan/atau dikait-kaitkan dengan masalah kesukuan atau isu etnisitas<sup>14</sup>. Isu-isu etnisitas tersebut tidak hanya dijumpai dalam event pemilihan pimpinan mahasiswa di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas (HMJ, BEM, DPM, MPM), tetapi juga terjadi dalam event pemilihan rektor.

Terkait dengan isu etnisitas dalam Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo Kendari, dalam kepemimpinan Rektor UHO kelima yaitu Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc. yang menjabat selama delapan tahun yaitu mulai dari tahun 1999-2008, intensitas dan tensi pemilihan rektor masih berlangsung biasa-biasa saja. Namun mulai pemilihan calon rektor keenam yang dimenangkan oleh Prof. Dr. H. Usman Rianse, MS utamanya pada periode kedua menjabat sebagai rektor UHO yaitu tahun 2012-2016, isu etnisitas semakin keras disuarakan. Isu etnisitas ini terus menguat, membesar dan menggelinging bak bola salju ketika pemilihan rektor Universitas Halu Oleo yang ketujuh periode 2017-2021 digelar. Pemilihan Rektor ketujuh kali ini bahkan mencatat rekor baru karena proses pemilihannya yang relatif lama yang memakan waktu sekitar satu tahun. Setelah melalui proses pemilihan yang panjang dan melelahkan,

---

<sup>14</sup> Etnik yang bersaing adalah etnik Muna sebagai petahana melawan etnik Buton, Tolaki, Bugis-Makassar, dan etnik lainnya.

Universitas Halu Oleo akhirnya memiliki rektor baru. Rektor UHO terpilih ketujuh adalah Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihi, M.Si, M.Sc. mengalahkan pesaingnya Prof. Dr. Buyung Sarita, MS dan Prof. Dr. Ir. La Sara, MS.

Jadi tiga kali secara berturut-turut mulai dari tahun 1999-2017, UHO dipimpin oleh Rektor yang berasal dari Muna. Rektor sebelumnya adalah Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc. yang menjabat tahun (1999-2008), dan Prof. Dr. H. Usman Rianse, MS yang menjabat mulai tahun 2008-2016.

#### **4. Dinamika Konflik Unhalu**

Dinamika konflik yaitu menyangkut pasang surutnya konflik, eskalasi konflik dan kecenderungan persekutuan, permusuhan, dan pemisahan di antara pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa konflik Unhalu sudah lama terjadi, namun baru sepuluh tahun terakhir memperlihatkan intensitas dan eskalasi yang meningkat. Konflik Unhalu akan memperlihatkan wajahnya pada waktu momentum penerimaan mahasiswa baru (Maba) tiba, yang mana di dalamnya ada kegiatan OPSPEK. Di samping itu juga karena masih ada sisa-sisa dari dendam-dendam yang sudah terpendam lama dari peristiwa konflik sebelumnya yang belum sempat diselesaikan secara tuntas. Dendam tersebut menemukan momentum pada waktu OPSPEK dan penerimaan mahasiswa baru. Ketika momentum penerimaan mahasiswa baru dan OPSPEK tiba, dan juga event pemilihan pimpinan di lembaga kemahasiswaan Unhalu digelar, maka konflik berpotensi mencuat kembali ke permukaan. Pemicunya bisa saja berawal dari hal-hal kecil dan sepele, lalu kemudian bisa menjalar dan membesar bagaikan bola api yang siap “membakar”. Contohnya adalah peristiwa konflik tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 8 September 2011, yang menelan 3 korban jiwa. Ironisnya lagi adalah pada waktu peristiwa

kekerasan (pembunuhan) tersebut terjadi, rektor dan para pimpinan fakultas/universitas, sedang mengikuti kegiatan seminar internasional yang berjudul: “*Celebrating Diversity*”.

Masyarakat dan Universitas Halu Oleo perlu mencatat bahwa korban meninggal dunia tersebut adalah “orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dan tidak tahu apa-apa”. Para korban meninggal dunia tersebut tidak terkait dengan sumber konflik, mereka orang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, namun secara tragis mereka dihabisi nyawanya oleh orang atau kelompok orang (baca oknum) yang hendak melakukan balas dendam tetapi salah sasaran.

Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, pihak kepolisian melakukan pengamanan “extra ketat” di empat penjuru kampus Unhalu, dengan tujuan untuk mencegah dan menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi. Hasil pengamanan kepolisian tersebut, dapat menciptakan keamanan dalam kampus Unhalu. Terciptanya suasana keamanan dalam lingkungan kampus bukan berarti konflik Unhalu telah tuntas dan selesai. Konflik Unhalu masih terus mengintai, sekarang dia hanya diam sejenak (*dead lock*), tinggal menunggu pemicu konflik (*conflict trigger*), maka peristiwa konflik akan mencaut dan berkobar kembali ke permukaan.

Pasca kejadian konflik dan kekerasan tanggal 8 September 2011 tersebut, konflik dan kekerasan di lingkungan kampus masih kerap terjadi secara sporadis. Misalnya saja ada korban yang ditikam di antara jalan FISIP dan Pertanian, di antara Perpustakaan Pusat UHO dan Fakultas Ilmu Budaya ada korban yang ditebas kepalanya hingga bersimbah darah akibat persaingan lahan parkir, dan lain-lain.

Tahun 2017, utamanya di era kepemimpinan Rektor UHO yang baru yaitu Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si, M.Sc. intensitas konflik dan kekerasan nampak seolah-olah berkurang. Namun kegiatan demonstrasi disertai dengan kekerasan masih marak

terjadi, setiap pekan bahkan setiap hari kita masih menjumpai kegiatan demonstrasi, seperti demonstrasi yang terjadi tanggal 14/12/17, demo tanggal 17/12/17 dan demo tanggal 18/12/17. Salah satu contoh kegiatan demonstrasi terbesar di Universitas Halu Oleo yang disertai dengan kekerasan sebagai terlihat dalam gambar 2 berikut di bawah ini.



Gambar 2. Demonstrasi dengan Kekerasan di Kampus UHO Kendari.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2017.

Demo-demo tersebut sebagaimana tampak dalam Gambar 2 di atas, keberadaannya dalam banyak hal sangat mengganggu, tidak hanya mengganggu proses perkuliahan tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan kampus UHO secara keseluruhan.

Fakultas yang paling sering menjadi sasaran para demonstran adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin saja karena letaknya yang sangat terbuka, bebas tanpa pengamanan dan dekat dengan jalan. Setiap kali ada demo, aktivitas dan proses perkuliahan di lingkungan FISIP UHO utamanya di Gedung Sosiologi terganggu. Jika ada demo di FISIP para pendemo dengan bebas memaksa masuk



sampai ke ruang-ruang kelas. Para pendemo berteriak-teriak dan perwakilan pendemo mendatangi setiap ruang-ruang kuliah, dan mereka menyuruh secara paksa agar mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah agar segera bergabung dengan pendemo dan meninggalkan ruang perkuliahan. Kondisi tersebut spontan membuat dosen yang sedang mengajar merasa terganggu dan selanjutnya berdebat keras dengan perwakilan pendemo yang mendatangi ruang kelas. Meskipun sang dosen yang sedang mengajar sudah memberikan penjelasan bahwa jangan mengganggu haknya dengan mengatakan bahwa: “silahkan kalian berdemo tapi tolong jangan mengganggu kami yang sedang kuliah.” Meskipun sudah diberikan nasehat, penjelasan dan pemahaman, tetapi tetap saja mereka berteriak-teriak sehingga aktivitas perkuliahan menjadi terganggu dan terhenti.

Kondisi semacam ini tentu sangat merugikan mahasiswa dan merugikan kampus UHO secara keseluruhan. Karena itu, sosialisasi terhadap peraturan kampus (Peraturan Rektor UHO) tentang “Sistem Pendidikan Tinggi dan Peraturan Akademik di Perguruan Tinggi” perlu lebih ditingkatkan lagi supaya semua mahasiswa mengetahui aturan kampus. Mahasiswa perlu patuh dan taat pada aturan dan berperilaku mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Rektor UHO. Jika mahasiswa tidak patuh pada aturan hukum, maka mereka bisa berhadapan dengan hukum, bahkan kalau mereka terbukti bersalah, mereka bisa dikenakan sanksi tegas, bahkan bisa dikeluarkan (*drop out*) dari kampus UHO. Sejak tahun 2014, sosialisasi aturan kampus gencar dilakukan melalui kegiatan pendidikan karakter, namun tampaknya belum cukup efektif.

## **5. Resolusi Konflik dan Perdamaian**

Cara-cara penanganan dan penyelesaian konflik menuju kampus Unhalu yang aman dan damai, antara lain yang sudah dilakukan sejauh ini adalah misalnya:

Pertama, melalui pendekatan keamanan (militarisme) yaitu dengan mendirikan beberapa pos pengamanan polisi (Pospol= pos polisi) di depan kampus Unhalu. Contoh Pos Polisi yang masih bisa dilihat sampai sekarang adalah pos polisi yang ada di pertigaan Jalan ke arah kampus UHO, Jalan menuju Pasar Baru, dan Jalan ke arah Anduonohu. Kedua, membuat pembatas atau penghalang jalan (*portal*). Portal tersebut fungsinya adalah untuk menghalangi dan atau memblokade orang dan utamanya pengendara sepeda motor dan mobil yang hendak memasuki areal atau keluar wilayah kampus.

Ketiga, mendirikan lembaga pusat studi keamanan dan perdamaian (PSKP). Tugas utama Lembaga PSKP adalah melakukan studi, kajian dan riset terkait konflik, kekerasan dan perdamaian di wilayah kampus dan daerah-daerah rawan konflik dan kekerasan lainnya. Hasil studi PSKP ini selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi rektor dan gubernur/walikota/bupati untuk mencegah dan menangani konflik, serta menciptakan keamanan dan perdamaian di wilayah kampus dan sekitarnya.

Keempat, cara penanganan konflik lainnya yaitu dengan mengundang perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengadakan pertemuan dengan semua elemen masyarakat (pihak kampus Unhalu, Pemkot Kendari, Pemprov, TNI, mahasiswa dan masyarakat). Semua stake holders diundang, untuk berdiskusi dan berdialog terkait penanganan dan penyelesaian konflik agar konflik dapat diselesaikan dan ke depannya tidak terjadi lagi. Apabila permasalahan konflik telah selesai ditangani, maka akan tercipta suasana dan kondisi kampus Unhalu yang aman, dan damai.

Terakhir, mengingat aktor-aktor konflik dan kekerasan UHO adalah mahasiswa UHO, maka sebaiknya yang menjadi aktor perdamaian adalah juga berasal dari mahasiswa. Mahasiswa UHO harus tampil sebagai mediator perdamaian untuk dirinya sendiri.

Karena itu resolusi konflik dan perdamaian yang dapat ditempuh adalah: Pertama, dari sisi mahasiswa misalnya menambah pengetahuan agama, budi pekerti, pendidikan multikultural, dan pendidikan perdamaian. Penambahan pengetahuan tersebut diharapkan dapat membentuk karakter mahasiswa UHO menjadi manusia yang agamis, bermoral, santun, toleran terhadap perbedaan, *assertiveness*, berbudi pekerti luhur sehingga mereka "enggan", dan tidak berani lagi untuk melakukan tindakan kekerasan. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan bekal pengetahuan pendidikan agama, moral, budi pekerti, pendidikan multikultural, dan pendidikan perdamaian yang memadai, diharapkan akan lahir mediator-mediator perdamaian yang *skillful*, terampil dan handal dari kampus Universitas Halu Oleo Kendari.

Kedua, dari sisi universitas, aksi jangka pendek yang dapat dilakukan adalah segera menangkap dan menindak tegas para pelaku tindak kekerasan di kampus, lalu memberikan sanksi (*punishment*) yang berat, sehingga pelaku menjadi jera dan takut untuk membuat kekacauan, anarkisme, dan kekerasan di wilayah kampus UHO. Bahkan kalau terbukti bersalah di persidangan meja hijau pengadilan, mereka dapat dikeluarkan (*drop out*) dari universitas. Dengan demikian mahasiswa menjadi "kapok" dan berpikir seribu kali untuk melakukan tindak kekerasan lagi. Di samping itu, para pimpinan universitas seyogyanya tidak "pilih kasih", apalagi sampai melindungi "aktor-aktor konflik dan kekerasan".

Menurut Ibn Khaldun, seorang *leader* adalah pelopor, dia harus berani, adil, dan tegas dalam bertindak. Seorang *leader* harus berani (*brave to change*) membuat keputusan dan menjalankan keputusan itu dengan resiko apa pun. Siapa pun yang terbukti bersalah, seharusnya ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa memandang bulu dan tanpa pilih kasih. Siapa pun yang terbukti bersalah, harus ditindak keras sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

tanpa memandang "siapa dia". Dengan demikian maka akan tercipta kampus UHO yang aman dan damai. Cara-cara penanganan konflik dan kekerasan menuju perdamaian abadi tersebut dipercaya dapat menciptakan kondisi kampus UHO yang aman, damai, dan sejahtera (*welfare*) secara permanen dan berjangka panjang.

# Bab 8

## Penutup

1. Indonesia merupakan salah satu negara bangsa di dunia yang mempunyai keberagaman warganya. Terkait dengan keberagaman, J.S. Furnivall (1944) dalam Hefner, Ed., (2007) menyebutnya sebagai masyarakat majemuk (*plural society*). Bagi Furnivall, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari “dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur, dalam satu unit politik”. Segregasi sosial pada gilirannya memunculkan ciri politik paling menggelisahkan dari masyarakat majemuk, yakni tidak adanya “kehendak sosial umum” di antara mereka. Mengapa menggelisahkan? Kilah Furnivall karena pasar dan “kepentingan-kepentingan” adalah jaminan-jaminan perdamaian sipil yang berubah-ubah. Indonesia menyaksikan ledakan kekerasan komunal pada akhir 1950-an dan 1965; yang lebih mengguncang lagi, Indonesia diguncang oleh kekerasan etnoreligius yang getir dalam periode tahun 1996 sampai 2001, baik konflik dan kekerasan dalam skala kecil maupun konflik kekerasan dalam skala besar seperti yang terjadi di Maluku, Poso, dan Sambas-Kalimantan Barat. Tanpa terkecuali di lembaga Pendidikan Tinggi pun terjadi tindak kekerasan.
2. Setiap individu (*person*), kelompok-kelompok sosial (*social collectivities*), komunitas (*community*), dan masyarakat secara umum (*society*), memiliki perspektif atau pandangan yang ber-

beda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir tersebut ada yang bersifat alami dan ada juga yang bersifat non-alami atau bersifat sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam situasi yang sama indikator-indikator posisi itu dalam masyarakat sering menentukan keinginan kelompok yang berbeda: ketika sasaran dan kepentingan mereka bertentangan atau tidak sesuai satu sama lain, maka terjadilah konflik.

3. Manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, cenderung akan memunculkan dua jenis kemungkinan interaksi yang dikembangkan, yaitu pertama, interaksi sosial yang bersifat asosiatif; dan kedua, interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif akan cenderung menghasilkan hubungan kerja sama (*cooperation*), sementara interaksi sosial yang bersifat disosiatif akan cenderung menghasilkan hubungan pertentangan dan konflik.
4. Secara harafiah konflik berarti percekocokan, perselisihan, atau pertentangan satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lain. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan (*difference*), persinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup tersendiri yang khas (*unique*), mereka tidak selalu identik, terpisah dan statis.
5. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik dapat dipetakan menjadi: pertama, konflik kelas; kedua, konflik fungsional; ketiga, konflik politik. Aktor konflik dapat berupa individu (*person*), kelompok orang (*collectivities*), maupun struktur (*structure*).

6. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.
7. Kekerasan dapat dipetakan menjadi: pertama, kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung; kedua, kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik (kekerasan simbolik); ketiga, kekerasan budaya (kekerasan struktural); keempat, kekerasan terhadap perempuan, dll.
8. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
9. Resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Sementara itu transformasi konflik adalah strategi yang paling menyeluruh dan luas, yang juga merupakan strategi yang membutuhkan komitmen yang paling lama dan paling luas cakupannya.
10. Perdamaian tidak hanya didefinisikan sebagai keadaan tanpa peperangan, tetapi juga harus didefinisikan sebagai menjalin hubungan antarindividu, kelompok, dan lembaga yang menghargai keragaman (*diversity*) dan perbedaan (*difference*) nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh. Sementara menggalang perdamaian adalah melaksanakan program-program kreatif dan inovatif yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik dan penderitaan dari masa lalu dan meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang.

11. Perdamaian dan keadilan bisa dipelajari di bangku pendidikan agar dapat menghasilkan “mediator perdamaian”, melalui pendidikan formal dan informal. Untuk menjadi mediator perdamaian yang baik, di samping mempunyai pemahaman komprehensif terkait konflik dan kekerasan, juga dibutuhkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang perdamaian. Perdamaian adalah seni keterampilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Aktor perdamaian disebut dengan “Mediator Perdamaian”.



# Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Affandi, Hakimul Ikhwan (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Bottomore, T.B. (2006). *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Damanik, Asnifriyanti, (1998). “Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukum”, dalam *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan No. 6.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, (2007). Gender dan Pluralisme di Indonesia, dalam *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Editor: Robert W. Hefner. Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
- Fearon, James D. & Laitin, David D. (2000). “*Violence and the Social Construction of Ethnic Identity*” in *International Organization* 54, Autumn, IO Foundation and The Massachusetts Institute of Technology.
- Espiritu, Renhild traitler, (1996). *Violence against women`s bodies` in Mary John Manazan et al.(eds.), Women Resisting Violence: Spirituality for Life*. New York: Orbis Books, pp. 66-79.

- Febriasih, Happy Budi, dkk, (2008). *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Fisher, Simon, dkk., (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Zed Books.
- Francis, Diana, (2006). *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Quills.
- Furnivall, J.S. 1944. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. New York: Macmillan.
- Galtung, Johan, (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Geertz, Clifford, (1963). *The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. Dalam Clifford Geertz, ed. *Old Societies and New States*, The Free Press of Glencoe, New York, hlm. 105-157.
- Girard, Rene, (1979). *Violence and the Sacred*. Baltimore, 1979.
- Gould, Roger V. 1999. “*Collective Violence and Group Solidarity: Evidence From A Feuding Society*” in *American Sociological Review*, Vol 64 June 1999.
- Gurr, Ted Robert, (1970). *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hefner, Robert W. (Ed). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Impulse-Kanisius.
- Husain, Najib, (2014). *Kepemimpinan Parabela Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan Kaombo di Kabupaten Buton*. Yogyakarta: Disertasi Fisipol UGM.

- Jurdi, Syarifuddin, (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Klinken, Gerry Van, (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasikun (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Ollman, Bertell, (1976). *Alienation*. Edisi ke-2. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press.
- Pruitt, Dean G, dkk, (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Ruslan, (2003). *Parabela di Buton. Suatu Analisis Antropologi Politik*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salmi, Jamil, (2003). *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Santoso, Thomas, (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Spitz, Pierre, (1978). *Silent Violence: Femine and Inequalities, International Review of Social Science*, vol XXX, no. 4, 1978.
- Tahara, Tasrifin, (2014). *Melawan Stereotip: Etnografi, Reproduksi Identitas, dan Dinamika Masyarakat Katobengke Buton yang Terabaikan*. Jakarta: Gramedia.
- Tilly, Charles and Sydney Tarrow (2007). *Contentious Politics*. United States: Paradigm Publishers.

- Trijono, Lambang, (2001). *Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trijono, Lambang, dkk, (2004). *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik Di Indonesia*. Yogyakarta: CSPS BOOKS UGM Kerjasama dengan SEACSN, SAREC dan CIDA.
- Trijono, Lambang, (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian. Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Paddi-Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Tuwu, Darmin, (2009). *Konflik Kepemilikan Aset Daerah Dalam Pemekaran Wilayah: Studi Konflik Antara Pemkab Buton Dengan Pemkot Bau-Bau*. Yogyakarta: Tesis Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Tuwu, Darmin, (2009a). *Faktor-Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Konflik dan Kekerasan di Lembaga Pendidikan*. Kendari: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN: 0853-2257, Edisi Juli 2009, Halaman 181-189.
- Tuwu, Darmin, (2011). *Merajut Perdamaian Kampus Unhalu: Konteks, Aktor, Dinamika, dan Resolusi Kampus Unhalu*. Kendari: LPPM dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.
- Tuwu, Darmin, (2010). *Konflik Tanpa Kekerasan (Telaah Kritis Untuk Ciptakan Kampus Unhalu Yang Damai)*. Kendari Post, Edisi Rabu, Tanggal 11 Agustus 2010.
- Tuwu, Darmin, (2010). *Mahasiswa duta perdamaian, mungkinkah?* Kendari Post, Edisi Rabu, Tanggal 22 September 2010.
- Tuwu, Darmin, (2011a). *Majulah Bangsaaku: Unhalu Jaya Sepanjang Masa (refleksi Kritis Perjalanan 30 tahun Unhalu)*. Kendari Post, Edisi Rabu, Tanggal 21 September 2011.

- Varshney, Ashutosh. 2001 “*Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*” *Book Draft*. Forthcoming Yale University Press.
- Varshney, Ashutosh. 2001 “*Ethnic Conflict and Civic Society: India and Beyond*” *World Politics* 53. April 2001.
- Windhu, I. Marsana, (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

# Lampiran

*Artikel terkait Konflik,  
Kekerasan, dan Perdamaian  
Yang dipublikasi oleh Penulis  
di Kendari Pos*

## KONFLIK TANPA KEKERASAN

### (Telaah Kritis Untuk Menciptakan Kampus Unhalu Yang Damai<sup>15</sup>)

Menyoal konflik horisontal bernuansa SARA yang menggeliat berkepanjangan di kampus Bumi Tridharma Universitas Haluoleo, terutama pada kondisi terakhir yang demikian mencekam, adalah mengingatkan kita kembali pada pertanyaan Gerry Van Klinken (2007) bahwa mengapa kekerasan terkesan begitu "normal" dalam budaya Indonesia? Klinken menjawab bahwa kecenderungan ke arah kekerasan adalah yang paling menggelisahkan dari sebuah daftar panjang tentang sikap-sikap kultural yang berkemungkinan akan menghadang demokrasi untuk jangka panjang. Demikian pula beberapa sikap sejenis lainnya, yakni "egoisme yang ekstrim, intoleransi, kenaiifan, hubris, paranoia, dan emosionalisme" yang kesemuanya merupakan fakta heterogenitas etnis dan religius yang diklaim sebagai biang keladi destabilisasi.

Konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti konflik Madura-Dayak di Kalimantan, konflik Poso, konflik Mamuju di Sulawesi, konflik Maluku Ambon, konflik Aceh, dan konflik Papua, menunjukkan betapa konflik menjadi penghambat serius pembangunan. Konflik-konflik tersebut, seringkali muncul dengan melibatkan kelompok marjinal atau kelompok minoritas di mana kepentingan dan hak komunal mereka tidak diakui dan tidak diakomodasi oleh negara, sehingga acapkali kelompok terpinggirkan ini melakukan resistensi kepada negara dan pemerintahnya karena kepentingan mereka kurang diakomodasi oleh kebijakan politik yang demokratis.

Reaksi terhadap kebijakan negara demikian sering kali muncul dalam berbagai bentuk konflik di dalam negara, baik konflik komunal antar kelompok etnis-agama, konflik determinasi diri (*self-determination*), maupun konflik pemisahan diri (*separation*). Aneka ragam nestapa kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini mengemuka akibat

---

<sup>15</sup> Tulisan ini sudah ditebitkan di Kendari Pos Edisi Rabu, 11 Agustus 2010.

dari konflik yang setiap saat berdendang. Tak pelak lagi, ketika menyoal masalah pembangunan yang berbasis komunitas, sudah pasti mengalami krisis dan kemandegan. Pada gilirannya, bukan hanya negara yang menjadi terpukul, tetapi warga masyarakat pun merana karena terpaksa harus menanggung beban dalam ku-bangan kemiskinan, pengangguran dan keretakan sosial.

### **Bagaimana dengan Konflik Unhalu?**

Memang konflik yang terjadi di Unhalu tidak sedahsyat konflik Poso atau Maluku, begitu pula korban dan kerugian yang diderita akibat konflik tersebut tidak sebesar mereka. Namun tentu saja kita tidak semestinya *under estimated* dengan konflik Unhalu yang terus menggelegar selama kurang lebih satu dasawarsa dan meledak berulang-ulang setiap tahunnya (*annual conflict*). Pasalnya, meskipun di permukaan konflik terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa saja menjadi lebih besar dan berlangsung lama, jika tidak ditangani dengan tuntas. Fenomena tersebut sudah terlihat, namun rupanya stake holder konflik Unhalu belum sepenuhnya menangkap fenomena tersebut dengan baik.

Konflik yang terjadi di Unhalu bisa dibaca dan waktu terjadinya pun dapat diketahui. Hasil penelitian penulis tentang Tindak Kekerasan di FISIP Universitas Haluoleo menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan biasanya terjadi di kampus Unhalu antara bulan Juli-September setiap tahunnya bersamaan dengan event penerimaan mahasiswa baru ataupun event suksesi. Faktor penyebabnya mulai dari hal yang sepele seperti salah paham dan pengaruh alkohol (miras) sampai kepada perkelahian antar mahasiswa dan fanatisme kelompok/etnisitas.

Kejadian yang sama terus berulang, seperti yang dialami oleh mahasiswa FISIP pada 2 Agustus 2010 lalu, sekitar jam 12.30 Wita sampai selesai terdapat sekelompok mahasiswa bersenjata lengkap (parang, tombak, samurai, anak panah, dll) tiba-tiba muncul dan tampak amat beringas hendak menyerang kelompok mahasiswa lain di halaman



FISIP Unhalu. Aksi brutal tersebut bahkan tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa tetapi juga kepada oknum dosen yang ketika itu sedang beraktivitas. Aktivitas serupa tidak hanya terjadi di FISIP, tetapi juga fakultas lain. Kejadian ini tentu saja mengganggu aktivitas akademik, menyebabkan instabilitas dan disharmoni kampus, meresahkan (*uncomfortable*) serta merugikan Unhalu secara umum.

### **Resolusi Konflik**

Untuk menciptakan kondisi kampus yang aman dan damai secara permanen dalam jangka panjang, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat ditempuh yakni pendekatan berbasis keamanan dan pendekatan berbasis empati persuasif-dialogis. Pola-pola penanganan konflik berbasis keamanan masih tetap dibutuhkan meskipun terkadang mengalami kegagalan, sebab kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru yang lebih brutal dan jelas akan memakan korban yang lebih banyak lagi. Pola pendekatan keamanan hanya akan menyelesaikan problem konflik pada aras permukaan.

Tampaknya, yang teramat penting adalah bagaimana memahami berbagai konflik dengan pendekatan empati, yang akan memungkinkan untuk mengungkap dimensi terdalam dari korban konflik (*latent conflict*) dengan segala problem psikologis yang dialami. Opsi yang ditawarkan tentunya penanganan konflik berbasis pada kapasitas lokal untuk perdamaian (*local capacity for peace*), karena setiap daerah memiliki dinamika konflik dan budaya yang berbeda, maka penanganannya pun harus disesuaikan dengan *culture* dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dalam konteks penyelesaian konflik Unhalu, dapat dipotret dari dua sisi, yakni dari sisi mahasiswa maupun dari sisi universitas. Pertama, dari sisi mahasiswa misalnya menambah jam pelajaran agama dan budi pekerti. Penambahan jam pelajaran tersebut diharapkan dapat membentuk mahasiswa menjadi manusia yang agamis, bermoral, dan berbudi

pekerti yang luhur sehingga "enggan", dan tidak berani lagi untuk melakukan tindak kekerasan.

Kedua, dari sisi universitas, aksi jangka pendek yang dapat dilakukan adalah segera menangkap pelaku, lalu memberikan sanksi (*punishment*) yang tegas dan berat, sehingga pelaku menjadi jera dan takut untuk membuat onar dan anarkis. Bahkan kalau perlu dikeluarkan (*drop out*) dari universitas. Dengan demikian mahasiswa menjadi "kapok" dan berpikir seribu kali untuk melakukan tindak kekerasan. Di samping itu pula para pimpinan universitas seyogyanya tidak "pilih kasih", apalagi sampai melindungi "aktor kekerasan". Seorang *leader* harus berani, tegas dan adil dalam bertindak. Siapa pun yang terbukti bersalah, harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa memandang "siapa dia". Dengan demikian maka akan tercipta kampus yang aman dan damai.

### **Agenda Unhalu ke Depan**

Agenda urgen dan krusial yang harus dilakukan Unhalu ke depan untuk menciptakan kampus yang aman adalah optimalisasi dan fungsionalisasi Satuan Keamanan Kampus (SKK), termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian. SATPAM merupakan instrumen dan pilar utama keamanan kampus mesti profesional, eksistensinya harus kuat (*powerful*), dan mesti selalu dipantau dan dievaluasi. Jika tidak berfungsi dengan baik, maka segera diganti dengan personil baru yang lebih kuat dan produktif.

Agenda penting lain yang dilakukan Unhalu adalah perlunya membentuk lembaga baru yang bernama Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) di Universitas Haluoleo, sebagaimana yang telah dilakukan oleh universitas besar di Indonesia seperti UGM Yogyakarta. Lembaga baru tersebut bertugas mengkaji secara kritis fenomena konflik kekerasan yang terjadi, bukan hanya pada aspek perilaku aktor/kejadian di permukaan, tetapi multidimensi dengan melihat banyak pihak, banyak penyebab serta perilaku yang ditimbulkan. Ter-dapat konflik yang ber-

dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan bahkan agama. Hasil kajian PSKP ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pimpinan universitas untuk membuat kebijakan sehubungan dengan cara terbaik penanganan konflik dan kekerasan di kampus (*the best of resolution conflict*). Bahkan hasil rekomendasi dari para pakar PSKP tersebut ke depannya diharapkan bukan hanya digunakan di lingkungan Unhalu, tetapi juga dapat dipakai oleh universitas lain serta daerah Sulawesi Tenggara umumnya. Sehingga dengan demikian, konflik dan kekerasan dapat ditangani dengan baik dan tuntas, melalui metode dan strategi yang benar dan tepat.

Kepada masyarakat dan stake holder konflik lainnya dihimbau agar selalu *cooling down* untuk mendukung terciptanya kampus Unhalu yang kondusif, aman dan damai dengan menolak setiap upaya kekerasan serta mendukung dan proaktif pada upaya perdamaian. Dengan demikian, upaya Unhalu sebagai universitas terbesar dan nomor satu di Sulawesi Tenggara menuju universitas maju dan ber-kelas dunia dapat segera diwujudkan.

Mahatma Gandhi berkata bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain. *Non-violence* adalah non-kooperasi dengan struktur yang salah, sementara pada saat yang sama mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif, kalau mungkin, bukan menentang aktor di pihak lain.

## **Mahasiswa Sebagai Duta Perdamaian, Mungkinkah?<sup>16</sup>**

Ketika mempergunjingkan prahara kehidupan komunitas di sekitar wilayah kampus Unhalu, adalah tak ubahnya kita mengurai benang kusut. Betapa tidak, salah seorang mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah konflik, kekerasan, dan perdamaian di bawah asuhan penulis meluncurkan sebuah pertanyaan yang terkesan cukup pesimistis, "dapatkah konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat seperti konflik Unhalu diselesaikan"? Iya, tentu saja semua persoalan pasti ada solusinya, termasuk prahara yang berulang kali menggelegar di Unhalu. Demikian jawaban saya kepada mahasiswa tersebut.

Tampaknya, jawaban saya kurang berkenan di benaknya, karena dalam kesaksiannya selama ini konflik di Unhalu tidak dapat diselesaikan. Besar dugaan, adalah cukup banyak diantara kita yang berpandangan pesimistis seperti itu. Meskipun sebaliknya, juga tidak sedikit jumlahnya atau masih banyak orang yang tetap optimis untuk keluar dari kemelut sosial yang terus melilit insan akademis di Unhalu dan sekitarnya. Tak pelak lagi, dengan gebrakan spektakuler Pak Rektor yang ditunjukkan pada upacara tujuh belasan kemarin, di dalamnya tersembunyi segudang optimisme beliau untuk keluar dari kemelut itu. Meskipun memang masih menyisakan secuil pertanyaan atas kemampuan gebrakan dimaksud.

Karena itu, sebagai insan akademis kita tak boleh berdiam diri untuk memberi kontribusi pemikiran dalam bentuk lisan dan tulisan yang mencerahkan sebagai sebuah upaya resolusi konflik. Dalam konteks ini, resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik yang dapat diselesaikan sepanjang pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik (stakeholders konflik) serta upaya perdamaian abadi yang sifatnya permanen berjangka panjang. Bukan perdamaian yang bersifat

---

<sup>16</sup> Tulisan ini sudah ditebitkan di Kendari Pos Edisi Rabu, 22 September 2010.

temporer, ketika hari ini kita sukses berdamai, tapi besok mungkin masih akan terjadi tawuran dan kerusuhan (baca konflik) lagi.

Memang patut ditangisi ketika konflik Unhalu yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, karena boleh jadi selama ini yang diselesaikan hanyalah pada aras permukaan saja, bukan pada akar konflik sesungguhnya. Sementara konflik yang terjadi selama ini sesungguhnya hanyalah merupakan "limbah" dari konflik besar yang mungkin suatu saat akan terjadi. Celaknya lagi, kebijakan penanganan konflik yang diterapkan oleh "the power holders" masih bersifat temporer. Kebijakan penanganan konflik tersebut adalah semacam politik kebijakan alias "pemadam kebakaran". Upaya "pemadaman kebakaran" yang sifatnya sementara diakui "cuma mampu" mematikan kobaran api yang menyala. Disadari atau tidak, bahwa dengan penerapan kebijakan tersebut sebenarnya hanya menunda waktu dimana api itu akan berkobar kembali, karena hanya dilakukan pada taraf permukaan tidak pada hal yang fundamental atau mendasar dimana permasalahan tersebut berasal.

### **Menyoal Konflik Dalam Pandangan Ahli**

David Lockwood (2007) mengatakan bahwa setiap situasi sosial senantiasa mengandung di dalam dirinya dua hal, yakni: tata tertib sosial yang bersifat normatif, dan substratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib dan konflik adalah dua kenyataan yang melekat bersama-sama di dalam setiap sistem sosial. Tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat, sama sekali tidak berarti lenyapnya konflik di dalam masyarakat. Sebaliknya, tumbuhnya tata tertib sosial justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang stabilitas (harmoni) dan instabilitas (konflik) daripada suatu sistem sosial, maka yang kita maksudkan adalah derajat keberhasilan dan atau kegagalan dari suatu tertib normatif di dalam mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Konflik merupakan gejala yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mungkin dilenyapkan. Sebagai gejala kemasyarakatan yang selalu inheren di dalam kehidupan setiap masyarakat, eksistensi konflik tidak dapat dilenyapkan, ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu menurut Nasikun (2007) yang dapat dilakukan orang hanyalah mengendalikan agar konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan sosial, konflik yang terjadi diantara berbagai kelompok sosial yang saling berlawanan tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan (*violence*). Hal inilah yang kami sebut sebagai konflik tanpa kekerasan.

Jika ada pertanyaan, apakah suatu konflik mempunyai manfaat bagi masyarakat manusia atau tidak? Jawabannya bisa 'ya' atau bisa 'tidak', tergantung dari sisi mana kita melihat konflik. Lewis Coser (2009) dalam bukunya: *The Functions of Social Conflict*, berkata bahwa sisi positif/manfaat konflik bagi masyarakat ada dua yaitu *pertama*, konflik dapat memberikan kontribusi terhadap integrasi 'sistem' sosial. *Kedua*, konflik dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Jadi, fungsi atau manfaat konflik itu menurut Coser adalah memperlambat kohesifitas kelompok, menambah solidaritas atau kekompakan internal kelompok (*in group feeling*) dan meningkatkan moral kelompok untuk menghadapi kelompok luar (*out group*).

Sementara sisi negatif konflik, jumlahnya sangat banyak, karena dalam realitas sosial bukan hanya kerugian material yang dirasakan tetapi juga kerugian immateril. Bukan hanya korban harta benda, berupa rusaknya fasilitas sarana dan prasarana tetapi juga korban jiwa berupa cacat tubuh, dan hilangnya nyawa manusia. Anda bisa hitung dan bayangkan, berapa banyak kerugian jika suatu konflik berkecamuk misalnya: proses belajar-mengajar terganggu; alat transportasi pete-pete dan ojek terhenti; tempat fotocopy, warung makan, dan toko/kios lainnya tutup; ratusan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan; petugas kesehatan rumah sakit terpaksa dibangunkan dari tidur dan

disibukkan dengan masuknya korban sebagai pasien baru, aktivitas masyarakat sekitar kampus pun menjadi terganggu, dan seterusnya. Singkatnya, satu orang yang berbuat onar, segelintir orang yang membuat rusuh, seluruh masyarakat merasakan dan menanggung beban akibat negatif konflik.

### **Gebrakan Spektakuler Pak Rektor?**

Pada upacara kesadaran nasional tanggal 17 September 2010 lingkup Universitas Haluoleo Kendari yang digelar di lapangan Rektorat Kampus Baru, Rektor Unhalu Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S memberikan penghargaan kepada dosen, karyawan, teknisi/pustakawan, pengelola keuangan dan mahasiswa yang berprestasi. Penghargaan yang diberikan kali ini tidak hanya berbentuk sertifikat, tetapi juga berupa materi. Bentuknya macam-macam, mulai dari bonus mendapatkan satu judul penelitian dengan anggaran sebesar 40 juta sampai dengan 50 juta rupiah, door prize, hingga hadiah naik haji bagi yang mampu.

Pertama, khusus kepada mahasiswa berprestasi tahun 2010, atas nama Sumardona (mahasiswa Administrasi FISIP Unhalu), rektor memberikan penghargaan spesial disamping sertifikat dan uang, sekaligus juga mengangkat mahasiswa tersebut sebagai Duta Keamanan dan Perdamaian Kampus (DKPK). Langkah ini ditempuh rektor untuk merespons kondisi Unhalu yang insecure. Tugas utama duta perdamaian tersebut menurut rektor antara lain adalah untuk memerangi mahasiswa Unhalu terutama yang suka meminum minuman keras (miras) dan mencegah perilaku anarkis lainnya. Bahkan lebih jauh, pak rektor Unhalu mengharapkan agar Duta Perdamaian Kampus tersebut dapat menjalin komunikasi dan kerjasama secara intensif dengan para pemilik asrama di sekitar kampus Unhalu. Kerjasama dengan masyarakat dan pemilik asrama perlu dilakukan, mengingat konflik yang terjadi selama ini terkadang bermula dari asrama lalu dibawa masuk ke dalam kampus, atau sebaliknya, konflik di kampus dibawa ke asrama. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kekerasan dan menciptakan perdamaian. Gebrakan

bapak rektor tersebut sesuai dengan misi Unhalu yaitu "mengembangkan lingkungan universitas yang nyaman, aman, dan berwawasan lingkungan". Upaya kreatif untuk menciptakan kampus yang damai tersebut perlu diacungi jempol, karena hal ini dapat menjadi contoh yang baik bagi civitas akademika Unhalu, masyarakat dan stake holders konflik lainnya.

Kedua, kucuran dana penelitian bagi dosen yang dianggap berprestasi merupakan momentum yang amat strategis untuk dimanfaatkan dalam mengkaji secara holistik atas dinamika suka duka perjalanan mahasiswa Unhalu dengan berbagai problematikanya. Secara fenomenal, dinamika dan aktivitas mahasiswa tampak amat berbeda pada kurun waktu sebelum dan sesudah reformasi. Dalam konteks ini, dapat diduga bahwa boleh jadi geliat pergumulan irasional mahasiswa pada pasca reformasi, signifikan dengan euforia politik yang menggelegar di era Pemilu Kada. Karena itu besar harapan, agar dana penelitian tersebut mampu menemukan hasil kajian yang mumpuni dari berbagai perspektif, terutama pada konteks ekonomi dan politik yang diduga paling dominan berpengaruh dalam pergolakan premanisme.

Ketiga, insentif religiusitas dalam bentuk dana haji yang demikian mengagumkan ini, patut dikembangkan secara kontinu dan lebih luas, termasuk memberikan dana umrah dan haji kepada mahasiswa yang telah berhasil menunjukkan kesadaran dan jati dirinya sebagai anak-anak cerdas yang telah meninggalkan potret suram masa lalunya. Dengan dana umrah dan haji diharapkan dapat men-derivasi mahasiswa pembuat onar, menjadi "Anton Medan-Anton Medan" (baca "Anton Kendari-Anton Kendari").

Namun pada sisi lain, sebagai insan akademis kami menawarkan tiga hal penting yang mungkin bisa menjadi bahan renungan bersama dalam kerangka penanggulangan prahara kampus biru Unhalu yang sudah amat menjengukkan. Pertama, seyogyanya, disamping mengangkat mahasiswa sebagai duta perdamaian, perlu kiranya membentuk tim



atau lembaga yang secara khusus bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan tentang keamanan dan perdamaian kampus. Lembaga baru tersebut bernama Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) sebagaimana yang telah ditempuh oleh universitas maju dan besar lainnya di Indonesia seperti UGM Yogyakarta, dan lain-lain. Perihal ini telah penulis tulis dimedia ini beberapa waktu lalu.

Kedua, untuk menciptakan Unhalu yang damai, juga perlu mengoptimalkan fungsi Satuan Keamanan Kampus (SKK) selaku instrumen dan pilar utama keamanan kampus. Kinerja security (SATPAM) harus kuat dan terukur, misalnya seberapa besar kemampuannya dalam mencegah terjadinya konflik, menangani konflik yang terjadi serta menangkap pelaku kerusuhan, termasuk kemampuannya menjalin hubungan kerjasama dengan pihak kepolisian. Hasil kerja security dilaporkan kepada rektor secara periodik, untuk dievaluasi.

Ketiga, hukum dan keadilan juga mesti ditegakkan sebagai prasyarat mutlak demokratisasi kampus. Yang terbukti bersalah dan melanggar norma hukum, harus ditangkap, diberi sanksi, dan diadili secara hukum tanpa memandang bulu "siapa dia". Ketiadaan supremasi hukum, perdamaian yang didambakan tetap saja hanya menjadi sebuah utopia dan kamuflase belaka. Singkatnya, untuk menciptakan keamanan kampus, tidak cukup apabila hanya mengandalkan satu komponen saja yang bekerja tetapi seluruh komponen mesti memberikan kontribusi untuk itu. Rektor, mahasiswa, dosen, karyawan, keamanan, masyarakat dan seluruh stakeholders konflik, harus saling bahu-membahu untuk memberikan kontribusi. Sekecil apapun upaya-upaya yang mereka lakukan untuk perdamaian kampus Unhalu patut diapresiasi, daripada tidak berbuat sama sekali. Dalam konteks ini, Mahatma Gandhi berkata: "*What you do is of little significance. But it is very important that you do it.*" Mari bersama berbuat sesuatu untuk menciptakan Unhalu yang damai, dan menolak setiap tindakan kekerasan.

## **Majulah Bangsa: Unhalu Jaya Sepanjang Masa (Refleksi Kritis Perjalanan 30 Tahun Unhalu)<sup>17</sup>**

“... Amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Tegar Mandiri Dalam Kesejawatan; Dan Majulah Almamaterku; ... Universitas Haluoleo; Tetap Jaya Sepanjang Masa; Unhalu Jaya Sepanjang Masa...” Kata-kata tersebut merupakan penggalan dari Mars Universitas Haluoleo Kendari yang selalu dinyanyikan dan diperdengarkan kepada seluruh peserta, setiap kali menyelenggarakan acara-acara resmi Universitas Haluoleo.

Apabila kita menyimak secara seksama dalam Mars Unhalu tersebut, tersirat pesan (*hidden messages*) dan menyimpan sejumlah harapan. Harapan akan kemajuan dan kejayaan. Harapan kemajuan dan kejayaan tersebut terdapat dalam kata-kata “...dan Majulah Almamaterku... Unhalu Jaya Sepanjang Masa”. Kemajuan dan kejayaan adalah merupakan harapan dan sekaligus impian kita semua yang mempunyai komitmen besar untuk memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan di bumi Sulawesi Tenggara tercinta, yang secara eksplisit telah dituangkan dalam visi misi Unhalu yaitu menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, dan berbudaya akademik.

Poin penting lain dari Mars Unhalu yang perlu dicermati, dipahami dan diamalkan oleh seluruh sivitas akademika Unhalu adalah “amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 45 akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bersama (*common good*) bagi seluruh bangsa Indonesia dan khususnya bagi sivitas akademika. Jika Anda bertanya benarkah menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 45 akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bersama bagi seluruh bangsa Indonesia? Dalam banyak hal jawabannya adalah “iya benar”, karena Pancasila

---

<sup>17</sup> Tulisan ini sudah ditebitkan di Kendari Pos Edisi Rabu, 21 September 2011

merupakan perekat dan dasar negara Indonesia, yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang merupakan referensi dan patokan dalam berperilaku dan berinteraksi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sila-sila Pancasila (mulai dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) seolah-olah memberitahukan kepada kita semua bangsa Indonesia bahwa jika kamu ingin maju dan bermartabat, maka berpeganglah dan amalkanlah butir-butir Pancasila, karena kelalaian dan kelupaan kalian, yang tidak berpegang kepada Pancasila akan mendatangkan banyak masalah.

Sejarah telah memperlihatkan dan membuktikan kepada bangsa Indonesia bahwa ketika Pancasila mulai diabaikan dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia, maka kehancuran dan masalah akan datang. Misalnya saja ketika sila Ketuhanan Yang Maha Esa, disalah-tafsirkan, tidak lagi dijadikan sebagai pedoman dan tidak lagi menjiwai kehidupan umat beragama, maka pandangan intoleransi terhadap umat beragama lain menjadi jamak terlihat dalam kehidupan masyarakat kita. Sikap penghargaan dan toleransi terhadap agama lain menjadi barang langka. Kongritnya dapat dilihat dari adanya konflik antara satu agama maupun konflik antar umat beragama. Demikian pula dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika manusia Indonesia berbuat tidak adil dan tidak beradab terhadap manusia lain, maka penganiayaan (baca tindakan main hakim sendiri) seseorang atau sekelompok orang tertentu terhadap sekelompok orang yang lain merupakan hal yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu sila Persatuan Indonesia mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia bahwa jika kalian ingin maju dan bermartabat, maka kalian harus bersatu padu dalam melawan musuh-musuh kalian, terutama dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Adapun sila kerakyatan, menginginkan agar dalam setiap suksesi, yaitu proses pemilihan dan pergantian

pimpinan lembaga apapun namanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, prosesnya harus dilakukan secara terbuka, adil, dan demokratis. Mengakui kemenangan pihak lain, dan *legowo* menerima kekalahan. Terakhir, sila kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki agar sumber-sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan terutama sumber daya ekonomi, harus dimanfaatkan, dikelola serta didistribusi secara merata. Jangan sampai sumber daya hanya dimonopoli oleh segelintir orang untuk kepentingan dan kesejahteraan kelompoknya saja, tetapi sumber daya tersebut mestinya dikelola, dimanfaatkan, dan didistribusi secara merata dalam masyarakat, serta hasilnya dinikmati pula secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Singkatnya, yang menikmati hasil pembangunan dan yang sejahtera bukan hanya satu orang, satu kelompok, satu etnis, satu agama, dan satu daerah tertentu saja, tetapi hasil-hasil pembangunan harus diperuntukkan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga dengan demikian akan tercipta kedamaian, ketertiban, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembali ke soal kemajuan dan kejayaan Unhalu, Rektor ke-5 Unhalu mempunyai obsesi untuk membawa Unhalu menjadi universitas penguasa di delapan penjuru dunia, yakni dengan mengadakan berbagai kerjasama dan kegiatan-kegiatan akademik yang berskala nasional maupun internasional. Kegiatan internasional terakhir yang dilakukan Unhalu adalah Seminar Internasional dengan Tema: *“Celebrating Diversity Living in Harmony”*. Seminar internasional yang disponsori oleh Dikti dan UNESCO yang dihadiri oleh 12 negara tersebut telah dilaksanakan tanggal 8 – 10 September 2011 lalu. Menurut rencana dalam waktu dekat, Unhalu masih akan menyelenggarakan 2 event nasional dan 2 event internasional lagi. Semua itu dilakukan untuk mempromosikan, membuat citra positif Unhalu di dunia luar dan untuk kemajuan Unhalu kini dan akan datang.

Sebetulnya, upaya menuju kemajuan dan kejayaan bukan merupakan perkara mudah karena dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan butuh kerja keras dari seluruh civitas akademika Unhalu. Disamping itu pula, Unhalu harus mampu melewati hambatan, tantangan, dan persoalan yang menerpa kampus hijau ini. Ada banyak hambatan, tantangan, dan persoalan yang mesti dilewati dan diselesaikan secara tuntas oleh Unhalu, jika Unhalu benar-benar ingin mempunyai keinginan kuat menjadi universitas maju dan berkelas dunia. Diantara batu sandungan dan tantangan yang harus diselesaikan secara tuntas oleh Unhalu adalah penyelesaian konflik (tindakan main hakim sendiri) yang setiap tahun masih selalu terjadi.

### **Diversity in Living Harmony**

Keberagaman kebudayaan, suku, agama, ras, daerah asal, jenis pekerjaan, dan lain-lain dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis masih merupakan sebuah cita-cita daripada kenyataan. Hal tersebut terdapat dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya masih lebih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Dalam pada itu, kenyataan bahwa gagasan-gagasan tentang persatuan nasional senantiasa muncul setiap kali bangsa Indonesia sedang diancam oleh pertentangan-pertentangan pendapat yang cukup gawat diantara kekuatan-kekuatan sosial politik tertentu, barangkali dapat kita pandang sebagai perwujudan daripada kenyataan bahwa Bhineka Tunggal Ika memang masih merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang masih harus terus-menerus diperjuangkan. Konflik dan disintegrasi masih akan tetap menjadi masalah yang rawan bagi bangsa Indonesia untuk suatu jangka waktu yang masih cukup lama di masa-masa yang akan datang, terutama karena proses pembangunan yang akan terus-menerus meningkat di masa-masa mendatang dapat

mengakibatkan kepentingan-kepentingan berbagai golongan menjadi semakin mengemuka dan saling berhadapan satu sama lain.

Bhineka tunggal ika dibutuhkan untuk mengikat pluralisme masyarakat Indonesia (*plural society*) tetapi dalam pengelolaannya harus dilakukan dalam cara yang santun dan beretika dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kehidupan harmoni yang penuh kedamaian dan ketentraman, tanpa ada konflik dan kekerasan, merupakan dambaan setiap masyarakat termasuk masyarakat Unhalu. Posisi Unhalu yang terbuka, disertai dengan diversitas civitas akademika menyebabkan potensi konflik sering mencuat di permukaan. Konsep Bhineka Tunggal Ika (*We are of many kinds but We are one*) mestinya sudah selesai. Yang belum selesai adalah pengakuan dari pemerintah tentang adanya satu statement kebudayaan bahwa harkat, peluang dan kesempatan yang sama harus didistribusi secara merata. Pemerataan, kesetaraan, dan juga keadilan mayoritas terhadap minoritas (*equality of citizenship rights*) merupakan prasyarat yang mesti ada. Oleh karena itu, maka perbedaan dan keragaman tidak hanya dirayakan (*celebrating diversity*), tetapi harus dipahami, dijaga, dilestarikan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### **Kendala dan Tantangan ke Depan**

Sama halnya dengan kendala dan problem yang dialami oleh sebuah negara/daerah yang sedang membangun, Unhalu juga mengalami persoalan yang sama. Dilihat dari usianya, Unhalu memang bukan lagi termasuk dalam deretan universitas mudah usia di Indonesia, karena tanggal 19 Agustus 2011 lalu, Unhalu baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30. Pada usia yang menanjak dewasa tersebut, harus diakui bahwa banyak sudah kemajuan dan prestasi yang telah dicapai dan ditorehkan oleh Unhalu. Misalnya saja peningkatan jumlah fakultas/jurusan/program studi (S1, S2, dan S3), peningkatan jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi, peningkatan sarana dan

prasarana kampus, dan lain-lain. Bahkan pada usianya yang ketigapuluh, Rektor Unhalu Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS. berhasil mencatatkan diri sebagai Ketua Forum Rektor seluruh Indonesia, yang mana jabatan prestisius tersebut belum pernah dijabat oleh para Rektor Unhalu sebelumnya.

Namun demikian, dibalik sederet prestasi tersebut, Unhalu bukan berarti tidak mempunyai masalah, sebaliknya kampus Unhalu masih menyimpan sejumlah persoalan. Dan hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di mana pun. Diantara persoalan Unhalu adalah masalah konflik dan tindakan main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di dalam kampus maupun di sekitar lingkungan kampus setiap tahun. Konflik tahunan (*annual conflict*) Unhalu cukup meresahkan civitas akademika Unhalu, karena konflik tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung telah mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat, serta mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan perkuliahan di Kampus Hijau tersebut.

Dibandingkan konflik yang terjadi tahun 2010 lalu, intensitas konflik tahun 2011 memperlihatkan tendensi dan kurva yang meningkat. Peningkatan tersebut bukan hanya soal jumlah kontestan dan banyaknya korban, tetapi juga menyangkut derajat ketakutan masyarakat, daya jangkau konflik, serta areal terjadinya konflik.

Dalam perspektif teori konflik, konflik dibutuhkan untuk kemajuan dan perubahan sosial. Namun implementasi dari konflik tersebut jangan diwujudkan dengan kekerasan. Dalam bahasa penulis “Konflik Tanpa Kekerasan (*conflict without violence*)”. Silahkan berkompetesi, tetapi dilakukan dengan cara yang gentle, etis, santun, dan agamis. Dengan begitu, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang maju, optimistik (*optimistic society*), santun, berbudi pekerti luhur, menghormati budaya lain, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Mari kita dukung segala upaya damai yang konstruktif untuk kemajuan bangsa, dan untuk kemajuan Kampus Hijau kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia, sehingga cita-cita Unhalu menjadi Jaya sepanjang masa dapat tercapai. Aman-damai negeriku, Majulah bangsaku, Unhalu Jaya Sepanjang Masa. Dirgahayu Unhalu.



## **Pendidikan Karakter Tangkal Radikalisme dan Kekerasan di Lembaga Pendidikan<sup>18</sup>**

Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari kembali mengadakan kegiatan Pendidikan Karakter Bela Negara bagi Mahasiswa Baru angkatan Tahun 2017, yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yang berlangsung mulai hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan hari Ahad tanggal 10 Desember 2017. Kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun 2012 ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Halu Oleo Kendari Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si, M.Sc. di Stadion Mini UHO.

Kegiatan Pendidikan Karakter Bela Negara Tahun 2017 kali ini diikuti oleh sekitar delapan ribuan Mahasiswa Baru yang berasal dari delapan belas fakultas dalam lingkup Universitas Halu Oleo, yang tersebar di tujuh belas titik tempat lokasi (gugus) penyelenggaraan kegiatan. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Halu Oleo dengan Sistem Pendidikan Karakter dimulai sejak tahun 2012, para peserta didampingi langsung oleh para mentor dan seluruh dosen, baik dosen PNS maupun dosen non-PNS. Dalam kurun waktu 2012-2015 sebanyak ± 26.635 mahasiswa telah mengikuti Pendidikan Karakter, tahun 2016 sebanyak 11.235 mahasiswa, dan tahun 2017 sebanyak 8.010 mahasiswa, sehingga total mahasiswa yang telah mengikuti Pendidikan Karakter mulai tahun 2012-2017 sekitar 45.872 mahasiswa.

Khusus di Gugus FISIP-UHO yang bertempat di Sport Center, materi pendidikan karakter bela negara tahun 2017 kali ini dibagi dalam tiga bagian. Pertama, materi tentang: Tatanan Dasar Bela Negara; Sistem Pertahanan SEMESTA dibawakan oleh Mayor Infantri Azwar Dinata, SH; Wawasan Kebangsaan; Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Kebangsaan dibawakan oleh AKBP Arief Gunawan, SKM, ME; serta Bahaya Radikalisme, Terorisme, dan Bahaya

---

<sup>18</sup> Terbit Desember 2017.

Narkoba dibawakan oleh AKBP Eddy Mulsupriyanto, SE, MAP. Para narasumber bagian pertama berasal dari TNI AD, TNI AL, dan POLRI. *Kedua*, materi tentang: Sistem Pendidikan Tinggi dan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Bapak La Hamimu, S.Si, M.T. Ph. D; materi tentang Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, Program dan Prestasi UHO dibawakan oleh Dekan FISIP UHO Bapak Dr. Bahtiar, M.Si; materi implementasi UHO JAGAD KITA dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FISIP UHO Bapak Dr. H. Sulsalman Moita, M.Si; serta motivasi dan/atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja lulusan Perguruan Tinggi dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UHO Bapak Dr. Muhammad Zein Abdullah, M.Si. Pada bagian *Ketiga*, materi tentang kemahasiswaan, kelembagaan mahasiswa tingkat Fakultas dan tingkat Universitas, dibawakan langsung oleh para mentor mahasiswa. Mereka adalah para senior mahasiswa, dan kebanyakan dari mentor merupakan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan UHO baik Pengurus di Tingkat Fakultas maupun di Tingkat Universitas.

### **Pendidikan Karakter**

Karakter (*character*) merupakan watak, sifat dan kualitas pribadi yang bersumber dari kekuatan moral, budaya dan spiritualitas dan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa dibeli dan karakter tidak bisa ditukar. Karakter mesti dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses panjang yang tidak instan melalui proses sosialisasi dan pendidikan. Sementara pendidikan karakter (*character education*) adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter anak, siswa/mahasiswa (peserta didik) melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan karakter tidak hanya diperoleh melalui bangku pendidikan tetapi juga dapat diperoleh dalam keluarga dan masyarakat.

Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman tiga hubungan yang pasti dialami setiap manusia yaitu hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), hubungan dengan lingkungan sosial dan alam sekitar, serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa (spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan pada diri manusia. Cara seseorang (peserta didik) memahami bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara dia memperlakukan dunianya. Pemahaman negatif pada sesuatu akan berimbas pada perlakuan yang negatif dan pemahaman yang positif akan cenderung memperlakukan dunianya secara positif pula. Untuk itu, penting sekali menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman positif peserta didik dengan cara memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengambil keputusan dan mengarahkan potensi dirinya, memberikan kebebasan serta tidak menekannya agar muncul kepercayaan diri (*self confidence*).

Dalam kaitan dengan lingkungan, hubungan sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi dan interaksi dengan manusia lain di lingkungan tempat tinggalnya. Keadaan lingkungan akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter. Seperti kata pepatah bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi, bergaul dengan penjual ikan akan ikut amis. Seperti itulah, lingkungan baik dan sehat akan menumbuhkan karakter sehat dan baik, begitu pula sebaliknya. Dan selanjutnya yang tidak bisa diabaikan adalah membangun hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan spiritual dengan Tuhan YME terbangun melalui pelaksanaan ibadah dan penghayatan ajaran agama dan ibadah ritual yang terimplementasi pada kehidupan sosial.

Ada sejumlah nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu dibentuk dan ditumbuhkembangkan yaitu: nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam konteks kekinian sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda bangsa kita. Krisis moral tersebut antara lain berupa dekadensi moral berupa pornografi dan meningkatnya pergaulan bebas (*free sex*), intoleransi berupa maraknya radikalisme, kekerasan (*violence*) dan tindakan main hakim sendiri, pencurian motor, kebiasaan menyontek, penyalagunaan obat-obatan, dan perusakan milik orang lain dan pengrusakan fasilitas publik, dll merupakan masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Komponen-komponen pembentukan nilai-nilai karakter meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman pada nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. Kedua, membangun rasa percaya diri dan keberanian, dengan begitu peserta didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut pada resiko setiap kali menghadapi situasi baru. Ketiga, adanya otonomi (kemandirian), yaitu peserta didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, siswa mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan siswa dalam mewujudkan apa yang dipandang baik, sementara kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia karena akan menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa yang berkualitas, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan (*togetherness*), kepedulian pada sesama (*careness*),

kegotongroyongan, sifat saling membantu (*helping each others*), menghargai dan menghormati pada perbedaan (*diversity*), demokratis, cinta damai, cinta tanah air, disiplin, kreatif, mandiri, dsb. Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja namun juga memiliki karakter bagi lahirnya seorang pemimpin bangsa yang tangguh.

### **Radikalisme dan Kekerasan**

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang masyarakatnya sangat beragam, dalam istilah J.S. Furnivall (1967) dan van den Berghe (2007) menyebutnya sebagai “*Plural Societies*”. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari suku, bahasa, budaya, agama, pekerjaan, dll. Ada sekitar 250 juta penduduk, 17.000 pulau, 714 suku bangsa dengan bahasa, budaya, dan ciri khas yang sangat berbeda satu sama lain, serta potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Dalam kondisi demikian, Indonesia akan senantiasa diintai, dirongrong, oleh gangguan, *challenge* dan bahaya (*danger*) berupa intoleransi, radikalisme, konflik, kekerasan dan disintegrasi. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia membutuhkan nilai-nilai konsesus yang bersifat integratif yang dapat menyatu padukan berbagai keragaman tersebut.

Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara radikal, drastis sampai ke akar-akarnya, yang kerap kali dipraktikkan menggunakan cara-cara kekerasan. Sementara gerakan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot-tradisional dan sering menggunakan kekerasan dalam mendeliveri ideologi serta menunjukkan eksistensi mereka di ranah publik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika ada warga negara dengan sengaja menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyerang dan/atau menyakiti orang atau kelompok lain, perbuatan tersebut merupakan contoh perbuatan yang tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila serta tidak dibenarkan di hadapan hukum karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Radikalisme tidak muncul secara spontan, tetapi muncul melalui proses yang panjang. Pandangan hidup yang terbangun sebelumnya dapat sepenuhnya mempengaruhi pemahaman radikal di kalangan masyarakat. Paham radikal sering kali dihubungkan dengan agama (Islam), sehingga memunculkan gerakan terorisme. Agama Islam dianggap sebagai agama yang “tidak” rahmatan lil’alamin, yang sering kali dianggap sebagai agama radikal. Pandangan sempit yang “salah alamat” ini tidak benar dan harus diluruskan, karena fakta empirik di masyarakat menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya radikalisme bukan hanya disebabkan oleh agama tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dll.

Dalam level lokal Provinsi Sulawesi Tenggara, paling tidak kondisi eksisting sampai dengan Desember 2017, faktor-faktor penyebab terjadinya radikalisme dan kekerasan masih didominasi oleh isu-isu sosial, politik, budaya, dan ekonomi ketimbang dengan masalah-masalah yang terkait dengan agama. Mengapa demikian? Karena mayoritas penduduk Sulawesi Tenggara memeluk agama Islam. Dalam banyak kasus peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi, faktor-faktor penyebab terjadinya radikalisme dan kekerasan lebih banyak disebabkan oleh faktor kompetisi di antara etnik yang berbeda utamanya persaingan antara etnik Muna, Tolaki, Buton, Bugis-Makassar, dan etnik-etnik lainnya dalam memperebutkan sumber-sumber daya ekonomi yang langka dan terbatas serta perebutan kekuasaan politik. Fenomena persaingan tersebut lebih kental terasa di Kota Kendari sebagai ibukota provinsi dibandingkan dengan di daerah-daerah kabupaten. Intensitas kekerasan semakin memanas dan menemukan bentuknya ketika event suksesi atau pemilihan kepala daerah berlangsung.

Terkait dengan fenomena politik, Johan Galtung (2003) mengkaitkan persoalan radikalisme dengan terhalangnya seseorang untuk mengaktualisasikan potensi diri terutama menyangkut hak untuk turut serta dalam politik. Ada 3 bentuk radikalisme menurut Galtung,

yaitu radikalisme kultural, radikalisme struktural, dan radikalisme langsung. Radikalisme kultural merupakan radikalisme yang melegitimasi terjadinya radikalisme struktural dan radikalisme langsung. Radikalisme langsung (*violence-as-action*) sendiri dimaknai sebagai radikalisme yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan, sehingga mudah dilakukan identifikasi terhadap jenis radikalisme ini, sedangkan radikalisme struktural (*violence-as-structure*) diartikan sebagai radikalisme yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran, serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Radikalisme dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam kondisi apapun, apakah negara, masyarakat, kelompok tertentu, atau bahkan individu dapat menjadi pelaku radikalisme.

### **Upaya Menangkal Radikalisme dan Kekerasan**

Sebagai bangsa yang majemuk di tengah kemajuan dan perkembangan pesat teknologi informasi, Indonesia akan senantiasa dirongrong oleh gangguan dan ancaman, baik ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang merongrong persatuan, kesatuan, dan Bhineka Tunggal Ika Indonesia adalah berupa intoleransi, radikalisme, konflik, kekerasan, dekadensi moral, dan disintegrasi. Sebagai konsekuensi dari bangsa yang majemuk, Indonesia tidak hanya membutuhkan nilai-nilai konsesus yang bersifat integratif yang dapat menyatu padukan berbagai-bagai keragaman tersebut, tetapi juga membutuhkan metode pengajaran yang terarah dan sistematis kepada seluruh warga negaranya (generasi muda) akan pentingnya nilai-nilai budi pekerti yang luhur, moral, budaya, dan agama untuk melahirkan karakter warga negara yang religius, maju, beradab, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai perbedaan,

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta bertanggung jawab.

Di samping pendidikan karakter, generasi muda utamanya mahasiswa perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan sebagai mediator perdamaian. Pendidikan perdamaian diartikan sebagai proses memajukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang akan memungkinkan mahasiswa dapat mencegah konflik yang terjadi, ataupun mengatasi konflik yang sudah terjadi. Pendidikan ini lebih mengedepankan praktek dibandingkan dengan teori. Pendidikan perdamaian dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang secara kreatif untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap satu sama lain. Salah satu strategi penerapannya adalah melalui pertunjukkan seni budaya, seminar, diskusi atau lokakarya. Jika upaya-upaya itu dilakukan secara konsisten, akan mendorong dan mempermudah terwujudnya perdamaian dunia.

Dalam banyak kasus peristiwa konflik, radikalisme, dan kekerasan yang terjadi, seperti kasus perkelahian antar pelajar SMP/SMA, kasus kekerasan senior terhadap junior di lembaga pendidikan, perkelahian antar lorong atau perkelahian kampung, bahkan konflik dalam skala besar yang melibatkan suku dan agama, aktor-aktor konflik adalah generasi muda. Karena itu, penting sekali secara dini memberikan pendidikan perdamaian kepada siswa/mahasiswa supaya mereka tidak melakukan kekerasan, malah sebaliknya mereka dapat menjadi aktor-aktor perdamaian di lingkungan mereka.

Terakhir, upaya menangkal radikalisme dan kekerasan bukan hanya tugas TNI/POLRI, tetapi merupakan tugas bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, kampus sebagai lembaga pendidikan yang siap mencetak calon-calon pemimpin bangsa harus tampil sebagai garda depan untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan perdamaian guna menciptakan dunia yang aman, damai dan sejahtera.



# Tentang Penulis



**Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A** lahir di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendidikan dasar dan menengah dijalaninya di Kota Bau-Bau, sementara pendidikan SMA ditamatkan di Makassar. Tahun 1997, menamatkan pendidikan jenjang Sarjana-S1 di Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Hasanuddin Makassar. Gelar M.A. bidang Sosiologi dan Pemberdayaan Masyarakat diraihinya di Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun. Selanjutnya tahun 2016, memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.

**Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A** sejak tahun 2005 menjadi Dosen Tetap di Jurusan Sosiologi FISIP UHO Kendari. Mata Kuliah yang dibina antara lain: Teori Sosiologi Klasik dan Modern; Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Masalah-masalah Sosial dalam Pembangunan; dan Studi Kemiskinan.

Di samping itu, ia juga *concern* dengan isu-isu terkait *social welfare; social services; social policy; community development; social empowerment; poverty reduction program; Corporate Social Responsibility*; dan program-program pembangunan lainnya. Tulisan yang telah dipublikasi di Kendari Post antara lain: *Konflik Tanpa Kekerasan; Mahasiswa sebagai Duta Perdamaian, Mungkinkah?* dan *Majulah Bangsaku*. Beberapa hasil penelitian sudah diterbitkan dalam

jurnal ilmiah lokal, nasional, dan internasional. Di samping kesibukan mengajar, membimbing, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ia juga aktif menulis dan menjadi *presenter* pada seminar nasional dan internasional.